

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PAJAK
ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DI KOTA MALANG**
(SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SEFTIYA RAHMANIA
NIM. 125030400111001



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017

MOTTO

Where there's a will, there's a way

*You will never fall if you are afraid to climb, But there is no joy in living your
entire life on the ground*

TANDA PERSETUJUAN

Judul : Analisis Efektivitas Implementasi Pemungutan Pajak atas Rumah
Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang (sesuai
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah)

Disusun oleh : Seftiya Rahmania

NIM : 125030400111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 18 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 195807061985031004

Anggota



Yuniadi Mavowan, S.Sos, MAB
NIP.19750614200812 1002

TANDA PENGESAHAN

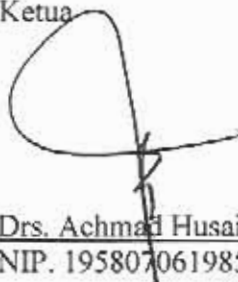
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Februari 2017
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Seftiya Rahmania
Judul : Analisis Efektivitas Implementasi Pemungutan Pajak atas
Rumah Kos Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota
Malang (sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah)

dan dinyatakan lulus

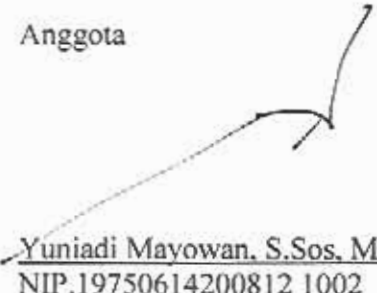
MAJELIS PENGGUJI

Ketua




Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 195807061985031004

Anggota




Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB
NIP.19750614200812 1002

Ketua



Mochammad Al Musadieq, Dr. MBA
NIP. 195805011984031001

Anggota



Muhammad Saifi, Dr. Drs. M.Si
NIP. 195707121985031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 18 Januari 2017

Seftiya Rahmania
125030400111001

RINGKASAN

Seftiya Rahmania, 2017, **Analisis Efektivitas Implementasi Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang**, Achmad Husaini, Yuniadi Mayowan, 126 Hal + xv.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, sebagai kota pendidikan dengan mobilitas penduduk yang tinggi memberikan dampak dengan meningkatnya pertumbuhan usaha rumah kos yang diperlukan masyarakat sebagai tempat tinggal selama berada di Kota Malang. Fenomena ini membuat Pemerintah Kota Malang yang merupakan penyelenggara otonomi daerah melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 menetapkan kepemilikan usaha rumah kos sebagai potensi pemungutan pajak daerah yang diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan pajak di Kota Malang. Namun sampai Februari 2015, jumlah wajib pajak rumah kos yang telah terdaftar masih sangat kurang jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak di lapangan.

Penelitian ini disusun untuk mengetahui implementasi dan efektivitas pemungutan pajak atas rumah kos yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta kontribusi pemungutan pajak atas rumah kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos, efektivitas pemungutan pajak atas rumah kos, dan kontribusi penerimaan pajak atas rumah kos. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis implementasi kebijakan yaitu menggunakan teori Grindle, analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan pajak rumah kos, dan analisis kontribusi membandingkan realisasi penerimaan pajak rumah kos dan penerimaan pajak daerah.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak atas rumah kos yang memberikan temuan kepada peneliti bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat terhadap kebijakan khususnya pemilik rumah sebagai wajib pajak yang merupakan implementor kebijakan masih kurang. Efektivitas pemungutan pajak rumah kos dari periode tahun 2013 sampai 2015 yaitu dengan prosentase 105,23%, 163,48%, dan 173,86% dengan kriteria sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap Pajak Daerah tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu 0,03%, 0,26%, dan 0,55%. Namun peningkatan kontribusi tersebut dinilai sangat kurang karena kontribusinya masih kurang dari 10%. Dispenda Kota Malang sebaiknya melakukan pembaharuan data wajib pajak yang telah terdaftar dan masyarakat yang memiliki usaha rumah kos dengan meninjau langsung ke lapangan. Sehingga data yang dimiliki oleh Dispenda sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pajak dengan memberikan data dan keterangan yang benar.

SUMMARY

Seftiya Rahmania, 2017, **Analysis of Implementation Effectiveness of the Tax on Boarding House Local Tax Revenue in Malang**, Achmad Husaini, Yuniadi Mayowan, 126 Pages + xv.

Malang is the second largest city in East Java, as the city of education with high population mobility impact with the growth of the business community required a house as a place to stay while in the city of Malang. This phenomenon makes Malang government which is the organizer of regional autonomy through Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 stipulates boardinghouse business ownership as a potential tax collection area is expected will provide increased tax revenue in Malang. However, until February 2015, the number of taxpayers registered boarding houses were still very less when compared to the potential taxpayers in the field.

This researched was to determine the implementation and effectiveness of the tax on boarding houses that were governed by the Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 on Regional Taxes and contributions tax on the boarding house to Local Tax Revenue in Malang. Research using descriptive research method with qualitative approach. The focus of this researched was the implementation of tax policy boarding house, the effectiveness of tax collection on the boarding house, and the contribution of tax revenue over the boardinghouse. The study was conducted at the Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang with data collection were interviews and documentation study. The method of analysis of policy implementation that used Grindle theory, analysis of effectiveness by comparing actual and target the tax revenue boarding houses, and contribution analysis comparing tax revenue boarding houses and local tax revenue.

Results from the study showed policy implementation process of tax collection on boarding houses were on the findings of the researchers that the level of compliance and responsiveness to the public and policy-homeowner as a taxpayer who is an implementor of policy was still lacking. The effectiveness of tax collection boarding houses from the period of 2013 to 2015 that the percentage of 105.23%, 163.48%, and 173.86% with a very effective criteria. The contribution of tax revenue boarding house in 2013 and 2015 showed a significant increase was 0,03%, 0,26%, dan 0,55%. The increased in the contribution was still very less because less than 10%. Dispenda Kota Malang should renew taxpayer data that has been registered and the people who have business with reviewing the boarding house directly into the field. So that it complies with the actual situation. The public were expected to have a high awareness of the importance of tax to provide data and information that was correct.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang”, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Ibu Prof. Dr. Dra. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis
3. Bapak Dr. Drs. Kadarisman Hidayat, M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., M.AB., selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing, atas segala kesabaran dalam membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Achmad Husaini, M.AB., selaku Dosen Pembimbing 1, atas segala kesabaran dalam membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ir. H Ade Herawanto, MT selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Ibu Sriyoni Yudowati selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, serta seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk skripsi ini dan bantuan yang diberikan kepada peneliti selama melaksanakan penelitian.
7. Bapak Joko Susilo, selaku pemilik usaha rumah kos yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk skripsi ini dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
8. Suami tercinta Muhammad Nur Rahmat yang memberikan dukungan dan motivasi sangat berharga.
9. Kedua orang tua Alm. Khusnu Tadji dan Jumiana, kedua mertua Imron dan Umu Zumrotus Sholihah, kakak-kakakku Ahmad Fatria Wirawan, Masyita Oktaviana, Salus Yustian, Yulia Rahmawati, adikkku Nurul Fajar, serta kedua keponakan kesayangan Syifa dan Aska yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam pencapaian keberhasilan penulis.
10. Sahabat selama masa kuliah Maya Adriani dan Febria Puspita serta seluruh teman-teman mahasiswa perpajakan yang memberikan dukungan dan masukan bermanfaat kepada penulis.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan atas segala dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kebijakan Pajak.....	17
1. Pajak.....	17
2. Pengertian Kebijakan Fiskal (Pajak).....	18
3. Tujuan Kebijakan Fiskal.....	19
4. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal.....	19
5. Fungsi Pajak.....	19
6. Pengelompokan Pajak.....	20
7. Asas Pemungutan Pajak.....	21

8. Sistem Pemungutan Pajak.....	21
C. Implementasi Kebijakan.....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
2. Model Implementasi Kebijakan.....	24
D. Efektivitas Kebijakan.....	25
1. Efektivitas.....	25
2. Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak.....	26
E. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010.....	28
F. Pajak atas Rumah Kos.....	29
1. Pajak Daerah.....	29
2. Pengertian Pajak atas Rumah Kos.....	29
3. Objek dan Subjek.....	30
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif pengenaan pajak	30
5. Masa Pajak.....	31
6. Kontribusi Pajak atas Rumah Kos terhadap Pajak	
Daerah	31
G. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	43
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota	
Malang.....	45

3. Gambaran Umum Pajak Rumah Kos.....	58
B. Penyajian Data.....	60
1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos.	60
2. Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.	68
3. Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013-2015.....	71
4. Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2013-2015.....	72
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	73
1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos.	73
2. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2013-2015.....	97
3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak.....	101
1. Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013-2015.....	101
2. Pajak Rumah Kos Terhadap Pajak daerah Tahun Anggaran 2013-2015.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112
Daftar Pustaka.....	113

DAFTAR TABEL

1. Tabel Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	14
2. Tabel Definisi Efektivitas.....	25
3. Tabel Kriteria Nilai Efektivitas.....	28
4. Tabel Kriteria Nilai Kontribusi.....	32
5. Tabel Kriteria Nilai Efektivitas.....	41
6. Tabel Kriteria Nilai Kontribusi.....	42
7. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	69
8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013- 2015.....	72
9. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2013-2015.....	73
10. Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	97
11. Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Hotel Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	101
12. Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015.....	105

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	33
2. Model Grindle.....	40
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.....	52
4. Derajat Perubahan.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	115
2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013.....	116
3. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014.....	118
4. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015.....	121
5. Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Tahun 2014.....	123
6. Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos Tahun 2015.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1). Sebagai Negara kesatuan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 13.487 pulau. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 18). Sampai saat ini Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang membentang dari sabang sampai merauke dengan luas daratan hingga 1.904.569 km². Indonesia adalah negara yang memiliki populasi padat dan wilayah daratan perairan yang luas, selain itu Indonesia juga memiliki wilayah alam yang mendukung besarnya tingkat keanekaragaman hayati dan melimpahnya sumberdaya alam. Sumber daya alam di Indonesia didominasi dengan kekayaan alam yang berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak. Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia merupakan salah satu dari sumber penerimaan negara.

Sumber penerimaan negara merupakan sumber pendapatan negara yang menjadi nilai kekayaan pemerintah yang selanjutnya digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan. Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia serta pendapatan negara keseluruhannya dikuasai oleh negara. Dari penerimaan yang

didapatkan oleh negara, negara akan mampu membiayai keperluan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan serta menjalankan tujuan-tujuan bangsa Indonesia sesuai yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara bertanggungjawab mengelola kekayaan alam Indonesia dan pendapatan negara yang kemudian akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sangat erat kaitannya dengan perekonomian yang ada di suatu negara. Di Indonesia, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 33). Hal-hal sedemikian merupakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari pemerintahan di Indonesia.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan adanya pembagian tugas di dalam pemerintahan yaitu dengan pelimpahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan yang ada di

daerahnya. Hal tersebut memungkinkan pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1).

Pemerintah daerah dapat mengatur sistem pemerintahan yang menjadi kewenangan di daerahnya dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adapun dalam pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan daerah sendiri selain bersumber dari pendanaan pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
2. pendapatan transfer; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan otonomi daerah dalam urusan pemerintah daerahnya. Untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah Kota Malang berhak membuat wewenang dan peraturan untuk mengatur daerahnya. Di dalam pelaksanaan dan pengelolaan urusan pemerintahan, pemerintah Kota Malang akan memerlukan pendanaan dalam rangka menjalankan pemerintahan. Sumber dana yang diperoleh

oleh pemerintah Kota Malang dapat bersumber dari pendanaan pemerintah pusat maupun pendapatan daerah Kota Malang sendiri. Penerimaan hasil pajak di Kota Malang merupakan hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah.

Selain ke-7 (tujuh) pemungutan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Malang Nomor 16 Tahun 2010 diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang diatur di dalam Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur di dalam Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2010.

Upaya pemerintah Kota Malang dalam melakukan pemungutan terhadap pajak daerah akan berdampak kepada pendapatan Kota Malang. Hal ini terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pajak Daerah di Kota Malang. Implementasi kebijakan yang baik dapat dilihat dengan adanya kerjasama yang baik antara individu serta kelompok masyarakat yang dapat bersama-sama menerapkan peraturan atau kebijakan yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar usaha yang dilakukan oleh Dispenda dalam

memunggut pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan daerah Kota Malang yang kemudian akan berdampak positif terhadap pembangunan dan kemajuan di Kota Malang. Diperlukan juga adanya kepatuhan masyarakat Kota Malang sebagai Wajib Pajak untuk dapat mewujudkan pengoptimalan pemunggutan pajak sehingga akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah berupa pendapatan pajak. Keberhasilan dari implementasi kebijakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh daerah khususnya dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dapat ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan yang dapat dinilai dari isi dan konteks kebijakan tersebut. Isi kebijakan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan itu dibuat. Seperti kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang akan dihasilkan, ketepatan sasaran kebijakan, pelaksana program kebijakan dan sumber daya yang dikerahkan untuk dapat menjalankan kebijakan tersebut. Sedangkan hal lainnya adalah dari konteks kebijakan itu sendiri, yaitu yang dapat mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap setiap unsur yang ada di dalam kebijakan (Grindle dalam Dwidjowijoto, 2006).

Dengan keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut diatas akan menimbulkan dampak sangat positif terhadap Kota Malang sendiri khususnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Malang sehingga pendapatan daerah akan mengalami peningkatan. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh Dispenda untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak daerah di Kota

Malang. Pengoptimalan pemungutan pajak didukung oleh keunggulan Kota Malang sendiri. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur.

Malang dikenal dengan keindahan kotanya yang dikelilingi oleh pegunungan serta pengelolaan kotanya yang rapi. Banyak wisatawan menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata baik dari pengunjung domestik maupun wisatawan luar negeri. Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta maupun negeri. Sebagai salah satu kota pendidikan, banyak pelajar yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Pelajar-pelajar ini tidak hanya berasal dari dalam Kota Malang saja, namun juga banyak pelajar yang berasal dari luar Kota Malang. Dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan berbagai dampak terhadap Kota Malang. Salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal sebagai tempat sementara bagi pelajar-pelajar yang berasal dari luar Kota Malang. Hal ini berdampak dengan meningkatnya bisnis rumah kos yang ada di Kota Malang. Banyaknya rumah kos di Kota Malang dapat memberikan adanya potensi penerimaan pajak dengan melakukan pemungutan atas rumah kos. Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 menetapkan bahwa kepemilikan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) merupakan salah satu objek pajak yang dikategorikan ke dalam Pajak Hotel.

Hal tersebut didasarkan kepada Pasal 4 angka 3 Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 yang berbunyi: “Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan;

- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis”.

Pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang akan memberikan dampak kepada Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang sebagai salah satu komponen di dalam Pendapatan Asli Daerah. Keefektifan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 sangat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak sebagai pendapatan pajak Kota Malang. Efektivitas dari pemungutan pajak atas rumah kos dapat dinilai dari persentase perbandingan antara jumlah penerimaan pajak rumah kos dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Semakin besar persentase yang dihasilkan dari perbandingan tersebut maka kebijakan pemungutan pajak rumah kos dikatakan efektif.

Apabila pemungutan pajak atas rumah kos ini dapat berjalan dengan efektif, maka penerimaan pajak daerah sektor pajak hotel kategori rumah kos akan memberikan kontribusi lebih besar dan penerimaan pajak daerah Kota Malang akan juga dapat meningkat. Kontribusi dari penerimaan pajak atas rumah kos ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai penambah kekayaan daerah.

Dengan potensi yang dimiliki, Kota Malang memiliki peluang yang besar untuk dapat menerima pendapatan pajak atas rumah kos apabila pemungutan yang dilakukan oleh dispenda berjalan secara optimal. Dari data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, masih banyak pengusaha rumah kos yang belum tersentuh oleh pemungutan pajak yang seharusnya. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Dispenda Kota Malang (Djupri) bahwa sampai Februari 2015 pendataan pajak kos masih di satu kecamatan yaitu Lowokwaru. Padahal masih ada empat kecamatan

lain yang belum tersentuh soal pajak kos yang keempat kecamatan tersebut juga memiliki potensi pajak kos cukup besar. “Mulai Februari 2015 ini, kami akan memaksimalkan pendataan pajak kos. Sekarang wajib pajak (WP) kos masih sekitar 400 WP. Padahal pengusaha kos di Kota Malang jumlahnya ribuan” kata Djupri (Hadi, 2015). Empat kecamatan tersebut adalah Kedungkandang, Klojen, Sukun, dan Blimbing.

Dengan adanya fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang masih perlu ditingkatkan baik dari segi implementasi kebijakan maupun keefektifan pemungutan pajak. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 serta efektivitas pajak atas rumah kos sebagai salah satu sumber Pendapatan Pajak Daerah yang nantinya juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Dengan adanya hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Implementasi Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disajikan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Malang?

2. Bagaimana efektivitas pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang?
3. Bagaimana kontribusi pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui efektivitas pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak atas rumah kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan diharapkan dapat berguna bagi berbagai aspek, baik secara akademis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian tersebut meliputi:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menambah pengetahuan, wawasan, atau informasi di bidang perpajakan serta sebagai bahan referensi yang digunakan oleh pihak lain untuk penelitian berikutnya yang mengambil judul dan permasalahan yang sama terkait dengan pajak atas rumah kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan masukan-masukan serta sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berkaitan dengan penerimaan pajak atas rumah kos agar dapat meningkatkan penerimaan sektor PAD.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan akan mampu membahas permasalahan penelitian secara keseluruhan, sistematika pembahasan secara terinci adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori empiris dan teoritis yang melandasi penulisan dan sebagai dasar pembahasan penelitian. Tinjauan pustaka ini meliputi teori yang didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data hingga analisis data

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman dan garis besar penelitian yang merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Friansyah Murandika (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos jika ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah, mengetahui dan menganalisis imlementasi pajak hotel atas rumah kos serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat faktor-faktor yang terdapat dalam pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung yang timbul, yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, sistem komputer yang baik dan sarana serta prasarana yang memadai.
 - b. Faktor penghambat yang timbul, yaitu peraturan yang belum efektif dan tingkat kesadaran pemilik kos yang rendah.

2. Sofia Dwi Yuliani (2015) melakukan penelitian mengenai “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata pertumbuhan jumlah hotel, jumlah restoran, penerimaan pajak hotel restoran, dan pendapatan pajak daerah Kota Malang tahun 2009-2013 berturut-turut 58,53%, 9,55%, 25,73%, dan 50,27% dengan nilai kontribusi pajak hotel restoran terhadap pajak daerah sebesar 21,22%. Upaya yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan pajak hotel restoran dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Mona Ratna Savitri (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak yang memakai indikator dari prinsip *self assessment system* (menghitung, memperhitungkan, membayar dan pelaporan kewajiban pajak) terhadap pemungutan pajak hotel atas rumah kos dimana memakai indikator prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith (prinsip efisiensi, prinsip kenyamanan dalam membayar, prinsip kepastian hukum dan prinsip kesetaraan) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mengenai pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory*

research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode *survey*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos.

4. Irma Afrina Masniari Hutagaol (2015) melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Penerimaan Pajak Hotel di Kota Batu)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan persentase pajak hotel, kontribusi pajak hotel, pajak hotel dan *effectivenees* tingkat pertumbuhan pajak hotel dari pendapatan asli. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel setiap tahun dari 2010-2014 untuk PAD selalu meningkat dan mencapai kategori sangat efektif. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel ke Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun berturut-turut 2010-2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Tabel 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun) dan judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Murandika, Muhammad Friansyah (2014) “Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif	Deskriptif kualitatif	Faktor-faktor yang terdapat dalam pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kota Surabaya, yaitu sebagai berikut:

Lanjutan tabel 1

No	Peneliti (tahun) dan judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)”		<p>1. Faktor pendukung yang timbul, yaitu sumber daya manusia yang berkompeten, sistem komputer yang baik dan sarana serta prasarana yang memadai.</p> <p>2. Faktor penghambat yang timbul,yaitu peraturan yang belum efektif dan tingkat kesadaran pemilik kos yang rendah.</p>
2.	Yuliani,Sofia Dwi (2015) “Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak	Deskriptif kuantitatif	Rata-rata pertumbuhan jumlah hotel, jumlah restoran, penerimaan pajak hotel restoran,dan pendapatan pajak

Lanjutan tabel 1

No	Peneliti (tahun) dan judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”		daerah kota Malang tahun 2009-2013 berturut-turut 58,53%, 9,55%, 25,73%, dan 50,27% dengan nilai kontribusi pajak hotel restoran terhadap pajak daerah sebesar 21,22%. Upaya yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan pajak hotel restoran dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
3.	Savitri, Mona Ratna (2015) “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak	Penjelasan kuantitatif	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos.

Lanjutan tabel 1

No	Peneliti (tahun) dan judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
	Terdftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”		
4.	Hutagaol, Irma Afrina (2015) “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Penerimaan Pajak Hotel di Kota Batu)”. .	Deskriptif kuantitatif	Efektivitas penerimaan pajak hotel setiap tahun dari 2010-2014 untuk PAD selalu meningkat dan mencapai kategori sangat efektif. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel ke Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun berturut- turut 2010-2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Sumber: Data diolah

B. Kebijakan Pajak

1. Pajak

Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1997:1). Definisi lain mengenai pajak yaitu iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Waluyo, 2013:2).

2. Pengertian Kebijakan Fiskal (Pajak)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja Negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah (Rahayu, 2010:1).

3. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Tujuan dari kebijakan fiskal menurut John F. Due, yaitu:

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi (Rahayu, 2010:2).

4. Jenis-jenis Kebijakan Fiskal (Pajak)

Pada dasarnya, jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*expansionary fiscal policy*)
Kebijakan ini menaikkan belanja Negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Suatu kebijakan dengan menurunkan belanja Negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi (Rahayu, 2010:6).

5. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak

seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

b. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penghasilan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanam modalnya di Indonesia (Resmi, 2005:2).

6. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemunggutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipunggut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipunggut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

7. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih dipergunakan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.
- b. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh: pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.
- d. *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak (Waluyo, 2013:13).

8. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat Pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak bersifat Aktif
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajakyang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implemetasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan. Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses

untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang saksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli diatas, Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Mazmanian dan Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*). Dari pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier diatas terlihat pula bahwa antara apa yang disebut sebagai perumusan kebijaksanaan dan implementasi kebijaksanaan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, sekalipun mungkin secara analitis, bisa saja dibedakan (Wahab, 2008:64).

2. Model-model Implementasi Kebijakan

- a. Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang dikembangkan oleh Matland (dikutip deLeon dan deLeon, 2001:485)
Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemeritahan. Kebijakan disini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Dikemukakan deLeon dan deLeon (2001:487) bahwa pendekatan Matland mempunyai keunggulan sehingga setiap kebijakan perlu diimplementasikan dan, bahkan dipertanggungjawabkan, dalam konteks tingkat ambiguitas dan tingkat konfliknya.
- b. Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975)
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:
 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
 2. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor.
 3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
 4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor.
- c. Model Merilee S. Grindle (1980)
Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:
 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 3. Derajat perubahan yang diinginkan.

4. Ketepatan sasaran kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap (Dwidjowijoto, 2006:125).

D. Efektivitas Kebijakan

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda (Westra dalam Adisasmita, 2014:170).

Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (Susilo dalam Adisasmita, 2014:170).

Tabel 2 Definisi Efektivitas

Pendekatan	Definisi (suatu organisasi disebut efektif apabila...)	Kapan Digunakan (pendekatan ini diambil apabila...)
<i>Goal-attainment</i>	Mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan	Tujuan-tujuan organisasi jelas, memiliki kerangka waktu (<i>time bound</i>), dan terukur

Pendekatan	Definisi (suatu organisasi disebut efektif apabila...)	Kapan Digunakan (pendekatan ini diambil apabila...)
<i>Systems</i>	Mampu memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan	Antara input dan output terdapat hubungan yang jelas
<i>Strategic-Constituency</i>	Semua <i>Strategic-Constituencies</i> minimal merasa terpuaskan	Konstituen memiliki pengaruh besar terhadap organisasi
<i>Competing Value</i>	Titik berat organisasi dalam empat area pengukuran utama sesuai atau cocok dengan prefensi konstituen	Organisasi tidak mengetahui secara jelas titik beratnya, atau terjadi perubahan kriteria dari waktu ke waktu

Sumber: Robbins dalam Kusdi,2011:93

2. Efektivitas Kebijakan Pemungutan Pajak

Tidak semua potensi yang menjadi sumber pendapatan Pemerintahan Daerah dapat langsung dikenai pajak daerah. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan itu agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah. Kriteria pajak daerah ini menjadi penting berkaitan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian pembiayaan daerah. Hal ini diperlukan agar proses pungutan atau administrasi

atau penetapan tarif terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah.

Suatu pemungutan pajak dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kriteria-kriteria yang meliputi:

- a. Kecukupan dan elastisitas
Persyaratan pertama sumber pendapatan yang dapat dipajaki adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Kalau biaya pelayanan meningkat maka pendapatannya juga meningkat. Keadaan demikian sangat diharapkan, karena pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.
- b. Pemerataan/Keadilan
Kriteria ini merupakan konsep keadilan sosial yang secara luas dianut oleh hampir semua pemerintahan, namun dalam praktek tidak selalu dilaksanakan. Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Konsep ini memandang pajak merupakan suatu alat redistribusi pendapatan, golongan kaya menyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang diterimanya, sebaliknya golongan miskin nilai pelayanan yang ia peroleh lebih besar dibanding sumbangan yang ia berikan.
- c. Kemampuan Administratif
- d. Penerimaan/Kesepakatan Politis
Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Pada semua pajak terlihat kemauan politis. Peranannya tergantung pada frekuensi dari keputusan yang bersifat sensitif tersebut harus diambil. Keputusan yang sangat sulit dan nyata biasanya menyangkut kenaikan tarif. Pajak dan retribusi akan mudah dipolitisasi kalau menghendaki penyesuaian tarif untuk menjaga dan menambah nilai riilnya. Kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam rangka meningkatkan tarif pajak yang tinggi dapat memaksa instansi Pemerintah lebih teliti terhadap pertimbangan untuk pengeluaran tertentu atau mengurangi pemborosan.
- e. Kecocokan Suatu Pajak (Davey dalam Prakosa, 2003:13).

Efektivitas yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak} \times 100\%}{\text{Target penerimaan pajak}}$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Nilai Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80 – 90%	Cukup Efektif
4	70 – 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

E. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada sektor pajak. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, maka perluasan kewenangan perpajakan bagi daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, maka diperlukan pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai instrument dan sarana mengoptimalkan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah (penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010).

F. Pajak atas Rumah Kos

1. Pajak Daerah

Ketentuan mengenai Pajak daerah telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang kewenangan pemungutannya dalam wilayah kekuasaan pemerintahan daerah (Mono, 2012:15). Definisi lain mengenai Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2014:229).

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah.

2. Pengertian Pajak atas Rumah Kos

Pajak atas rumah kos merupakan salah satu pengenaan pajak yang merupakan bagian dari objek pajak hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal ini telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 4 yang menyebutkan “Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. motel;
- b. losmen;

- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis”.

Berdasarkan peraturan yang diatur oleh Pemerintah Kota Malang di atas, objek pajak rumah kos yang dikenakan pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3. Objek dan Subjek Pajak

Pajak yang dikenakan atas rumah kos merupakan bagian dari Pajak Hotel, sehingga objek dan subjek pajak atas rumah kos merupakan bagian dari objek dan subjek Pajak Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel (rumah kos). Tarif pajak atas rumah kos yang ditetapkan adalah sebesar 10% (lima persen). Besarnya pokok Pajak Hotel (rumah kos) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Masa Pajak

Masa Pajak Hotel (rumah kos) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

- Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
- SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel (rumah kos) atau sejak diterbitkan SPTPD.

6. Kontribusi Pajak atas Rumah Kos Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi pajak atas rumah kos terhadap pajak daerah merupakan seberapa besar tingkat kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Malang. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi adalah sebagai berikut (Daud dalam Sripadita, 2014:30):

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

Ps :Kontribusi penerimaan Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Xn : Jumlah realisasi penerimaan Pajak atas Rumah Kos (rupiah)

Yn :Jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah (rupiah)

n : Tahun (periode) tertentu

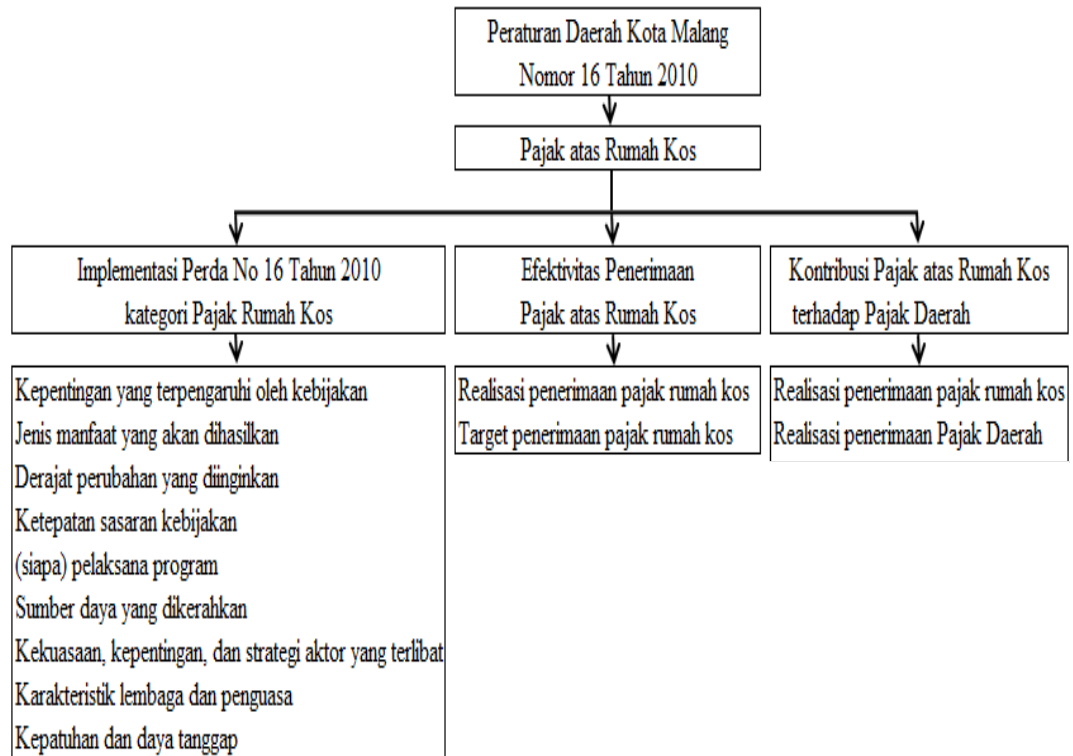
Semakin besar penerimaan pajak atas rumah kos di Kota Malang maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang, sebaliknya apabila penerimaan dari pajak atas rumah kos ternyata masih dirasa belum cukup atau belum optimal maka harus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak atas rumah kos sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Selanjutnya, kontribusi penerimaan Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM yang disusun dalam tabel berikut ini (Sripadita, 2014:44):

Tabel 4 Kriteria Nilai Kontribusi

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	Rasio 0 – 10,00	Sangat Kurang
2	Rasio 10,00 – 20,00	Kurang
3	Rasio 20,00 – 30,00	Cukup
4	Rasio 30,00 – 40,00	Sedang
5	Rasio 40,00 – 50,00	Baik
6	Rasio > 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Sripadita

G. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yang telah ditentukan, maka peneliti dalam melakukan penelitian akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif (Narbuko dan Ahmadi, 2007:44).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nawawi dan Martini dalam Kasiram, 2010:175).

Di dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan hasil dari olah data yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 serta efektivitas pajak atas rumah kos sebagai salah satu sumber Pendapatan Pajak Daerah yang nantinya juga memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan (Kasiram, 2010:196). Fokus penelitian dibuat oleh

penulis agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah dan bahasan penelitian tidak meluas sehingga penelitian akan terfokus pada objek penelitian. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data-data yang diperlukan sebagai sumber penelitian dan memberikan batasan permasalahan yang akan diteliti serta diharapkan penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Adapun yang menjadi fokus penelitian yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan pemungutan pajak rumah kos
 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
 3. Derajat perubahan yang diinginkan
 4. Ketepatan sasaran kebijakan
 5. (siapa) pelaksana program
 6. Sumber daya yang dikerahkan
 7. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 8. Karakteristik lembaga dan penguasa
 9. Kepatuhan dan daya tanggap
2. Efektivitas pemungutan pajak atas rumah kos
 1. Realisasi penerimaan pajak rumah kos
 2. Target penerimaan pajak rumah kos
3. Kontribusi penerimaan pajak atas rumah kos
 1. Realisasi penerimaan pajak rumah kos
 2. Realisasi penerimaan Pajak Daerah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Malang. Adapun situs penelitian yang merupakan tempat peneliti dapat memperoleh data dan/atau informasi berkaitan dengan penelitian sesuai dengan tujuan disusunnya penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai unsur pelaksana tugas di Pemerintahan Daerah Kota Malang yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam hal penerimaan pajak di Kota Malang. Penentuan lokasi dan situs penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dengan melalui beberapa pertimbangan, yaitu Kota Malang merupakan salah satu Kota yang telah menetapkan pemunggutan Pajak atas Rumah Kos dengan melalui adanya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang No 16 Tahun 2010. Selain itu Kota Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan karena banyak terdapat sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dengan banyaknya jumlah tempat pendidikan di Kota Malang ini maka akan berdampak pada banyaknya pelajar yang tinggal di Kota Malang. Pelajar-pelajar ini tidak hanya berasal dari dalam Kota Malang namun juga banyak yang berasal dari luar daerah Kota Malang. Dengan adanya hal ini maka keberadaan tempat tinggal sementara akan sangat diperlukan oleh banyak pelajar dari luar daerah Kota Malang. Sehingga banyak tempat-tempat kos yang terdapat di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat dikumpulkan langsung dari sumbernya. Sumber ini merupakan informan yang dapat memberikan informasi mendalam serta data yang diperlukan untuk penelitian ini. Data primer dari penelitian ini adalah catatan pribadi yang didapatkan dari narasumber yaitu Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) dan Joko Susilo yang merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki rumah kos di Jalan Pisang Kipas No 2 Kelurahan Jatimulyo.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya (Suryabrata, 2005:39). Data sekunder di dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, penelitian terdahulu, internet, undang-undang, peraturan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari Dispenda Kota Malang berupa target dan realisasi APBD Kota Malang mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara kepada informan yang dianggap paham dan berkompeten serta dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian. Wawancara adalah suatu kegiatan verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (Murandika, 2014:54).

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2012:143).

Bentuk Dokumen:

a. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuan dari studi dokumen pribadi adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian atau situasi nyata yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan situasi sosial yang melingkupinya dan bagaimana subjek mengartikan kejadian dan situasi tersebut.

b. Dokumen resmi

Dokumen resmi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial,

seperti majalah, koran, bulletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Moleong dalam Herdiansyah, 2012:143).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang nantinya akan memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman yang disusun oleh peneliti dengan tujuan sebagai panduan peneliti dalam melaksanakan proses wawancara sehingga akan memudahkan peneliti dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat berdasarkan topik penelitian. Narasumber penelitian adalah Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

2. Buku Catatan

Buku catatan adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk menulis serta mencatat segala informasi yang telah diterima yang nantinya dapat dikembangkan dengan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisa Data

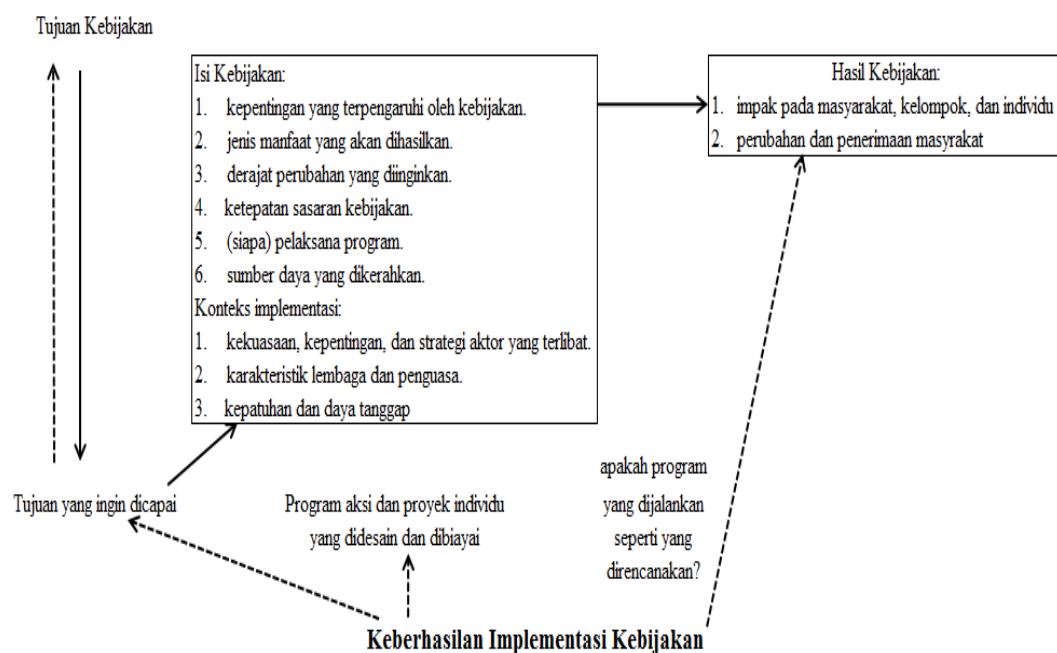
Data yang telah diperoleh kemudian akan di analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif akan menjelaskan dengan memberikan gambaran umum dan

deskripsi mengenai hasil olahan data yang telah diperoleh sesuai dengan keadaan nyata pada saat dilakukannya penelitian.

1. Implementasi pajak atas Rumah Kos sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010

Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden) (Wahab, 2008:64). Dalam menentukan Keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 dapat menggunakan Model Grindle yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Gambar 2 Model Grindle



Sumber: Dwidjowijoto, 2006:125

2. Analisis Efektivitas

Dengan menggunakan analisis efektivitas maka akan dapat diukur seberapa besar realisasi penerimaan pajak atas rumah kos dapat mencapai target yang ditentukan. Untuk menentukan tingkat efektivitas

ini dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sripadita, 2014:44):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 5 Tabel Kriteria Nilai Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80 – 90%	Cukup Efektif
4	70 – 80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

3. Analisis Kontribusi

Melalui analisis kontribusi maka akan dapat diketahui besarnya kontribusi dari penerimaan pajak atas rumah kos terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang. Analisis kontribusi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sripadita, 2014:44):

$$Ps = \frac{Xn}{Yn} \times 100\%$$

Keterangan:

Ps :Kontribusi penerimaan Pajak atas Rumah Kos terhadap
Penerimaan Pajak Daerah

X_n : Jumlah realisasi penerimaan Pajak atas Rumah Kos (rupiah)

Y_n :Jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah (rupiah)

n : Tahun (periode) tertentu

Semakin besar penerimaan pajak atas rumah kos di Kota Malang maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang, sebaliknya apabila penerimaan dari pajak atas rumah kos ternyata masih dirasa belum cukup atau belum optimal maka harus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak atas rumah kos sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Selanjutnya, kontribusi penerimaan Pajak atas Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM yang disusun dalam tabel berikut ini (Sripadita, 2014:44):

Tabel 6 Kriteria Nilai Kontribusi

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1	Rasio 0 – 10,00	Sangat Kurang
2	Rasio 10,00 – 20,00	Kurang
3	Rasio 20,00 – 30,00	Cukup
4	Rasio 30,00 – 40,00	Sedang
5	Rasio 40,00 – 50,00	Baik
6	Rasio > 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Sripadita

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Umum Kota Malang

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas fondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan. Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal usul nama "Malang". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal usul nama Malang tersebut.

Malangkuçeçwara (baca: Malangkusheshwara) yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun demikian

dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkuçeçwara itu, para ahli sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-halangi” (dalam bahasa Jawa berarti Malang). Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

b. Kondisi Geografis

Kota Malang adalah daerah otonom yang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan pariwisata karena keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan. Letak kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec Singosari dan Kec Karangploso, Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Kota Malang juga dikelilingi beberapa pegunungan besar, di antaranya adalah pegunungan Bromo-Tengger (berkisar 2.700 m dpl); Gunung Semeru (3.676 m dpl); Gunung Arjuno (3.339 m dpl); Gunung Butak (2.868 m dpl); Gunung Kawi (2.551 m dpl); Gunung Anjasmoro (2.277 m dpl); serta Gunung Panderman (2.045 m dpl). Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, kota Malang juga dilalui salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas yang mata airnya terletak di lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

a. Sejarah Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang
2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malangh menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

1. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah Menciptakan kinerja yang optimal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

2. Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
3. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
4. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
5. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
6. Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
7. Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
8. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
9. Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

10. Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
11. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
12. Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
14. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
16. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
19. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
20. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

21. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
25. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
26. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Penyusunan Program;
 2. Sub bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Umum.
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
 2. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
 3. Seksi Pengolahan Data.
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari :

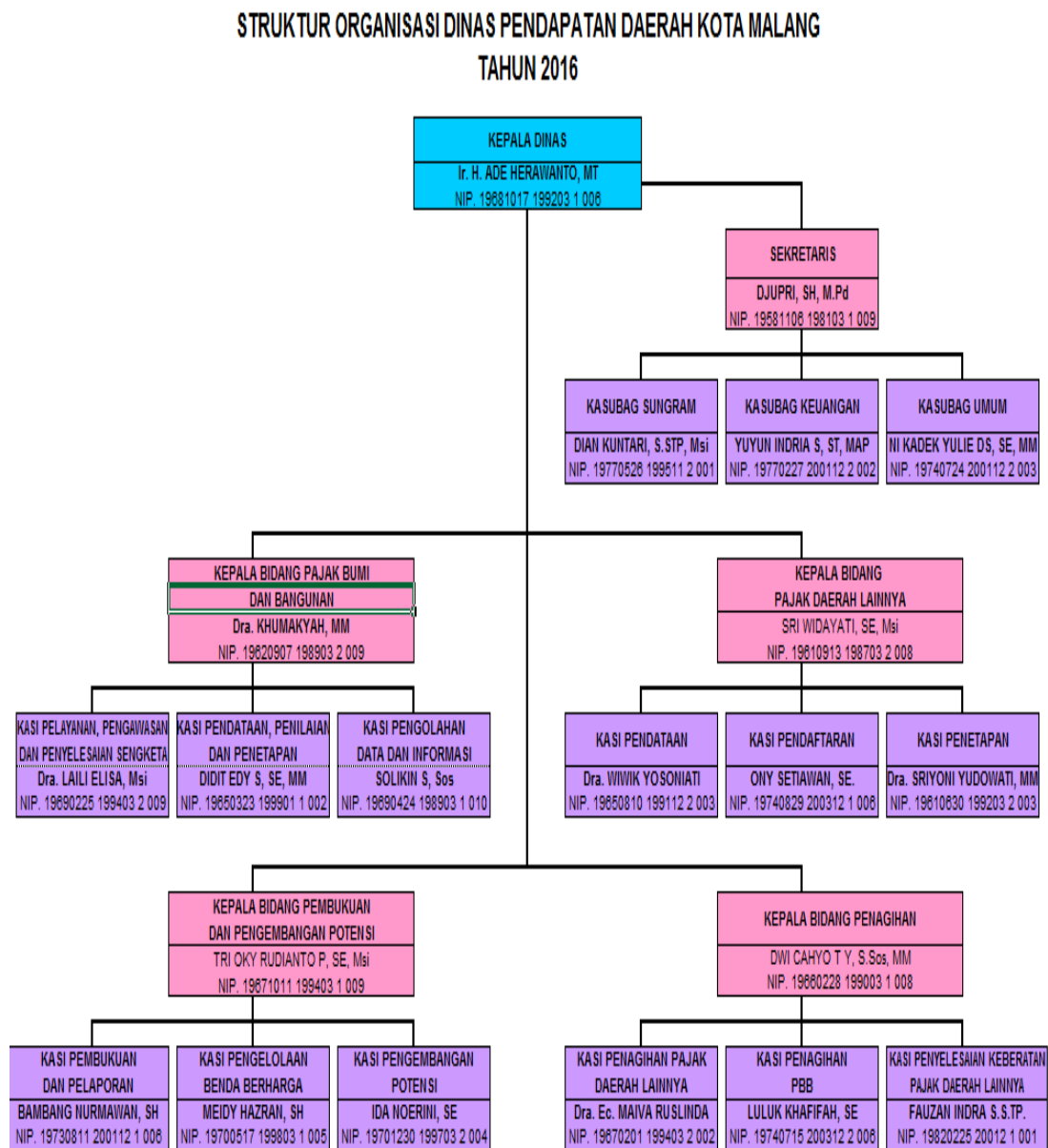
1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pendaftaran;
3. Seksi Penetapan.
5. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Pengelolaan Benda Berharga;
 3. Seksi Pengembangan Potensi.
6. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya.
7. UPT;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian dari tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi yang ada adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas menkoordinasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (data yang diolah tahun 2016)

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan. Adapun fungsi yang dimiliki sekretaris sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
4. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).
5. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
6. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan.
7. Pengelolaan urusan rumah tangga.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu :

1. Sub bagian Penyusunan program, sub bagian ini memiliki tugas pokok menyusun program, evaluasi serta pelaporan.
2. Sub bagian keuangan, bertugas dalam pengelolaan anggaran dan administrasi.
3. Sub bagian umum, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.
4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang ini bertugas dalam pelayanan, pendataan, penilaian dan penetapan serta pengawasan PBB. Adapun fungsi yang dimiliki bidang pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak bumi dan bangunan.
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, penilaian dan penetapan objek, subjek dan wajib PBB Perkotaan dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan.
4. Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB Perkotaan.
5. Pelaksanaan pemeriksaan objek, subjek dan wajib PBB Perkotaan.

Bidang pajak bumi dan bangunan membawahi 3 seksi yaitu :

1. Sie pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa, bertugas menyelenggarakan pelayanan, pengawasan serta penyelesaian yang berkaitan dengan sengketa PBB Perkotaan di kota Malang.
2. Sie pendataan, penilaian dan penetapan, mempunyai tugas pokok yaitu penyelenggaraan pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan wajib PBB Perkotaan di kota malang.
3. Seksi pengolahan data, bertugas melakukan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan pendataan objek, subyek dan wajib PBB Perkotaan, dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.

4. Bidang pajak daerah lainnya

Bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok pelayanan, pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan pajak daerah lainnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh bidang pajak daerah lainnya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang BPHTB dan pajak daerah lainnya.
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya
4. Pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya.
5. Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
6. Perumusan teknis perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya.
7. Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan pajak daerah lainnya.
8. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pengenaan BPHTB.

Bidang pajak daerah lainnya membawahi 3 seksi yaitu:

1. Seksi pendataan, memiliki tugas mendata obyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
2. Seksi pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
3. Seksi penetapan melaksanakan tugas pokok perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya.
4. Bidang pembukuan dan pengembangan potensi

Bidang pembukuan dan pengembangan potensi bertugas melakukan pembukuan dan pelaporan pengelolaan benda berharga dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh bidang pembukuan dan pengembangan potensi ialah :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembukuan dan pengembangan potensi.
2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
3. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembukuan dan pengembangan potensi.
4. Pengumpulan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.
5. Pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya

Bidang pembukuan dan pengembangan potensi membawahi 3 seksi yaitu :

1. Seksi pembukuan dan pelaporan, memiliki tugas membuat pembukuan dan pelaporan target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.
2. Sie Pengelolaan benda berharga, memiliki tugas dalam pengelolaan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.
3. Seksi pengembangan potensi melakukan tugas pokok pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

4. Bidang penagihan

Bidang penagihan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penagihan PBB Perkotaan dan pajak daerah lainnya di kota malang. Fungsi yang dimiliki bidang penagihan diantaranya :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan.
2. Pelaksanaan penagihan PBB Perkotaan dan pajak daerah lainnya.
3. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya.
4. Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Bidang penagihan dibagi menjadi 3 seksi yaitu:

1. Seksi penagihan pajak bumi dan bangunan bertugas melakukan penagihan atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
2. Seksi pengihan pajak daerah lainnya mempunyai tugas melakukan penagihan atas tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya.

3. Seksi penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok yaitu menyelesaikan keberatan atas BPHTB dan pajak daerah lainnya.

3. Gambaran Umum Pajak Rumah Kos

Sebagai salah satu kota pendidikan, banyak pelajar yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Pelajar-pelajar ini tidak hanya berasal dari dalam Kota Malang saja, namun juga banyak pelajar yang berasal dari luar Kota Malang. Dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan berbagai dampak terhadap Kota Malang. Salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal sebagai tempat sementara bagi pelajar-pelajar yang berasal dari luar Kota Malang. Hal ini berdampak dengan meningkatnya bisnis rumah kos yang ada di Kota Malang. Banyaknya rumah kos di Kota Malang dapat memberikan adanya potensi penerimaan pajak dengan melakukan pemungutan atas rumah kos. Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 menetapkan bahwa kepemilikan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) merupakan salah satu objek pajak yang dikategorikan ke dalam Pajak Hotel. Hal tersebut didasarkan kepada Pasal 4 angka 3 Peraturan Daerah Kota Malang No 16 tahun 2010 yang berbunyi: “Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis”.

Pemungutan pajak atas rumah kos di Kota Malang akan memberikan dampak kepada Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang sebagai salah satu komponen di dalam Pendapatan Asli Daerah. Keefektifan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 sangat mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak sebagai pendapatan pajak Kota Malang. Efektivitas dari pemungutan pajak atas rumah kos dapat dinilai dari persentase perbandingan antara jumlah penerimaan pajak rumah kos dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Semakin besar persentase yang dihasilkan dari perbandingan tersebut maka kebijakan pemungutan pajak rumah kos dikatakan efektif.

Apabila pemungutan pajak atas rumah kos ini dapat berjalan dengan efektif, maka penerimaan pajak daerah sektor pajak hotel kategori rumah kos akan memberikan kontribusi lebih besar dan PAD Kota Malang akan juga dapat meningkat. Kontribusi dari penerimaan pajak atas rumah kos ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai penambah kekayaan daerah. Dengan potensi yang dimiliki, Kota Malang memiliki peluang yang besar untuk dapat menerima pendapatan pajak atas rumah kos apabila pemungutan yang dilakukan oleh dispenda berjalan secara optimal.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos

a. Isi kebijakan pemungutan pajak rumah kos

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Pemerintah Kota Malang merupakan daerah otonom yang diberikan kekuasaan oleh Pemerintah pusat untuk dapat menyelenggarakan kebijakan di daerahnya sendiri. Dengan adanya kewenangan tersebut pemerintah Kota Malang telah membuat dan menetapkan kebijakan salah satunya di bidang perpajakan yang diolah oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan mencakup 11 (sebelas) pajak daerah. Satu diantaranya adalah pajak hotel. Sebagai upaya ekstensifikasi pemungutan pajak hotel di kota malang, pemerintah daerah melakukan pemungutan atas rumah kos di kota Malang. Pemungutan ini dilakukan karena banyaknya usaha rumah kos yang ada di kota Malang, khususnya di daerah dekat kampus di Kota Malang. Pemungutan rumah kos ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Rumah kos yang dilakukan pemungutan adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Namun pemungutan pajak secara efektif baru dilaksanakan pada tahun 2014. Hal ini sesuai dengan penuturan Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

“Seperti yang kamu lihat di Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2010 itu kan kalau kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) itu yang harus dikenakan pajak. Itulah wajib pajak. Pertama itu Undang-undang 28

Tahun 2009 masalah PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2010, sama perwal (Peraturan Walikota). Efektivitas pajak kos mulai tahun 2014, 2013 belum”.

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu wajib pajak rumah kos dalam wawancara penelitian yaitu Joko Susilo, “Ada ya penarikan pajak rumah kos itu 10% mbak tiap tahun harus dibayar. Yang harus bayar itu yang punya kos-kosan lebih dari 10 kamar mbak. Baru-baru ini mbak kenanya. Dulu gak ada itu”.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Pemungutan pajak rumah kos diharapkan mampu menambah jumlah penerimaan pajak daerah yang nantinya juga akan berpengaruh dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah, maka anggaran belanja juga dapat meningkat. Hal ini berarti pemerintah kota Malang dapat melakukan penambahan pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang ada di kota. Namun dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah, seiring pula dengan adanya pembiayaan dalam rangka pemungutan pajak rumah kos. Pengeluaran biaya dari pembiayaan pemungutan merupakan dampak dari upaya pemerintah daerah melakukan pemungutan secara optimal baik dari penambahan jumlah pegawai maupun upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan untuk mengenalkan pajak rumah kos dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemungutan pajak rumah kos yang nantinya akan memberikan manfaat kepada kepentingan

masyarakat sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).

“Manfaat yang diterima dari pemungutan pajak kos bisa untuk membangun kan dek, menambah pembangun dek, menambah PAD yang digunakan Pemda membangun Kota Malang. Selain itu pasti mengeluarkan biaya. Untuk penambahan pegawai iya, melalui *outsourcing*. Karena untuk kos-kosan banyak yang *sepuh-sepuh*. Kan temen-temenmu yang rumahnya bukan di Malang itukan perlu tinggal di kos-kosan, lah mereka harus jemput bola, waktunya bayar pajak”.

Di sisi lainnya, Joko Susilo juga mengungkapkan pendapatnya mengenai manfaat yang diterima dari pemungutan pajak rumah kos dari segi wajib pajak.

“Manfaatnya apa ya mbak. kalau buat kita sih gak berasa ya mbak manfaatnya, atau mungkin belkum berasa kali ya. Kita Cuma bayar. Sebagai warga Negara yang baik kan kita wajib ya mbak bayar pajak. Kalau nanti kemana larinya uang pajak itu gak tahu ya, mungkin ke pembangunan atau mungkin juga ke kantong pribadi gayus ya hahaha. Tapi yang pasti dampaknya pada kita itu kita naikin ya harga per kamar, ya keuntungan jadi berkurang lah mbak. tapi ya gak apa-apa daripada harus *diuber-uber* petugas pajak *sampe* digerebek ke kos itu kan malu juga”

3. Derajat perubahan yang diinginkan.

Setiap dibuat kebijakan baru, tentunya terdapat derajat perubahan yang diharapkan dari adanya implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan pemungutan pajak rumah kos diharapkan dapat memberikan perubahan positif terhadap kehidupan di masyarakat. Dengan tujuan tersebut Dispenda melakukan berbagai cara untuk mewujudkan derajat perubahan yang lebih baik.

“Selain mendatangi dispenda melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh dispenda pertama *tax on mall, tax goes to campus* itu kemarin di UB (Universitas Brawijaya) yang Pak Bisri, *tax go school*, lewat Koran, Malang Pos, Surya, Jawa Pos, itu pasti *ndek* Surya itu pasti, lewat TV, media TV, Malang TV, JTV, Batu TV, terus lewat radio, RRI itu kemarin. Seperti itu sosialisasi yang kita gunakan”.

Derajat perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak kos menurut Joko Susilo, “kita bayar pajak tiap tahun ke pemerintah ya kepengennya nantinya uang yang kita bayar itu memang benar-benar digunakan dengan semestinya untuk kepentingan masyarakat lagi ya mbak, kepentingan orang-orang kayak saya ini. Ya kan kita merasa sudah mengeluarkan uang lebih ya mbak buat pemerintah, jadi kita menuntut juga ke pemerintah kalau ada jalan lubang itu dibenerin, jalan-jalan rusak diperbaiki, jadi kita gak merasa sia-sia”.

4. Ketepatan sasaran kebijakan.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah agar pemungutan pajak rumah kos dapat dipunggut secara optimal nyatanya masih ada pemilik rumah kos yang belum melaksanakan kewajiban pemungutannya. Padahal didalam Undang-undang dan peraturan daerah telah mengatur bahwa kepemilikan kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib untuk membayar pajak rumah kos. Dalam mengatasi hal ini, dispenda selaku pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan RT/RW setempat yang merupakan aparat terdekata rumah kos.

“Ketepatan sasaran pemungutan pajak rumah kos sudah tepat toh. Kalau tercovernya semua wajib pajak masih belum. Karena keterbatasan tenaga. Tenaga kita kan, kita menangani 9 (sembilan) macam pajak seluruh Kota Malang dengan tenaga yang seperti itu terbatas. Budget kita untuk kos-kosan 600-700an. 600 wajib pajak. Untuk wajib pajak kos-kosan kita sudah 600 wajib pajak karena masih banyak yang belum tercover ya dek. Habis itu untuk kosan, belum yang hotel, restoran, belum air tanah, belum parkir, kan banyak dek. Makanya kita masih terus teman-teman mendata mana-mana kos itu. Kan ya kos itu gak sama dengan rumah makan dek. Kalau rumah makan ada tulisan, hotel juga ada tulisan jadi kita langsung *njujuk* ya dek. Tapi kalau kosan kan kayak rumah biasa. Kita gak tahu itu kos atau rumah biasa. Makanya kita kerjasama dengan RT/RW. Pun kadang-kadang RT/RW juga tidak terbuka ya dengan kita. Kita cari sendiri seperti itu. Masih belum optimal kita mndata utk wajib pajak kosan belum optimal. Karena masih terus berkembang. Namanya kosan ya terus berkembang toh dek, ada orang *mbangun* kosan ya terus berkembang, berkembang”.

Ketepatan sasaran pemungutan pajak kos menurut Joko Susilo, “Sasaran pajak kos itu kos-kosan lebih dari 10 kamar ya mbak. kalau saya waktu itu, 2014 ya, rame kan itu sosialisasi pajak kos di tv-tv. Saya daftar sendiri mbak ke petugas pajak, di Kantor Terpadu sana ya”

5. (Siapa) pelaksana program.

Pemungutan pajak rumah kos merupakan pemungutan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Sehingga dalam proses pemungutan, pemilik rumah kos yang merupakan wajib pajak merupakan implementor kebijakan atau pelaksana program pemungutan pajak rumah kos. sedangkan dispenda merupakan dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan fungsi kontrol dan mengawasi proses pemungutan agar berjalan sesuai dan benar. Dispenda dalam melakukan pemungutan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat membantu tugas mereka dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak rumah kos.

“Pelaksana program (implementor) yang menjalankan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos yang ke lapangan *outsourcing* didampingi oleh temen-temen pegawai nanti temen-temen pegawai yang munggut. Kalau mereka dititipi, kalau enggak ya enggak. Mereka wajib membayar sendiri ke Bank Jatim. Kalau pas ngasi SKP “*aku titip sekalian bayarnya*” mereka terima. Kalau gak diititipi ya enggak. Tiap hari ke lapangan, ini kan sepi,. Disamping mereka osgab mereka juga ke lapangan”.

Pelaksana program pemungutan pajak rumah kos menurut Joko Susilo, “Saya dulu daftar daftar sendiri, ngisi data-data itu mbak. jumlah kamar kos, tarif kamarnya, terus dikalikan 10% saya bayar deh itu uangnya”.

6. Sumber daya yang dikerahkan.

Dispenda dalam melakukan pemungutan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat membantu tugas mereka dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak rumah kos.

“Dari SDM adalah pegawai dan *outsourcing*, kendaraan mulai dari sepeda motor mobil dari pemerintah. Kalau motor temen-temen sendiri bawa. Kalau mobil, mobil dinas. Terus apa lagi. *Yowes mek kuwi tok*. Kalau di kantor *yo onok* komputer untuk melihat diinput dimasukkan”.

Sedangkan Joko Susilo sebagai wajib pajak rumah kos yang juga memiliki peranan utama dalam kebijakan ini mengungkapkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, “kalau mau bayar ke bank Jatim ya sumber daya ya apa ya mbak, kendaraan, uang ya yang pasti”.

b. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Berbagai upaya pemerintah daerah agar pemungutan pajak rumah kos berjalan dengan optimal diiringi dengan berbagai strategi dispenda agar pemungutan pajak kos dapat maksimal. Hasil pemungutan pajak rumah kos nantinya juga akan kembali lagi dinikmati oleh masyarakat. Karena seluruh penerimaan pajak akan digunakan sebagai anggaran pembiayaan pembangunan Negara. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pajak sehingga menimbulkan berbagai respon masyarakat khususnya pemilik rumah kos yang merupakan wajib pajak rumah kos.

“Strategi implementasi pemungutan pajak rumah kos agar optimal, dari intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi nanti mereka mengecek lapangan, apakah benar wajib pajak melaporkan sesuai dengan kamar yang laku, kalau enggak sesuai mereka harus dikasi kurang bayar. Kalau ekstensifikasi itu temenn-temen mendata apakah benar rumah kos sudah jadi wajib pajak. Objek kos ini sudah jadi wajib pajak. Kalau belum mereka kita kasi undangan kita kenakan pajak. Itu ekstensifikasi artinya menambah wajib pajak. Kalau intensifikasi cek lapangan betul kah laporan wajib pajak itu sesuai dengan yang dilaporkan artinya sesuai dengan SPTPD. Kalau gak sesuai harus ada kurang bayar”.

Pendapat Joko Susilo sebagai wajib pajak rumah kos, “setahu saya pajak kos itu dibawah kekuasaanya Kota Malang ya mbak, jadi gak sama dengan yang bayar dari gaji tiap bulan itu, kalau gaji itu ke pusat ya, kalau kos ke daerah. Strategi yang dilakukan pemerintah setahu saya ya sosialisasi itu mbak. Di tv-tv sering diberitakan itu. Terus ada juga yang gerebekan mendadak ke rumah kos. kalau ada gerebekan gitu rame mbak”.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan pungutan pajak kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang nantinya manfaat dari pemungutan tersebut akan kembali kepada masyarakat sendiri sendiri sebagai sumber dari pembiayaan pembangunan daerah. Pemungutan pajak merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk kepentingan umum masyarakat sendiri.

“Untuk pemerintah *sih yo*. Semua pajak kan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Kita gak dapat apa-apa. Kita dapat gaji dari pusat, bukan dari itu. Berarti pajak yang untuk masyarakat. Kalau kita digaji, gajinya kita bukan dari pajak, kita gajinya dari pemerintah pusat. Jadi peraturan ini mengedepankan masyarakat. Untuk masyarakat bukan pemerintah, karena pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat”.

Pendapat Joko Susilo mengenai karakteristik lembaga penguasa, “teorinya untuk masyarakat ya, semoga orang-orang yang memiliki wewenang bisa amanah ya sehingga memberikan manfaat ke masyarakat luas”.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Suatu kebijakan baru pasti menimbulkan berbagai respon baik dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan maupun unsur pemerintah sendiri sebagai pengawas jalannya kebijakan. Berbagai respon masyarakat dalam menanggapi adanya pemungutan pajak rumah kos. Terdapat masyarakat yang mengerti dan mendukung pemungutan pajak rumah kos, namun tak sedikit pula yang masih harus diberi pengertian lebih lanjut terkait pemungutan pajak rumah kos.

“Respon pemilik rumah kos macem-macem. Ada yang mereka sadar pajak. Ada yang tidak sadar pajak. Orang Indonesia mana ada

sih yang sadar pajak. Contoh aja kemarin ada pegawai pajak yang dibunuh di Sibolga. Kan ada yang gak sadar pajak. Lah mereka gak sadar nunggak banyak. Jadilah mreka disegel jadi pembunuhan seperti itu. Ada yang sadar pajak. *Oh aku sebagai warga Indonesia yang baik aku bayar pajak.* Tanpa mereka kita undang mereka datang sendiri. *Buk saya punya kos, saya jadi warga negara yang baik saya harus bayar pajak.* Ada yang gak sadar pajak, mereka sudah kita kasi undangan jadi wajib pajak mereka gak mau, akhirnya kena osgab, mereka yang datang langsung kesini karena kena osgab. Di rumahnya dikasi segel. Akhirnya mereka datang sendiri kesini bayar pajak”.

Joko Susilo memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan waib pajak sebagai berikut, “Hahaha kalau ditanya kepatuhan wajib pajak, itu kepatuhan saya dong mbak. Saya ya patuh mbak. Disuruh bayar ya bayar’

2. Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Pemerintah Kota Malang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahunnya. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Malang adalah berasal dari pemungutan pajak daerah. Pemerintah Kota Malang memiliki kewenangan sendiri dalam rangka melakukan pemungutan pajak daerah yang berada di dalam wilayah kotanya. Pemerintah Kota Malang sebagai daerah otonom yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya dapat mengolah sumber-sumber penerimaan daerahnya dalam hal pajak berdasarkan pada Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pada undang-undang tersebut pemerintah Kota Malang menyusun peraturan yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah yang dipunggut di kota Malang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010. Jenis

Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan penerimaan jenis-jenis pajak daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2013-2015:

Tabel 7 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)
2013	Pajak Hotel	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87
	Pajak Restoran	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31
	Pajak Hiburan	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70
	Pajak Reklame	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75
	Pajak Penerangan Jalan	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90
	Pajak Parkir	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00
	Jenis Pajak Daerah	Target Pendapatan	Realisasi

Lanjutan tabel 7

		Pajak Daerah (Rupiah)	Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)
	Pajak Air Tanah	641.130.420,40	694.747.885,20
	BPHTB	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80
	PBB Perkotaan	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04
	Total Pajak Daerah	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57
2014	Pajak Hotel	17.169.937.868,68	25.069.025.889,87
	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	30.473.435.484,90
	Pajak Hiburan	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41
	Pajak Reklame	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52
	Pajak Penerangan Jalan	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27
	Pajak Parkir	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00
	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	819.219.964,44
	BPHTB	100.050.000.000,75	101.525.731.993,94
	PBB Perkotaan	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52
	Total Pajak Daerah	260.000.000.000,00	278.885.157.875,87
2015	Pajak Hotel	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43
	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22
	Pajak Hiburan	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94
	Pajak Reklame	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32
	Pajak Penerangan Jalan	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18

Lanjutan tabel 7

	Target Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	Jenis Pajak Daerah
	Pajak Parkir	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90
	Pajak Air Tanah	749.475.964,90	777.523.080,54
	BPHTB	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23
	PBB Perkotaan	53.869.267.940,29	58.614.789.726,00
	Total Pajak Daerah	272.000.000.000,00	316.814.967.743,76

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016*

3. Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013-2015

Salah satu pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah dengan melakukan pemungutan atas pajak hotel. Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 4 yang menyebutkan “Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. motel;
- b. losmen;
- c. rumah penginapan;
- d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
- e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis”.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan penerimaan pemungutan pajak hotel yang telah dipungut oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2013-2015:

Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)
2013	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87
2014	17.169.937.868,68	25.069.025.889,87
2015	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016*

4. Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2013-2015

Pajak atas rumah kos merupakan salah satu pengenaan pajak yang merupakan bagian dari objek pajak hotel. Hal ini telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 pasal 4 yang menyebutkan “Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), adalah “rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”. Berdasarkan peraturan yang diatur oleh Pemerintah Kota Malang diatas yang objek pajak yang dikenakan pajak adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berikut merupakan tabel yang menjelaskan penerimaan pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang telah dipunggut oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2013-2015:

Tabel 9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rupiah)
2013	64.469.009,15	67.843.000,00
2014	448.636.145,83	733.421.338,00
2015	1.000.000.000,00	1.738.576.832,50

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016*

C. Analisis Data dan Interpretasi Data

1. Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos

Implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan suatu proses mulai dari kebijakan tersebut dibuat hingga pelaksanaan kebijakan tersebut di dalam masyarakat sebagai sasaran kebijakan ini dibuat. Proses implementasi kebijakan terjadi ketika pemerintah daerah yang membuat kebijakan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Dispenda sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak rumah kos (pengawas kebijakan) dan masyarakat dalam hal ini adalah pemilik kos yang memiliki kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) sebagai wajib pajak yang berperan sebagai pelaksana kebijakan yang keduanya diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditargetkan dalam pembuatan kebijakan pemungutan pajak rumah kos. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos bukan hanya menyangkut Dispenda sebagai badan administratif pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengawasi program agar berjalan

baik namun juga melibatkan sasaran kebijakan yaitu masyarakat sendiri sebagai pelaksana kebijakan karena mengingat kebijak yang dibuat adalah pemungutan pajak rumah kos dengan sistem perpajakan yang dianut pemerintah menggunakan *self assessment system* yang menjadikan wajib pajak memiliki peran utama dalam perpajakan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak baik yang diharapkan dari pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos dapat dianalisa dengan menggunakan teori Grindle yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

a. Isi kebijakan pemungutan pajak rumah kos

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah memiliki kepentingan utama yaitu melakukan pemungutan pajak atas kepemilikan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Hal ini sesuai dengan penuturan narasumber Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “Seperti yang kamu lihat di Perda No 16 Tahun 2010 itu kan kalau kamar kos lebih dari 10 itu yang harus dikenakan pajak. Itulah wajib pajak”. Pengertian yang sama juga disampaikan oleh seorang pemilik kos yang merupakan narasumber penelitian yaitu Joko Susilo, “Ada ya penarikan pajak rumah kos itu 10% mbak tiap tahun harus dibayar. Yang harus bayar itu yang punya kos-kosan lebih dari 10 kamar mbak. Baru-baru ini mbak kenanya. Dulu gak ada itu”.

Dari kedua pendapat narasumber yang diperoleh pada saat penelitian yaitu dari sisi pemilik kos sebagai wajib pajak dan petugas pajak yang berperan sebagai pemerintah daerah yang mengawasi jalannya pemungutan, diperoleh jawaban yang serupa bahwa kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan adalah pemungutan kos dengan kepemilikan lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pemungutan pajak ini. Adanya kepentingan untuk melakukan pemungutan pajak atas rumah kos didasari oleh adanya Undang-Undang Pasal 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi pajak yang ada di masing-masing daerahnya sendiri. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Kota Malang melihat adanya potensi yang besar dalam bidang usaha rumah kos yang banyak menjamur di wilayahnya. Hal ini terkait tingginya mobilitas masyarakat yang keluar masuk Kota Malang, baik yang untuk tinggal menetap maupun tinggal sementara sehingga mereka memerlukan adanya tempat tinggal yang dapat menampung keberadaan mereka selama tinggal di Kota Malang.

Adanya fenomena dalam masyarakat ini dilihat baik oleh pengusaha-pengusaha di Kota Malang sehingga sejalan dengan tingginya pertumbuhan usaha rumah kos. Hal ini mendapat respon dari Pemerintah Kota Malang yang melihat tingginya potensi penerimaan pajak dari usaha tersebut. Sehingga dalam peraturan daerah yang dibuatnya yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010

Tentang Pajak Daerah diaturlah mengenai pemungutan pajak atas kepemilikan rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak didefinisikan sebagai kepentingan Negara sedangkan dengan adanya otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang selanjutnya berada dibawah kepentingan pemerintah daerah. Pemungutan pajak dalam hal ini adalah pemungutan pajak rumah kos diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak dan PAD di Kota Malang. Dengan adanya kepentingan yang utama tersebut maka dibentuklah peraturan pemungutan pajak rumah kos sebagai upaya ekstensifikasi dari pajak hotel di kota Malang. Berdasarkan definisi diatas dapat dikelompokkan kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan menjadi sebagai berikut:

1. Negara/ Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah/Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Rakyat

Bagian dari suatu Negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan.

4. Subjek pajak

a. Orang pribadi

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Wajib Pajak meliputi

a. Pembayar pajak

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

b. Pemungut pajak

Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Malang memberikan kewenangan pemungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Manfaat yang diterima dari kebijakan pemungutan pajak rumah kos menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “Bisa untuk membangun kan dek, menambah pembangunan dek, menambah PAD yang digunakan Pemda membangun Kota Malang”. Di sisi lainnya, Joko Susilo mengungkapkan pendapatnya mengenai manfaat yang diterima dari pemungutan pajak rumah kos dari segi wajib pajak, “Manfaatnya apa ya mbak, kalau buat kita sih gak berasa ya mbak manfaatnya, atau mungkin belum berasa kali ya. Mungkin ke pembangunan atau mungkin juga ke kantong pribadi gayus ya hahaha.

Manfaat yang diharapkan dari adanya kebijakan pemungutan pajak rumah kos selain dari segi penerimaan pajak adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaat yang

dihasilkan dari pemungutan pajak. Adanya kedua pendapat yang diperoleh pada saat penelitian menunjukan terdapat persamaan pemikiran bahwa pemungutan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang nanti hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat sendiri yang merupakan sumber pemungutan sebagai pendapatan Negara untuk membiayai program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berupa pembangunan infrastuktur, pembiayaan kesehatan, pendidikan, belanja pegawai dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Namun terdapat indikasi pesimistik dari sisi masyarakat yaitu tercermin dari pendapat narasumber Joko Susilo selaku pemilik kos sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam pemungutan pajak atas rumah kos. Dalam wawancaranya, Joko Susilo mengatakan bahwa terdapat keraguan dalam masyarakat kemanakah perginya uang-uang yang telah meraka bayarkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam pendapatnya tersirat adanya kecurigaan masyarakat bahwa hasil pemungutan pajak bisa saja disalahgunakan oleh petugas pajak dan pemerintah yang berwenang didalamnya. Diluar dari pendapat tersebut, teori mengenai manfaat hasil pajak yang telah dipungut harus dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan definisi pajak yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan.

Selain adanya peningkatan penerimaan pajak daerah dari pajak rumah kos, Pemerintah Kota Malang juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk pembiayaan pemungutan pajak rumah kos seperti misalnya pengadaan pegawai dan biaya pengadaan sosialisasi pemungutan pajak rumah kos sebagai salah satu upaya pemerintah daerah Kota Malang untuk pengoptimalan pemungutan pajak. ““Kalau penambahan pegawai iya, melalui *outsourcing*. Sosialisasi yang dilakukan oleh dispenda pertama *tax on mall, tax goes to campus* itu kemarin di UB (Universitas Brawijaya) yang Pak Bisri, *tax go school*, lewat Koran, Malang Pos, Surya, Jawa Pos, itu pasti *ndek* Surya itu pasti, lewat TV, media TV, Malang TV, JTV, Batu TV, terus lewat radio, RRI itu kemarin. Seperti itu sosialisasi yang kita gunakan”. Derajat perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah wajib pajak kos menurut Joko Susilo, “kita bayar pajak tiap tahun ke pemerintah ya kepengennya nantinya uang yang kita bayar itu memang benar-benar digunakan dengan semestinya untuk kepentingan masyarakat lagi ya mbak, kepentingan orang-orang kayak saya ini. Ya kan kita merasa sudah mengeluarkan uang lebih ya mbak buat pemerintah, jadi kita menuntut juga ke pemerintah kalau ada jalan lubang itu dibenerin, jalan-jalan rusak diperbaiki, jadi kita gak merasa sia-sia”.

Perubahan yang diharapkan dari adanya kebijakan pemungutan pajak rumah kos selain dari segi penerimaan pajak adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan manfaat yang dihasilkan dari pemungutan pajak. Semakin besar penerimaan pajak atas rumah kos di Kota Malang maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, sebaliknya apabila penerimaan dari pajak atas rumah kos ternyata masih dirasa belum cukup atau belum optimal maka harus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak atas rumah kos sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

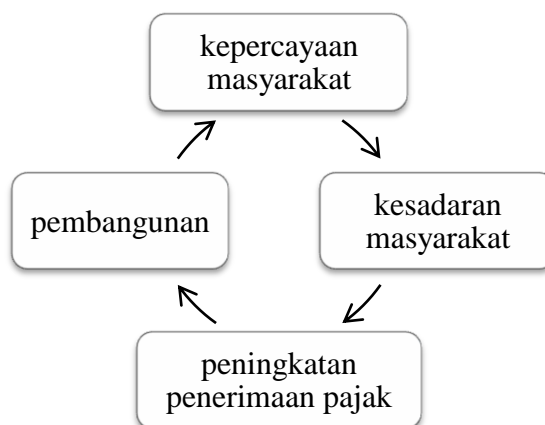
Dari pendapat nasumber diperoleh informasi bahwa derajat perubahan yang telah terjadi dengan adanya kebijakan pemungutan pajak rumah kos ini adalah adanya peningkatan penerimaan sektor pajak daerah khususnya pajak rumah kos dan beriringan dengan peningkatan pengeluaran sebagai pembiayaan dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak rumah kos. Pengeluaran itu berupa adanya penambahan pegawai yang diadakan dengan cara *outsourcing* yang berarti pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya untuk gaji pegawai. Selain itu juga pembiayaan berbagai sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah yang tentunya juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Sedangkan derajat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat khususnya pemilik kos yang menjadi wajib pajak adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan terlaksananya kewajiban mereka dalam pembayar pajak. Masyarakat mengharapkan perubahan yang positif dari adanya kebijakan ini yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang nyata sehingga mereka dapat merasakan haknya sebagai warga Negara dengan mendapat kemakmuran dari Negara setelah menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal nyata ini dapat berupa perbaikan jalan-jalan yang rusak di tempat tinggal mereka, peningkatan fasilitas masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, perbaikan fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Derajat perubahan yang dapat disimpulkan dari kedua pendapat narasumber yaitu dari sisi pemerintah dan masyarakat adalah dengan berjalannya kebijakan pemungutan pajak rumah kos dan transparannya hasil pajak yang diperoleh pemerintah daerah sehingga terselenggaranya pembangunan yang nyata dan progresif maka akan terbentuk adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dengan sendirinya masyarakat akan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka akan mudah dalam pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah seperti yang dikemukakan

mengenai tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Due sehingga pemerintah dapat mengelola penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Gambar 4 Derajat Perubahan



Sumber: Data diolah

4. Ketepatan sasaran kebijakan.

Menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang sudah tepat sasaran namun belum optimal. “Pemungutan sudah tepat toh. Kalau tercovernya semua wajib pajak masih belum. Budget kita untuk kos-kosan 600-700an. 600 wajib pajak. Untuk wajib pajak kos-kosan kita sudah 600 wajib pajak karena masih banyak yang belum tercover ya dek”. Ketepatan sasaran pemungutan pajak kos menurut Joko Susilo, “Sasaran pajak kos itu kos-kosan lebih dari 10 kamar ya mbak. kalau saya waktu itu, 2014 ya, rame kan itu sosialisasi pajak kos di tv-tv. Saya daftar sendiri mbak ke petugas pajak, di Kantor Terpadu sana ya”.

Ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan ini dikatakan tercapai ketika seluruh potensi pajak yang ada di wilayah Kota Malang telah dapat dilakukan pendataan sehingga pemungutan pajak berlangsung secara optimal. Pemungutan pajak rumah kos dapat dikatakan tepat sasaran saat sasaran kebijakan yaitu pemilik kos yang memiliki kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar telah melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan membayar pajak rumah kos kepada Pemerintah Kota Malang. Banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pemungutan pajak rumah kos sehingga tepat sasaran, yaitu salah satunya adalah adanya kerjasama dengan aparaturnya lingkungan setempat yang dapat melalui Ketua RT dan Ketua RW untuk mendata warga mereka yang memiliki usaha rumah kos, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber “kita kerjasama dengan RT/RW. Pun kadang-kadang RT/RW juga tidak terbuka ya dengan kita. Kita cari sendiri seperti itu. Masih belum optimal kita mndata utk wajib pajak kosan belum optimal. Karena masih terus berkembang. Namanya kosan ya terus berkembang toh dek, ada orang *mbangun* kosan ya terus berkembang, berkembang”.

Namun dalam setiap kebijakan, tentunya terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu diterima oleh masyarakat luas dan tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini juga terjadi pada kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Wajib pajak yang telah terdaftar dan melaksanakan kewajibannya memang sudah

banyak dan telah mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Malang, namun disisi lain masih terdapat pula pemilik kos yang seharusnya adalah wajib pajak rumah kos tidak tercatat sebagai wajib pajak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini telah diketahui oleh Pemerintah Kota Malang seperti yang diungkapkan oleh narasumber “Karena keterbatasan tenaga. Tenaga kita kan, kita menangani 9 (sembilan) macam pajak seluruh Kota Malang dengan tenaga yang seperti itu terbatas. Kan ya kos itu gak sama dengan rumah makan dek. Kalau rumah makan ada tulisan, hotel juga ada tulisan jadi kita langsung *njujuk* ya dek. Tapi kalau kosan kan kayak rumah biasa. Kita gak tahu itu kos atau rumah biasa”. Pernyataan ini berbanding lurus dengan kenyataan yang ada di lapangan yang ditemui pada saat dilakukan penelitian. Terdapat salah satu pemilik kos yang tidak jujur dalam memberikan keterangan dan data atas kepemilikan rumah kos. Hal ini menyebabkan sampai penelitian ini dibuat, pemilik kos tersebut masih belum terdaftar sebagai wajib pajak padahal seharusnya pemilik kos tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas rumah kos yang dimiliki karena kepemilikan kamar kos lebih dari 10 (sepuluh). Ketepatan sasaran suatu kebijakan memang memerlukan adanya kerjasama seluruh pihak yang terlibat atas kebijakan, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaksana kebijakan. Ketika masyarakat menyadari dan menunjukkan partisipasinya dalam

pelaksanaan kebijakan, maka kebijakan tersebut akan berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ketepatan sasaran pemungutan pajak berhubungan langsung dengan keefektivitasan pemungutan. Suatu pemungutan pajak dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan Davey dalam Prakosa yang meliputi:

1. Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama sumber pendapatan yang dapat dipajaki adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini pemungutan pajak rumah kos merupakan jenis pajak baru yang nantinya diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan penerimaan pajak daerah. Namun disamping itu, juga terdapat tambahan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan sebagai upaya pemerintah daerah agar pemungutan pajak kos dapat berjalan optimal. Kalau biaya pelayanan meningkat maka pendapatannya juga meningkat. Keadaan demikian sangat diharapkan, karena pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Pemerataan/Keadilan

Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah daerah harus dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan

kesanggupan masing-masing golongan. Konsep ini memandang pajak merupakan suatu alat redistribusi pendapatan, golongan kaya menyumbang lebih besar daripada nilai pelayanan yang diterimanya, sebaliknya golongan miskin nilai pelayanan yang ia peroleh lebih besar dibanding sumbangan yang ia berikan. Semakin besar omzet yang dihasilkan dari kepemilikan pajak rumah maka akan semakin besar juga tanggungan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.

3. Kemampuan Administratif

Keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini adalah pemungutan pajak rumah kos tidak bisa lepas dari peran administratif lembaga pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi jalannya proses pemungutan. Pemerintah daerah Kota Malang sejauh ini memiliki kemampuan administratif yang memadai sehingga mampu melakukan pemungutan pajak rumah kos dengan optimal.

4. Penerimaan/Kesepakatan Politis

Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Diperlukan adanya pengetahuan masyarakat mengenai pajak rumah kos agar dapat ditemukan kecocokan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan pemungutan.

5. Kecocokan Suatu Pajak

Pemungutan pajak rumah kos dirasa cocok dilakukan di Kota Malang mengingat tingginya potensi usaha kepemilikan rumah kos di Kota Malang.

5. (Siapa) pelaksana program.

Berdasarkan keterangan Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) “*outsourcing* didampingi oleh temen-temen pegawai nanti temen-temen pegawai yang munggut. Kalau mereka dititipi, kalau enggak ya enggak. Mereka wajib membayar sendiri ke Bank Jatim. Kalau pas ngasi SKP “*aku titip sekalian bayarnya*” mereka terima. Kalau gak diititipi ya enggak. Tiap hari ke lapangan, ini kan sepi. Disamping mereka osgab mereka juga ke lapangan”. Pelaksana program pemungutan pajak rumah kos menurut Joko Susilo, “Saya dulu daftar daftar sendiri, ngisi data-data itu mbak. jumlah kamar kos, tarif kamarnya, terus dikalikan 10% saya bayar deh itu uangnya”.

Pemungutan pajak rumah kos merupakan pemungutan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan *self assessment system*. Sehingga seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 bahwa *self assessment system* dalam proses pemungutan, pemilik rumah kos yang merupakan wajib pajak merupakan implementor kebijakan atau pelaksana program pemungutan pajak rumah kos. Berdasarkan hasil wawancara terhadap kedua narasumber dari sisi pemerintah dan wajib

pajak, terdapat persamaan pendapat bahwa pelaksana kebijakan adalah wajib pajak sendiri sebagai pemilik usaha rumah kos. Sedangkan dispenda merupakan dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai pemunggut pajak untuk melakukan fungsi kontrol dan mengawasi proses pemungutan agar berjalan sesuai dan benar. Pemungut pajak/Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Malang memberikan kewenangan pemungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dalam menjalankan pemungutannya dinas pendapatan daerah Kota Malang mengerahkan tenaga pegawainya (Pegawai Negeri Sipil) dibantu dengan tambahan pegawai dari luar (*outsourcing*).

6. Sumber daya yang dikerahkan.

Dispenda dalam melakukan pemungutan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat membantu tugas mereka dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak rumah kos. Menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “dari SDM ada pegawai dan *outsourcing*, kendaraan mulai dari sepeda motor mobil dari pemerintah. Kalau motor temen-temen sendiri bawa. Kalau mobil, mobil dinas. Kalau di kantor *yo onok* komputer untuk melihat diinput dimasukkan”. Sedangkan Joko Susilo sebagai wajib pajak rumah kos yang juga memiliki peranan utama dalam kebijakan ini mengungkapkan bahwa sumber daya yang digunakan dalam mematuhi

kewajiban perpajakannya, “kalau mau bayar ke bank Jatim ya sumber daya ya apa ya mbak, kendaraan, uang ya yang pasti”.

Kebijakan pemungutan pajak rumah kos memerlukan berbagai sumber daya agar dapat berjalan optimal. Seperti yang diutarakan oleh narasumber, sumber daya yang digunakan oleh Dispenda berupa sumber daya manusia adalah pemberdayaan pegawai Dispenda atau pegawai negeri sipil dan pegawai tambahan yang diberdayakan melalui *outsourcing*. Selain sumber daya manusia, juga diperlukan sumber daya penunjang yaitu transportasi yaitu berupa kendaraan. Kendaraan yang digunakan berasal dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kendaraan pribadi dari pegawai yang menjalankan tugas pemungutan pajak.

b. Konteks Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Kepentingan implementasi pemungutan pajak rumah kos adalah wajib pajak dan pemungut pajak. Pengertian wajib pajak menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “dengan cara ekstensifikasi apabila ada objek pajak dia belum menjadi objek pajak kita undang dari kasi pendataan, nanti didaftarkan di kasi pendaftaran. Kasi pendaftaran suruh mengisi form pendaftaran dengan persyaratan fotokopi KTP. Setelah dia di daftar dia mengisi omzet, SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) berapa sih satu bulannya, kamarnya berapa tarifnya berapa, kamarnya yang laku berapa.

Lah dari kamar yang laku dikalikan tarif di kalikan tarif pajaknya jadilah pajak. Itulah yang harus dibayarkan. Seperti yang kamu lihat di Perda No 2 Tahun 2015 itu kan kalau kamar kos lebih dari 10 itu yang harus dikenakan pajak. Itulah wajib pajak”.

Pendapat Joko Susilo sebagai wajib pajak rumah kos, “setahu saya pajak kos itu dibawah kekuasaannya Kota Malang ya mbak, jadi gak sama dengan yang bayar dari gaji tiap bulan itu, kalau gaji itu ke pusat ya, kalau kos ke daerah. Strategi yang dilakukan pemerintah setahu saya ya sosialisasi itu mbak. Di tv-tv sering diberitakan itu. Terus ada juga yang gerebekan mendadak ke rumah kos. kalau ada gerebekan gitu rame mbak”.

Pemungutan pajak rumah kos merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sehingga segala bentuk kebijakan pemungutan merupakan kewenangan/kekuasaan dari Pemerintah Kota Malang sebagai penyelenggara Daerah Otonom. Dalam melakukan pemungutan atas pajak rumah kos, Pemerintah Kota Malang memiliki kekuasaan atas wilayah Kotanya, seperti yang disampaikan oleh Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “Kekuasaannya wilayahnya Kota Malang 5 kecamatan, Kedungkandang, Klojen, Sukun, Blimbing, dan Lowokwaru”.

Sedangkan Pemungut pajak/Instansi Pemungut adalah instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Malang memberikan

kewenangan pemungutan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dalam menjalankan pemungutannya dinas pendapatan daerah Kota Malang mengerahkan tenaga pegawainya (Pegawai Negeri Sipil) dibantu dengan tambahan pegawai dari luar (*outsourcing*). Berdasarkan keterangan Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) “Sebenarnya *outsourcing* didampingi oleh teman-teman pegawai nanti teman-teman pegawai yang munggut”.

Menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), strategi implementasi pemungutan pajak rumah kos agar optimal, “dari intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi nanti mereka mengecek lapangan, apakah benar wajib pajak melaporkan sesuai dengan kamar yang laku, kalau enggak sesuai mereka harus dikasi kurang bayar. Kalau ekstensifikasi itu temenn-temen mendata apakah benar rumah kos sudah jadi wajib pajak. Objek kos ini sudah jadi wajib pajak. Kalau belum mereka kita kasi undangan kita kenakan pajak. Itu ekstensifikasi artinya menambah wajib pajak. Kalau intensifikasi cek lapangan betul kah laporan wajib pajak itu sesuai dengan yang dilaporkan artinya sesuai dengan SPTPD. Kalau gak sesuai harus ada kurang bayar”. Pendapat ini memiliki kesesuaian dengan penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa adanya pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perluasan basis pajak dan penetapan tarif pajak

sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “Untuk pemerintah *sih yo*. Semua pajak kan untuk masyarakat, kembali ke masyarakat. Pajak ya untuk masyarakat. Peraturan ini mengedepankan masyarakat. Untuk masyarakat bukan pemerintah, karena pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat”. Pendapat Joko Susilo mengenai karakteristik lembaga penguasa, “teorinya untuk masyarakat ya, semoga orang-orang yang memiliki wewenang bisa amanah ya sehingga memberikan manfaat ke masyarakat luas”.

Kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan pungutan pajak kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang nantinya manfaat dari pemungutan tersebut akan kembali kepada masyarakat sendiri sebagai sumber dari pembiayaan pembangunan daerah. Pendapat dari kedua narasumber mengungkapkan adanya persamaan tanggapan yaitu pemungutan pajak merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk kepentingan umum masyarakat sendiri. hal ini telah sesuai dengan pengertian dan definisi pajak di dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 yaitu pajak digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun dari sisi masyarakat, terdapat keraguan kepada pemerintah. Masyarakat masih belum memberikan

kepercayaannya secara penuh atas kinerja pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mungkin akan dapat berubah ketika pemerintah mampu menunjukkan prestasi kerjanya sehingga masyarakat percaya sepenuhnya bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dibuat untuk kepentingan masyarakat sendiri.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Sriyoni Yudowati (Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang), “Macem-macam. Ada yang mereka sadar pajak. Ada yang tidak sadar pajak. Orang Indonesia mana ada sih yang sadar pajak. Contoh aja kemarin ada pegawai pajak yang dibunuh di Sibolga. Kan ada yang gak sadar pajak. Lah mereka gak sadar nunggak banyak. Jadilah mereka disegel jadi pembunuhan seperti itu. Ada yang sadar pajak. *Oh aku sebagai warga Indonesia yang baik aku bayar pajak.* Tanpa mereka kita undang mereka datang sendiri. *Buk saya punya kos, saya jadi warga negara yang baik saya harus bayar pajak.* Ada yang gak sadar pajak, mereka sudah kita kasi undangan jadi wajib pajak mereka gak mau, akhirnya kena osgab, mereka yang datang langsung kesini karena kena osgab. Di rumahnya dikasi segel. Akhirnya mereka datang sendiri kesini bayar pajak”. Joko Susilo memberikan pendapatnya mengenai kepatuhan waib pajak sebagai berikut, “Hahaha kalau ditanya kepatuhan wajib pajak, itu kepatuhan saya dong mbak. Saya ya patuh mbak. Disuruh bayar ya bayar”

Suatu kebijakan baru pasti menimbulkan berbagai respon baik dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan maupun unsur pemerintah sendiri sebagai pengawas jalannya kebijakan. Berbagai respon masyarakat dalam menanggapi adanya pemungutan pajak rumah kos. Terdapat masyarakat yang mengerti dan mendukung pemungutan pajak rumah kos, namun tak sedikit pula yang masih harus diberi pengertian lebih lanjut terkait pemungutan pajak rumah kos. Banyaknya masyarakat yang memiliki rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) yang telah terdaftar sebagai wajib pajak menunjukkan respon masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan dan daya tanggap sasaran kebijakan yang baik dari sisi masyarakat seperti yang dikatakan oleh narasumber. Namun di sisi lain narasumber juga mengungkapkan bahwa masih terdapat pula potensi wajib pajak yang belum terdata oleh Dispenda. Hal ini berarti masih ada pemilik kos yang seharusnya melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pajak atas rumah kos namun mereka belum melunasi dan melaksanakan kewajibannya.

Fenomena yang terjadi di lapangan pada saat dilakukan penelitian terdapat pemilik usaha rumah kos yang seharusnya pemilik kos tersebut merupakan wajib pajak rumah kos namun sampai pada saat penelitian dilakukan pemilik usaha kos tersebut masih belum tercatat sebagai wajib pajak. Salah satu pemilik usaha kos yang berada di kawasan Jalan Mayjen Pandjaitan tersebut pada saat peneliti mendatangi tempat

usahnya, peneliti mengetahui secara jelas dan nyata jika terdapat kamar kos lebih dari 10 (sepuluh) tepatnya 12 (dua belas) kamar. Usaha kos terletak di pinggir jalan raya dengan bangunan berlantai 2 (dua). Lantai 1 (satu) digunakan oleh pemilik kos untuk usaha toko dan fotokopi, sedangkan lantai 2 digunakan sebagai tempat kos. Dengan keadaan yang sedemikian, bangunan berlantai 2 (dua) tersebut nampak seperti layaknya ruko biasa yang menjadi tempat usaha dagang pemilik ditambah lagi tidak ada tulisan atau keterangan yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah kos. Sehingga mungkin sampai saat penelitian ini dibuat petugas pajak dalam hal ini adalah Dispenda tidak mengetahui keberadaan potensi wajib pajak, sehingga hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber dari Dispenda mengenai kendala yang ditemui petugas dalam melakukan pendataan wajib pajak.

Kejadian dalam masyarakat ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang mereka belum memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka laksanakan. Sehingga hal ini dapat menjadi catatan kepada Dispenda selaku pengawas kebijakan agar lebih teliti dan tepat dalam mengungkap keberadaan rumah kos sehingga kebijakan akan berjalan optimal dan memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak atas Rumah Kos

Efektivitas yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak dalam hal ini pajak rumah kos dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 690.900.327 tahun 1996, tingkat keefektivitasan pemungutan pajak rumah kos dapat dikatakan sangat efektif ketika tingkat prosentase $>100\%$ dan ketika kurang atau belum mencapai 100% maka tingkat keefektivitasannya semakin menurun. Berdasarkan peraturan tersebut maka tingkat efektivitas pajak rumah kos adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rupiah)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2013	64.469.009,15	67.843.000,00	105,23%	Sangat Efektif
2014	448.636.145,83	733.421.338,00	163,48%	Sangat Efektif
2015	1.000.000.000,00	1.738.576.832,50	173,86%	Sangat Efektif
Rata-rata	504.368.384,99	846.613.723,50	147,52%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 10 diatas menunjukkan perbandingan target penerimaan pajak rumah kos yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang dengan realisasi penerimaan pajak rumah kos yang telah diterima dan dipungggut oleh

Pemerintah Kota Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode tahun 2013, 2014, dan 2015. Dengan adanya kedua data tersebut maka dapat diketahui tingkat efektivitas dari pemunggutan pajak rumah kos. Tingkat keefektivitasan pemungutan pajak rumah kos dapat dikatakan sangat efektif ketika tingkat prosentase >100% dan ketika kurang atau belum mencapai 100% maka tingkat keefektivitasannya semakin menurun.

Tahun 2013 menunjukkan tingkat prosentase keefektivitasan pajak rumah kos di Kota Malang adalah sebesar 105,23%. Dalam tahun ini, yaitu pada tahun 2013 pemungutan pajak atas rumah kos masih belum dilaksanakan pemungutannya secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kota Malang. Hal ini berkesesuaian dengan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara penulis kepada Ibu Sriyoni Yudowati selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang bahwa pada tahun 2013 pemungutan pajak atas rumah kos masih belum terealisasi secara menyeluruh, baru pada tahun 2014 pemungutan pajak kos dapat direalisasikan. Namun walaupun belum berjalan optimalnya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang, tingkat keefektivitasan yang berada di angka 105,23% merupakan angka yang cukup tinggi mengingat realisasi penerimaan telah melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektivitas pada tahun 2013 dikategorikan sangat efektif (lebih dari 100%).

Tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak rumah kos. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 Pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungggutan secara nyata pengenaan pajak atas kepemilikan rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam hal melakukan pemunggutan pajak rumah kos menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap target penerimaan pajak rumah kos, realisasi penerimaan pajak rumah kos hingga diikuti oleh peningkatan tingkat efektivitas pajak rumah kos. Tingkat efektivitas pajak rumah kos pada tahun 2014 mencapai 163,48%, jumlah prosentase yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Tingkat efektivitas pajak rumah kos pada tahun 2014 dikategorikan sangat efektif (lebih dari 100%).

Tahun 2015 merupakan tahun kedua realisasi pemunggutan pajak rumah kos di Kota Malang. Di tahun 2015 menunjukkan kembali adanya peningkatan penetapan target dan realisasi penerimaan pajak rumah kos. Peningkatan target dan realisasi penerimaan pajak rumah kos juga diiringi dengan meningkatnya prosentase tingkat efektivitas pajak rumah kos pada tahun 2015. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak rumah kos tahun 2015 adalah sebesar 173,86%. Tingkat efektivitas pajak rumah kos pada tahun 2015 dikategorikan sangat efektif (lebih dari 100%).

Dari pengumpulan data target dan realisasi penerimaan pajak rumah kos selama 3 (tiga) periode tahun 2013, 2014, dan 2015 serta pengkategorian tingkat efektivitas atas pajak rumah kos di Kota Malang dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan tingkat efektivitas pajak rumah kos. Peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2014 karena tahun 2014 merupakan tahun pertama pemungutan pajak rumah kos secara nyata dan menyeluruh di Kota Malang. Tahun berikutnya yaitu tahun 2015 juga terlihat adanya peningkatan yang cukup

signifikan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat diketahui rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang adalah sebesar 147,52% dan dikategorikan sangat efektif (lebih dari 100%).

Peningkatan prosentase tingkat keefektifitasan pemungutan pajak rumah kos yang sangat signifikan dari tahun 2013 ke 2014 begitu juga halnya 2014 ke tahun 2015 merupakan hasil yang diperoleh dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah Dispenda sebagai unsur pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pemungutan pajak di Kota Malang. Berbagai upaya untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi diantaranya adalah Pemerintah Kota Malang melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat khususnya para pemilik usaha rumah kos yang memiliki potensi sebagai wajib pajak dapat mengetahui adanya pemungutan pajak atas rumah kos ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dilaksanakan melalui media-media elektronik baik melalui tayangan televisi, radio, maupun koran atau surat kabar. Selain itu Dispenda dalam kurun waktu tertentu juga melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat dengan mendatangi kawasan-kawasan di seluruh kecamatan di Kota Malang yang memiliki potensi pajak rumah kos. Disamping adanya usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, tingginya tingkat efektivitas pemungutan pajak atas rumah kos ini juga tidak lepas dari peran masyarakat sebagai pelaksana kebijakan pemungutan (implementor). Berdasarkan tingginya peningkatan prosentase efektivitas pemungutan pajak rumah kos dapat ditarik kesimpulan bahwa hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah wajib

pajak dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak rumah kos di Kota Malang. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Malang dan masyarakat sebagai implementor dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah sangat efektif melakukan pemungutan pajak rumah kos.

3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak

1. Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Hotel Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Pemungutan atas pajak rumah kos merupakan salah satu objek dari pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 tahun 2010. Di Kota Malang pemungutan pajak kos secara nyata telah dilaksanakan mulai tahun 2014. Dengan adanya pemungutan pajak kos di Kota Malang, maka akan berpengaruh dan sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Malang. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan besar kontribusi pemungutan pajak rumah kos terhadap pajak hotel di Kota Malang.

Tabel 11 Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Hotel Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)	Kontribusi (%)
2013	67.843.000,00	13.934.800.659,87	0,49%
2014	733.421.338,00	25.069.025.889,87	2,92%
2015	1.738.576.832,50	31.828.508.228,43	5,46%
Rata-rata	846.613.723,50	23.610.778.259,39	2,96%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 11 realisasi penerimaan pajak rumah kos dan penerimaan pajak hotel selama kurun waktu 3 (tiga) periode tahun 2013, 2014, dan 2015 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan realisasi penerimaan dalam setiap tahunnya. Hal ini berarti juga terdapat peningkatan yang sebanding pada tingkat kontribusi pajak rumah kos yang disumbangkan terhadap pajak hotel di Kota Malang.

Pada tahun 2013 pemungutan pajak kos di Kota Malang masih belum berjalan optimal. Sehingga besar kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak hotel di Kota Malang masih sangat kecil. Realisasi penerimaan pajak rumah kos tahun 2013 sebesar Rp. 67.843.000,00. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp. 13.934.800.659,87. Pajak rumah kos memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Malang sebesar 0,49%.

Realisasi penerimaan pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 733.421.338,00. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 67.843.000,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 Pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungggutan secara nyata pengenaan pajak atas kepemilikan rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam hal melakukan pemungggutan pajak rumah kos menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak rumah kos hingga diikuti oleh peningkatan tingkat kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak hotel. Reealisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 juga mengalami

peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 hingga menjadi sebesar Rp. 25.069.025.889,87. Dengan demikian dapat diketahui besarnya jumlah kontribusi yang disumbangkan oleh pemungutan pajak rumah kos terhadap pajak hotel yang ada di Kota Malang pada tahun 2014. Besarnya kontribusi dari pajak rumah kos terhadap pajak hotel di Kota Malang adalah sebesar 2,92%.

Tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak rumah kos di Kota Malang hingga menjadi sebesar Rp. 1.738.576.832,50. Peningkatan yang sangat besar di tahun kedua setelah terlaksanakannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang secara menyeluruh. Realisasi penerimaan pajak rumah kos di tahun 2015 mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 di tahun pertama pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. peningkatan realisasi penerimaan pajak rumah kos juga diimbangi dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Malang pada tahun 2015. Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Malang adalah sebesar Rp 31.828.508.228,43. Besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh pajak rumah kos terhadap pajak hotel pada tahun 2015 di Kota Malang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pajak rumah kos memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak hotel sebesar 5,46%,

Berdasarkan tabel 19 diatas, dapat diketahui rata-rata realisasi penerimaan pajak rumah kos selama kurun waktu 3 (tiga) tahun periode tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar Rp. 846.613.723,50. Rata-rata realisasi penerimaan pajak

hotel di Kota Malang selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 23.610.778.259,39. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak rumah kos terhadap pajak hotel di Kota Malang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selama tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar 2,96%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak hotel masih sangat kurang jika dibandingkan dengan objek pajak hotel yang lainnya. Melihat hal ini, Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan upaya pemungutan pajak rumah kos baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak hotel di Kota Malang.

2. Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun

Anggaran 2013-2015

Pemungutan atas pajak rumah kos merupakan salah satu objek dari pajak hotel sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 tahun 2010. Pajak hotel sendiri merupakan salah satu dari jenis-jenis pajak daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah yang sama dan Undang-undang Nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kota Malang pemungutan pajak kos secara nyata telah dilaksanakan mulai tahun 2014. Dengan adanya pemungutan pajak kos di Kota Malang, maka akan berpengaruh dan sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya juga memberikan kontribusi terhadap pajak daerah di Kota Malang. Berikut ini merupakan tabel 20 yang menunjukkan besar kontribusi pemungutan pajak rumah kos terhadap pajak daerah di Kota Malang:

Tabel 12 Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Pajak Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kos (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi (%)
2013	67.843.000,00	238.499.748.161,57	0,03%
2014	733.421.338,00	278.885.157.875,87	0,26%
2015	1.738.576.832,50	316.814.967.743,76	0,55%
Rata-rata	846.613.723,50	278.066.624.593,73	0,28%

Kontribusi pajak atas rumah kos terhadap pajak daerah merupakan seberapa besar tingkat kontribusi yang dihasilkan dari penerimaan pajak atas rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah yang ada di Kota Malang. Semakin besar penerimaan pajak atas rumah kos di Kota Malang maka akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang, sebaliknya apabila penerimaan dari pajak atas rumah kos ternyata masih dirasa belum cukup atau belum optimal maka harus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak atas rumah kos sehingga akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan pajak daerah. Selanjutnya, kontribusi penerimaan Pajak atas Rumah Kos terhadap pendapatan pajak daerah dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM yang mengelompokkan rasio kontribusi $>50,00$ maka dikategorikan sangat baik dan kriteria terkecil yaitu sangat kurang berada di rasio 0-10,00.

Berdasarkan tabel 12 realisasi penerimaan pajak rumah kos dan penerimaan pajak daerah selama kurun waktu 3 (tiga) periode tahun 2013, 2014, dan 2015 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan realisasi penerimaan dalam setiap tahunnya. Hal ini berarti juga terdapat peningkatan yang sebanding pada tingkat kontribusi pajak rumah kos yang disumbangkan terhadap pajak daerah di Kota Malang.

Pada tahun 2013 pemungutan pajak kos di Kota Malang masih belum berjalan optimal. Sehingga besar kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak daerah di Kota Malang masih sangat kecil. Realisasi penerimaan pajak rumah kos tahun 2013 sebesar Rp. 67.843.000,00. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2013 sebesar Rp. 238.499.748.161,57. Pajak rumah kos memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang sebesar 0,03%. Kontribusi pajak rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2013 sesuai dengan kriteria nilai kontribusi masuk kedalam golongan rasio 0,00-10,00 atau kriteria sangat kurang.

Realisasi penerimaan pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 733.421.338,00. Jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 67.843.000,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2014 Pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungggutan secara nyata pengenaan pajak atas kepemilikan rumah kos sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam hal melakukan pemungggutan pajak rumah kos menghasilkan

peningkatan yang sangat signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak rumah kos hingga diikuti oleh peningkatan tingkat kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 hingga menjadi sebesar Rp. 278.885.157.875,87. Dengan demikian dapat diketahui besarnya jumlah kontribusi yang disumbangkan oleh pemungutan pajak rumah kos terhadap pajak daerah yang ada di Kota Malang pada tahun 2014. Besarnya kontribusi dari pajak rumah kos terhadap pajak daerah di Kota Malang adalah sebesar 0,26%. Kontribusi pajak rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 sesuai dengan kriteria nilai kontribusi masuk kedalam golongan rasio 0,00-10,00 atau kriteria sangat kurang.

Tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap penerimaan pajak rumah kos di Kota Malang hingga menjadi sebesar Rp. 1.738.576.832,50. Peningkatan yang sangat besar di tahun kedua setelah terlaksanakannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang secara menyeluruh. Realisasi penerimaan pajak rumah kos di tahun 2015 mengalami peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 di tahun pertama pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang. Peningkatan realisasi penerimaan pajak rumah kos juga diimbangi dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Malang pada tahun 2015. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Malang adalah sebesar Rp 316.814.967.743,76. Besarnya kontribusi yang disumbangkan oleh pajak rumah

kos terhadap pajak daerah pada tahun 2015 di Kota Malang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pajak rumah kos memberikan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 0,55%. Kontribusi pajak rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 sesuai dengan kriteria nilai kontribusi masuk kedalam golongan rasio 0,00-10,00 atau kriteria sangat kurang.

Berdasarkan tabel 12 diatas, dapat diketahui rata-rata realisasi penerimaan pajak rumah kos selama kurun waktu 3 (tiga) tahun periode tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar Rp. 846.613.723,50. Rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Malang selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 278.066.624.593,73. Rata-rata kontribusi yang diberikan oleh penerimaan pajak rumah kos terhadap pajak daerah di Kota Malang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selama tahun 2013, 2014, dan 2015 adalah sebesar 0,28%. Rata-rata kontribusi pajak rumah kos terhadap penerimaan pajak daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 sesuai dengan kriteria nilai kontribusi masuk kedalam golongan rasio 0,00-10,00 atau kriteria sangat kurang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak daerah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya. Melihat hal ini, Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan upaya pemungutan pajak rumah kos baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusi pajak rumah kos terhadap pajak daerah di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pemungutan pajakrumah kos dilihat dari:

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang terpengaruhi adalaah adanya pemungutan pajak atas kepemilikan usaha rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (kamar).

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan pemungutan pajak rumah kos diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan penerimaan pajak bagi Kota Malang sehingga dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, pembiayaan kesehatan, pendidikan, belanja pegawai dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Dengan melihat secara nyata pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengelola hasil pajak diharapkan seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak meningkat dan penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat juga.

d. Ketepatan sasaran kebijakan

Peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang terdaftar mencerminkan upaya Dispenda dalam pemuungutan berjalan dengan

baik, namun dalam temuan kasus ditemukan adanya pemilik usaha kos yang sampai saat penelitian ini dibuat masih belum terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran kebijakan sudah baik namun belum optimal.

e. (siapa) pelaksana program

Pemungutan pajak rumah kos yang menggunakan *self assesement system* menjadikan masyarakat dalam hal ini pemilik kos yang merupakan wajib pajak sebagai pelaksana program (implementor), sedangkan Dispenda sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi berjalannya kebijakan.

f. Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya manusia yang berasal dari pegawai negeri sipil Dispenda Kota Malang dan dibantu oleh tenaga *outsourcing*. Sumber daya lainnya merupakan sarana transportasi berupa kendaraan roda dua dan roda empat dan komputer.

g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan kebijakan ada di 5 (lima) kecamatan di Kota Malang yaitu Kedungkandang, Klojen, Sukun, Blimbing, dan Lowokwaru. Dalam melaksanakan kebijakan dengan kepentingan pemungutan pajak rumah kos, Dispenda menggunakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

h. Karakteristik lembaga dan penguasa

Kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

i. Kepatuhan dan daya tanggap

Terdapat temuan bahwa pemilik usaha kos yang seharusnya menjadi wajib pajak namun memberikan data yang salah dan dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak menunjukkan tingkat kepatuhan dan daya tanggap sasaran kebijakan masih kurang.

2. Efektivitas pemungutan pajak atas rumah kos secara keseluruhan menunjukkan tingkat keefektifitasan dalam kriteria yang sangat efektif karena dalam setiap tahun realisasi pemungutan pajak rumah kos dalam mencapai target penerimaan. Tingkat keefektivitasan dari tahun 2013 sampai 2015 selalu mengalami peningkatan yaitu 105,23%, 163,48%, dan 173,86%.
3. Kontribusi penerimaan pajak rumah kos tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan yaitu 0,03%, 0,26%, dan 0,55%. Hal ini dapat terjadi karena pemungutan pajak kos yang mulai efektif pada tahun 2014 telah dilaksanakan dengan optimal sehingga kontribusi penerimaan pajak rumah kos juga mengalami peningkatan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang.

B. Saran

1. Bagi Dispenda Kota Malang sebaiknya melakukan pembaharuan data wajib pajak yang telah terdaftar dan masyarakat yang memiliki usaha rumah kos sebagai potensi wajib pajak setidaknya sekali dalam setahun agar data yang ada di Dispenda sesuai dengan keadaan dalam masyarakat.
2. Bagi Dispenda Kota Malang melakukan kerjasama dengan RT/RW di lingkungan setiap kecamatan untuk memperoleh data valid mengenai pemilik usaha rumah kos.
3. Bagi Dispenda Kota Malang untuk lebih mendetail dan teliti pada saat melakukan osgab (operasi gabungan) yaitu mendatangi pemilik kos dengan meninjau langsung rumah-rumah masyarakat sehingga dapat diketahui adanya usaha rumah kos yang dapat menjadi potensi pemungutan pajak.
4. Bagi Dispenda dan Pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mewujudkan transparansi dalam pengelolaan hasil penerimaan pajak sehingga secara nyata masyarakat dapat mengetahui penggunaan hasil pajak yang sesungguhnya.
5. Bagi masyarakat khususnya pemilik usaha rumah kos dan wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak rumah kos sehingga dapat memberikan data dan informasi dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Buku dan Referensi Jurnal

Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Basuki. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. *Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. 2013.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika, Jakarta, 2012.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, 2010.

Kusdi. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika, Jakarta, 2011.

Mono, Henny. *Menghadapi Sengketa Pajak di Indonesia*. Bayu Media Publishing, Malang, 2012.

Murandika, Muhammad Friansyah. *Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos ditinjau dari Perspektif Asa-asas Pemungutan Pajak Daerah*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. 2014.

Narbuko, Cholid, dan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

- Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Priantara, Diaz. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Sripadita, Nio Anggun. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. 2014.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Wulandari, Niken. 2015. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Online

- Hadi, Samsul. 2015. *Pemkot Malang Gali Pajak Kos-kosan di Lima Kecamatan*. Surya Online. <http://surabaya.tribunnews.com/2015/01/23/pemkot-malang-gali-pajak-kos-kosan-di-lima-kecamatan/> (Diakses Pada tanggal 13 November 2015).

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU

KEPADA ALMARHUM BAPAK KHUSNU TADJI TERCINTA

YANG BERADA DI SURGA

Lampiran 1 - Pedoman Wawancara

- a. Isi kebijakan pemungutan pajak rumah kos
 1. Pengetahuan informan mengenai kepentingan (sasaran) yang terpengaruhi oleh kebijakan pemungutan pajak rumah kos (pemilik rumah kos).
 2. Pendapat informan mengenai manfaat yang diterima dari kebijakan pemungutan pajak rumah kos.
 3. Pengetahuan informan mengenai perubahan yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan pemungutan pajak rumah kos.
 4. Pendapat informan mengenai ketepatan sasaran pemungutan pajak rumah kos.
 5. Pengetahuan informan mengenai pelaksana program (implementor) yang menjalankan pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos.
 6. Pendapat informan mengenai sumber daya yang dikerahkan dalam pemungutan pajak atas rumah kos.
- b. Konteks Implementasi
 1. Pengetahuan informan mengenai kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi pemungutan pajak rumah kos.
 2. Pendapat informan mengenai karakteristik lembaga dan penguasa (apakah mengedepankan kepentingan rakyat atau pribadi/golongan).
 3. Pengetahuan informan mengenai kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran (respon pemilik rumah kos).

PEMERINTAH KOTA MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Periode 01 Januari 2013 - 31 Desember 2013

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Persen %
1	PENDAPATAN	1.485.322.092.001,87	1.524.846.569.429,26	39.524.477.427,39	102,66
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	298.417.399.028,87	317.850.423.684,26	19.433.024.655,39	106,51
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57	28.211.848.383,39	113,42
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	38.366.632.198,90	38.473.729.369,00	107.097.170,10	100,28
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.551.938.094,82	16.571.050.907,26	-4.980.887.187,56	76,89
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.210.928.956,97	24.305.895.246,43	-3.905.033.710,54	86,16
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.137.539.547.973,00	1.164.375.000.745,00	26.835.452.772,00	102,36
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	866.094.455.871,00	863.736.860.965,00	-2.357.594.906,00	99,73
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.637.796.014,00	39.835.216.834,00	-9.802.579.180,00	80,25
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39.454.012.857,00	46.898.997.131,00	7.444.984.274,00	118,87
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	746.686.937.000,00	746.686.937.000,00	0	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	30.315.710.000,00	30.315.710.000,00	0	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	165.240.656.000,00	191.569.752.000,00	26.329.096.000,00	115,93
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	165.240.656.000,00	191.569.752.000,00	26.329.096.000,00	115,93
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	106.204.436.102,00	109.068.387.780,00	2.863.951.678,00	102,70
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.204.436.102,00	109.068.387.780,00	2.863.951.678,00	102,70
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	49.365.145.000,00	42.621.145.000,00	-6.744.000.000,00	86,34
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.500.000.000,00	17.756.000.000,00	-6.744.000.000,00	72,47
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	24.865.145.000,00	24.865.145.000,00	0	100,00
	Jumlah	1.485.322.092.001,87	1.524.846.569.429,26	39.524.477.427,39	102,66
2	BELANJA	1.629.594.156.140,34	1.486.368.766.886,45	143.225.389.253,89	91,21
2.1	BELANJA OPERASI	1.183.980.753.552,02	1.133.013.596.006,45	50.967.157.545,57	95,70
2.1.1	Belanja Pegawai	777.362.789.393,52	767.298.084.806,10	10.064.704.587,42	98,71
2.1.2	Belanja Barang	343.334.777.817,55	302.589.084.359,40	40.745.693.458,15	88,13
2.1.3	Belanja Bunga	36.157.840,95	36.157.840,95	0	100,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	62.344.799.800,00	62.297.290.300,00	47.509.500,00	99,92
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	238.500.000,00	129.250.000,00	109.250.000,00	54,19
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	663.728.700,00	663.728.700,00	0	100,00
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri				
2.2	BELANJA MODAL	443.515.652.602,52	353.264.833.758,00	90.250.818.844,52	79,65
2.2.1	Belanja Tanah	29.777.636.000,00	12.373.686.000,00	17.403.950.000,00	41,55
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	81.203.342.738,52	53.315.882.370,00	27.887.460.368,52	65,66
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	113.983.907.373,00	94.506.673.141,00	19.477.234.232,00	82,91
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.929.952.085,00	179.603.341.000,00	23.326.611.085,00	88,51
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.470.499.406,00	12.387.673.297,00	2.082.826.109,00	85,61
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.150.315.000,00	1.077.577.950,00	72.737.050,00	93,68

2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.997.749.985,80	17.022.672,00	1.980.727.313,80	0,85
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.997.749.985,80	17.022.672,00	1.980.727.313,80	0,85
	Jumlah	1.629.494.156.140,34	1.486.295.452.436,45	143.198.703.703,89	91,21
2.4	TRANSFER	100.000.000,00	73.314.450,00	26.685.550,00	73,31
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	100.000.000,00	73.314.450,00	26.685.550,00	73,31
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	100.000.000,00	73.314.450,00	26.685.550,00	73,31
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	73.314.450,00	26.685.550,00	73,31
	Jumlah Belanja	1.629.594.156.140,34	1.486.368.766.886,45	143.225.389.253,89	91,21
	Surplus/(Defisit)	-144.272.064.138,47	38.477.802.542,81	-182.749.866.681,28	0,00
3	PEMBIAYAAN	144.272.064.138,47	144.272.064.765,47	-627	100,00
3.1	PENERIMAAN DAERAH	161.443.965.225,79	161.443.965.225,79	0	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	161.443.965.225,79	161.443.965.225,79	0	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0,00
3.1.7	Dana Talangan	0	0	0	0,00
	Jumlah	161.443.965.225,79	161.443.965.225,79	0	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	17.171.901.087,32	17.171.900.460,32	627	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.100.000.000,00	16.100.000.000,00	0	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.071.901.087,32	1.071.900.460,32	627	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
3.2.5	Dana Talangan	0	0	0	0,00
	Jumlah	17.171.901.087,32	17.171.900.460,32	627	100,00
	Pembiayaan Netto	144.272.064.138,47	144.272.064.765,47	-627	100,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	182.749.867.308,28	-182.749.867.308,28	0,00

PEMERINTAH KOTA MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Periode 01 Januari 2014 - 31 Desember 2014

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	Persen %
1	PENDAPATAN	1.734.185.124.573,46	1.764.869.389.655,03	30.684.265.081,57	101,77
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	347.817.577.770,96	372.550.096.292,03	24.732.518.521,07	107,11
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	260.000.000.000,00	278.885.189.548,87	18.885.189.548,87	107,26
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	40.345.709.448,90	45.557.675.300,00	5.211.965.851,10	112,92
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.703.610.469,39	13.385.924.500,39	1.682.314.031,00	114,37
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.768.257.852,67	34.721.306.942,77	-1.046.950.909,90	97,07
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.299.435.489.802,50	1.329.108.236.363,00	29.672.746.560,50	102,28
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	951.917.225.060,50	956.695.776.132,00	4.778.551.071,50	100,5
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	72.711.327.203,50	66.740.371.266,00	-5.970.955.937,50	91,79
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39.454.012.857,00	50.203.519.866,00	10.749.507.009,00	127,25
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	808.447.825.000,00	808.447.825.000,00	0	100
1.2.1.4	Dana Alokasi khusus	31.304.060.000,00	31.304.060.000,00	0	100
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	217.906.979.000,00	217.906.979.000,00	0	100
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	217.906.979.000,00	217.906.979.000,00	0	100
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	129.611.285.742,00	154.505.481.231,00	24.894.195.489,00	119,21
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.611.285.742,00	154.505.481.231,00	24.894.195.489,00	119,21
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	86.932.057.000,00	63.211.057.000,00	-23.721.000.000,00	72,71
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.744.000.000,00	19.023.000.000,00	-23.721.000.000,00	44,5
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	44.188.057.000,00	44.188.057.000,00	0	100
	Jumlah	1.734.185.124.573,46	1.764.869.389.655,03	30.684.265.081,57	101,77

2	BELANJA	1.875.801.335.427,74	1.602.999.850.132,14	272.801.485.295,60	85,46
2.1	BELANJA OPERASI	1.430.411.062.372,74	1.284.446.205.759,14	145.964.856.613,60	89,8
2.1.1	Belanja Pegawai	961.186.383.732,82	877.246.394.701,58	83.939.989.031,24	91,27
2.1.2	Belanja Barang	414.218.572.739,92	361.001.601.091,84	53.216.971.648,08	87,15
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	46.331.682.200,00	44.148.137.497,80	2.183.544.702,20	95,29
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.010.695.000,00	1.402.739.630,00	6.607.955.370,00	17,51
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	663.728.700,00	647.332.837,92	16.395.862,08	97,53
2.1.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri				
2.2	BELANJA MODAL	443.249.234.055,00	318.462.052.422,00	124.787.181.633,00	71,85
2.2.1	Belanja Tanah	200.511.950,00	0	200.511.950,00	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	112.303.701.782,00	74.928.882.812,00	37.374.818.970,00	66,72
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	74.314.600.182,00	39.103.080.700,00	35.211.519.482,00	52,62
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	253.901.634.541,00	202.077.603.350,00	51.824.031.191,00	79,59
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	777.385.600,00	766.316.960,00	11.068.640,00	98,58
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.751.400.000,00	1.586.168.600,00	165.231.400,00	90,57
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.041.039.000,00	13.261.351,00	2.027.777.649,00	0,65
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.041.039.000,00	13.261.351,00	2.027.777.649,00	0,65
	Jumlah	1.875.701.335.427,74	1.602.921.519.532,14	272.779.815.895,60	85,46

2.4	TRANSFER	100.000.000,00	78.330.600,00	21.669.400,00	78,33
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	100.000.000,00	78.330.600,00	21.669.400,00	78,33
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	100.000.000,00	78.330.600,00	21.669.400,00	78,33
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	100.000.000,00	78.330.600,00	21.669.400,00	78,33
	Jumlah Belanja	1.875.801.335.427,74	1.602.999.850.132,14	272.801.485.295,60	85,46
	Surplus/(Defisit)	-141.616.210.854,28	161.869.539.522,89	-303.485.750.377,17	0

3	PEMBIAYAAN	141.616.210.854,28	161.116.210.854,78	-19.500.000.000,50	113,77
3.1	PENERIMAAN DAERAH	182.749.867.308,28	182.749.867.308,28	0	100
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	182.749.867.308,28	182.749.867.308,28	0	100
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0
3.1.7	Dana Talangan	0	0	0	0
	Jumlah	182.749.867.308,28	182.749.867.308,28	0	100
3.2	PENGELUARAN DAERAH	41.133.656.454,00	21.633.656.453,50	19.500.000.000,50	52,59
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	38.500.000.000,00	19.000.000.000,00	19.500.000.000,00	49,35
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.633.656.454,00	2.633.656.453,50	0,5	100
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
3.2.5	Dana Talangan	0	0	0	0
	Jumlah	41.133.656.454,00	21.633.656.453,50	19.500.000.000,50	52,59
	Pembiaayan Netto	141.616.210.854,28	161.116.210.854,78	-19.500.000.000,50	113,77
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	322.985.750.377,67	-322.985.750.377,67	#####



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Malang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Malang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Malang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 4.5.1.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Malang menyajikan Aset Tetap Peralatnya dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3,10 triliun. Atas nilai tersebut, Pemerintah Kota Malang belum menerapkan metode penyusutan Aset Tetap. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran 1 Pernyataan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Penundaan pemberlakuan penyusutan atas Aset Tetap tersebut dapat dilakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2014.


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 92.B/LHP/XVIII.SBY/05/2015 dan Nomor 92.C/LHP/XVIII.SBY/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sidoarjo, 30 April 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Yuan Candra Djaisa, S.E., M.M., Ak., C.P.A.
Akuntan, Register Negara No. D-17.170

PEMERINTAH KOTA MALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SELAKU PPKD)

Periode 01 Januari 2015 - 30 Juni 2015

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Bertambah / Berkurang		Realisasi 2014
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
01	PENDAPATAN					
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
03	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
04	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.703.610.469,39	4.547.502.918,14	7.156.107.551,25	38,86	-
06	Lain-lain PAD yang Sah	16.968.678.793,00	85.010.587.117,79	(68.041.908.324,79)	500,99	-
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	28.672.289.262,39	89.558.090.035,93	(60.885.800.773,54)	312,35	-
08						
09	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	47.966.773.000,00	16.555.968.330,00	31.410.804.670,00	34,52	-
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	64.198.567.060,50	36.053.231.458,00	28.145.335.602,50	56,16	-
13	Dana Alokasi Umum	818.758.893.000,00	477.609.335.000,00	341.149.558.000,00	58,33	-
14	Dana Alokasi khusus	581.360.000,00	174.408.000,00	406.952.000,00	30,00	-
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	931.505.593.060,50	530.392.942.788,00	401.112.650.272,50	56,94	-
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	225.802.501.000,00	50.576.088.000,00	175.226.413.000,00	22,40	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	225.802.501.000,00	50.576.088.000,00	175.226.413.000,00	22,40	-
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.611.285.742,00	68.591.757.827,00	61.019.527.915,00	52,92	-
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	25.000.000.000,00	86.536.953.000,00	(61.536.953.000,00)	346,15	-
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	154.611.285.742,00	155.128.710.827,00	(517.425.085,00)	100,33	-
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	1.311.919.379.802,50	736.097.741.615,00	575.821.638.187,50	56,11	-
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	36.000.000.000,00	11.982.000.000,00	24.018.000.000,00	33,28	-
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	36.000.000.000,00	11.982.000.000,00	24.018.000.000,00	33,28	-
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1.376.591.669.064,89	837.637.831.650,93	538.953.837.413,96	60,85	-
34						
35	BELANJA					
36	BELANJA OPERASI					
37	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
38	Belanja Barang	-	-	-	-	-
39	Bunga	-	-	-	-	-
40	Subsidi	-	-	-	-	-
41	Hibah	61.836.430.000,00	16.485.847.450,00	45.350.582.550,00	26,66	-
42	Bantuan Sosial	434.500.000,00	362.500.000,00	72.000.000,00	83,43	-
43	Bantuan Keuangan	663.728.700,00	-	663.728.700,00	-	-
44	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	62.934.658.700,00	16.848.347.450,00	46.086.311.250,00	26,77	-
45						
46	BELANJA MODAL					
47	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
48	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Bertambah / Berkurang		Realisasi 2014
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
49	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
52	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
53	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	-	-	-	-	-
54	BELANJA TAK TERDUGA					
55	Belanja Tak Terduga	2.041.039.000,00	-	2.041.039.000,00	-	-
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	2.041.039.000,00	-	2.041.039.000,00	-	-
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	64.975.697.700,00	16.848.347.450,00	48.127.350.250,00	25,93	-
58						
59	TRANSFER					
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
61	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
62	Bagi Hasil Retribusi	100.000.000,00	32.155.200,00	67.844.800,00	32,16	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	100.000.000,00	32.155.200,00	67.844.800,00	32,16	-
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	65.075.697.700,00	16.880.502.650,00	48.195.195.050,00	25,94	-
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	1.311.515.971.364,89	820.757.329.000,93	490.758.642.363,96	62,58	-
68						
69	PEMBIAYAAN					
70						
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
72	Penggunaan SILPA	128.575.084.000,00	-	128.575.084.000,00	-	-
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	128.575.084.000,00	-	128.575.084.000,00	-	-
85						
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
87	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	100,00	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Bertambah / Berkurang		Realisasi 2014
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	100,00	-
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	110.575.084.000,00	(18.000.000.000,00)	128.575.084.000,00	(16,28)	-
100						
101	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	1.422.091.055.364,89	802.757.329.000,93	619.333.726.363,96	56,45	-

Malang, 04 Agustus 2015
Kepala Daerah

PEMERINTAH KOTA MALANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Periode 01 Januari 2015 - 30 Juni 2015

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	Bertambah / Berkurang		Realisasi 2014
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
01	PENDAPATAN					
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
03	Pendapatan Pajak Daerah	270,000,000,000.00	144,670,084,148.83	125,329,915,851.17	53.58	-
04	Pendapatan Retribusi	40,345,709,448.90	17,088,366,772.00	23,257,342,676.90	42.35	-
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,703,610,469.39	4,547,502,918.14	7,156,107,551.25	38.86	-
06	Lain-lain PAD yang Sah	31,378,426,793.00	85,010,587,117.79	(53,632,160,324.79)	270.92	-
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	353,427,746,711.29	251,316,540,956.76	102,111,205,754.53	71.11	-
09	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil	47,966,773,000.00	16,555,968,330.00	31,410,804,670.00	34.52	-
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	64,198,567,060.50	36,053,231,458.00	28,145,335,602.50	56.16	-
13	Dana Alokasi Umum	818,758,893,000.00	477,609,335,000.00	341,149,558,000.00	58.33	-
14	Dana Alokasi khusus	581,360,000.00	174,408,000.00	406,952,000.00	30.00	-
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	931,505,593,060.50	530,392,942,788.00	401,112,650,272.50	56.94	-
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi	-	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	225,802,501,000.00	50,576,088,000.00	175,226,413,000.00	22.40	-
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	225,802,501,000.00	50,576,088,000.00	175,226,413,000.00	22.40	-
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil	129,611,285,742.00	68,591,757,827.00	61,019,527,915.00	52.92	-
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	25,000,000,000.00	86,536,953,000.00	(61,536,953,000.00)	346.15	-
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	154,611,285,742.00	155,128,710,827.00	(517,425,085.00)	100.33	-
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	1,311,919,379,802.50	736,097,741,615.00	575,821,638,187.50	56.11	-

28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan	36,000,000,000.00	11,982,000,000.00	24,018,000,000.00	33.28	-
30	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
31	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	36,000,000,000.00	11,982,000,000.00	24,018,000,000.00	33.28	-
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	1,701,347,126,513.79	999,396,282,571.76	701,950,843,942.03	58.74	-
34						
35	<u>BELANJA</u>					
36	BELANJA OPERASI					
37	Belanja Pegawai	989,602,611,554.79	362,626,100,433.57	626,976,511,121.22	36.64	-
38	Belanja Barang	442,920,278,013.00	123,208,728,076.26	319,711,549,936.74	27.82	-
39	Bunga	-	-	-	-	-
40	Subsidi	-	-	-	-	-
41	Hibah	61,836,430,000.00	16,485,847,450.00	45,350,582,550.00	26.66	-
42	Bantuan Sosial	434,500,000.00	362,500,000.00	72,000,000.00	83.43	-
42	Bantuan Keuangan	663,728,700.00	-	663,728,700.00	-	-
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1,495,457,548,267.79	502,683,175,959.83	992,774,372,307.96	33.61	-
44						
45	BELANJA MODAL					
46	Belanja Tanah	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	-
47	Belanja Peralatan dan Mesin	104,543,839,652.00	14,042,320,766.00	90,501,518,886.00	13.43	-
48	Belanja Gedung dan Bangunan	95,917,985,674.00	6,359,673,800.00	89,558,311,874.00	6.63	-
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110,836,968,130.00	10,129,221,132.00	100,707,746,998.00	9.14	-
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,864,037,600.00	71,747,000.00	1,792,290,600.00	3.85	-
51	Belanja Aset Lainnya	760,792,190.00	142,700,000.00	618,092,190.00	18.76	-
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	314,323,623,246.00	30,745,662,698.00	283,577,960,548.00	9.78	-
54	BELANJA TAK TERDUGA					
55	Belanja Tak Terduga	2,041,039,000.00	-	2,041,039,000.00	-	-
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	2,041,039,000.00	-	2,041,039,000.00	-	-
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1,811,822,210,513.79	533,428,838,657.83	1,278,393,371,855.96	29.44	-
59	<u>TRANSFER</u>					
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
61	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
62	Bagi Hasil Retribusi	100,000,000.00	32,155,200.00	67,844,800.00	32.16	-
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	100,000,000.00	32,155,200.00	67,844,800.00	32.16	-
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1,811,922,210,513.79	533,460,993,857.83	1,278,461,216,655.96	29.44	-
66						
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(110,575,084,000.00)	465,935,288,713.93	(576,510,372,713.93)	(421.37)	-

68						
69	PEMBIAYAAN					
70						
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
72	Penggunaan SILPA	128,575,084,000.00	322,985,750,377.67	(194,410,666,377.67)	251.20	-
73	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	128,575,084,000.00	322,985,750,377.67	(194,410,666,377.67)	251.20	-
85						
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
87	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	-	100.00	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
97	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
98	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	-	100.00	-
99	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	110,575,084,000.00	304,985,750,377.67	(194,410,666,377.67)	275.82	-
10						
10	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	-	770,921,039,091.60	(770,921,039,091.60)	-	-

JUMLAH WAJIB

No.	Nama
1	KOST PUTRI BPK. WAHYU
2	KOST PUTRI WOCIL
3	KOST PUTRI KASWONO/WOCIL
4	KOST PUTRI C. TROWULAN 70
5	KOST PUTRI WATU MUJUR 22
6	KOST PUTRA BU ENDANG I
7	KOST PUTRA BU ENDANG II
8	KOST PUTRI BU SUYATI
9	KOST PUTRA NY.ROEDJITO
10	KOST PUTRI GOFAR
11	KOST PUTRI BPK. SLAMET
12	KOST PUTRI INDRIANTO
13	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA I
14	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA II
15	KOST PUTRI HARI KUSWANTO
16	KOST PUTRA BU YOGI
17	KOST PUTRA BU YOGI 2
18	KOST PUTRI BU YOGI
19	KOST PUTRI H. SAIFUL BAHTIAR
20	KOST PUTRI CHRISTINA
21	KOST PUTRI HENY
22	KOST PUTRI GRIYASHANTA M. 519
23	KOST PUTRA HARIYANTO
24	PEMONDOKAN TAMBORA 27
25	PEMONDOKAN LOKON 20
26	PEMONDOKAN LOKON 12
27	PEMONDOKAN LOKON 19
28	KOST PUTRI BPK. EKA
29	KOST PUTRI GRIYA SHANTA L 230
30	KOST PUTRA B. HARTATI
31	KOST PUTRI BPK. SUMARDIONO
32	KOST PUTRI YUSUF ASMO I
33	KOST PUTRI YUSUF ASMO II
34	KOST PUTRA DADANG S
35	KOST "SIMPANG HOMESTAY"
36	KOST PUTRA ENDANG ENDRAWATI
37	KOST PUTRA SUKARNO (PISANG KIPAS)
38	KOST PUTRA GRIYA SHANTA EKS. P-303-B
39	KOST PUTRI SITI INDIYAH
40	KOST PUTRI BAMBANG
41	KOST PUTRA BPK. ABU BAKAR ABDULLAH
42	KOST PUTRA BPK. SYAHRANI
43	KOST PUTRI EMA
44	KOST PUTRI LEE EN
45	KOST VONNY C.
46	KOST PUTRA TITIEK SURATINI
47	KOST PUTRI TITIEK

48	KOST PUTRI DWI HARTATIK
49	KOST PUTRI BU RUDI
50	PEMONDOKAN PUTRI BU. CHRISTIANI SUTINI
51	KOST PUTRI GRIYASHANTA P. 584
52	KOST PUTRI GRIYA SHANTA M.523
53	KOST PUTRI BPK. SLAMET DJULIONO
54	KOST PUTRI I WAYAN SARKA
55	KOST PUTRI NURUL WAHYUNI
56	KOST PUTRI BPK.NUGROHO
57	KOST PUTRI SUSATYO B. YAHONO
58	KOST PUTRI BENDUNGAN SENGGURUH
59	KOST PUTRI SRI SUPRIYATI
60	KOST SUNI WIDJAYA
61	KOST PUTRI BPK. SAMSUDI
62	KOST PUTRA UMI RAHAYU
63	KOST PUTRA AHMAD ALWI
64	KOST PUTRI DIDIK WAHYUDI
65	KOST PUTRA SUSAN
66	KOST PUTRA TAMAN BOROBUDUR
67	KOST PUTRA IBU YUNINGSIH
68	KOST PUTRI dr. DJUDJUK. R.
69	KOST PUTRA GRIYA SHANTA P-299
70	KOST PUTRA GRIYA SHANTA P-297
71	KOST PUTRA BU NUR I
72	KOST PUTRA BU NUR II
73	KOST PUTRA BU NUR III
74	KOST PUTRA BU NUR IV
75	KOST PUTRI BPK. MARYONO
76	KOST. PUTRA BU HARMENI
77	KOST PUTRA BU NINIK
78	KOST PUTRA BPK. GIRANTO
79	KOST PUTRI SANTI (JL. SALATIGA)
80	KOST PUTRI BU FARIDA - I
81	KOST PUTRI BU FARIDA II
82	KOST PUTRI BU SETIARINI
83	KOST PUTRI UMI K
84	D. PARAGON
85	D' PARAGON II
86	KOST PUTRA RIFAIT
87	KOST PUTRI NOUVAL . F
88	KOST PUTRI GRIYA RUSANDY
89	KOST PUTRA BPK. ZAINUDDIN
90	KOST PUTRI BU ANNA
91	KOST PUTRA WARNI. H
92	KOST PUTRA PISANG KIPAS 65
93	KOST PUTRI A. HIDAYAT
94	KOST PUTRI B. KOPI 9
95	KOST PUTRI B.KOPI 9-A
96	KOST PUTRI MOCH. FARID IBRAHIM, ST.
97	RUMAH KOST (DR. FARHAD BALATIF)

98	KOST PUTRI FARHAD
99	KOST PUTRI KERTOSARI 6
100	KOST PUTRI C. TROWULAN 26-A
101	KOST IRENE P. H.
102	KOST PUTRI "WISMA AN-NISA"
103	KOST PUTRI SINGGIH PRIYO WARDHONO.
104	KOST PUTRI BU RENI
105	KOST PUTRA IBU IBNU
106	KOST PUTRI AISYAH
107	KOST PUTRI BU PUTU
108	KOST PUTRA/PUTRI AFRIDA
109	KOST. ARRASYID
110	KOST PUTRA ERNI
111	KOST PUTRA BPK. SLAMET P.
112	KOST PUTRA IBU HJ. HELDAWATI
113	KOST PUTRA BU SUJADI
114	KOST PUTRI SUKIJAT
115	KOST PUTRI MUNDARI, SK
116	KOST PUTRI BANI WAHID
117	KOST PUTRI RINI
118	KOST PUTRI H. BUDI
119	KOST PUTRI BU MUSTAKIM
120	KOST PUTRA PUTRI BU YONO
121	KOST PUTRA AGA
122	KOST PUTRA PAK SUNARNO
123	KOST PUTRA ENNY SUTIARSIH
124	KOST PUTRA BAWAVI TAUFIQ
125	KOST PUTRA HERISTIAWAN
126	KOST PUTRI BPK. SONY
127	KOST PUTRI A.S. HERU
128	KOST PUTRI WIROTHO
129	KOST PUTRA IBU ROHANI
130	KOST PUTRI TRI ADI
131	KOST PUTRI SURIANA
132	KOST PUTRI ERMAWATI, SH. (AMIRA)
133	KOST "GUEST HOUSE LILY"
134	KOST PUTRI WATU MUJUR I/2
135	KOST PUTRI SIGURA-GURA VI/33
136	KOST PUTRA TERS. CIKAMPEK 36
137	KOST PUTRI BU ALEX
138	RUMAH PEMONDOKAN PUTRI 51-A
139	KOST PUTRA BU WINKY
140	RUMAH KOST BAPAK MOHAMAD ROKIM
141	KOST PUTRA BPK. BAMBANG ADMADI
142	KOST PUTRI IMAM SUBEKTI
143	KOST PUTRI BPK. INDRA
144	RUMAH KOST PUTRI RANUGRATI
145	KOST PUTRA BU. SRI (RANUGRATI)
146	KOST PUTRI P. SUJADI
147	KOST PUTRA RAGIL

148	KOST PUTRA MANCU ROSIDA
149	KOST PUTRI IMAM I
150	KOST PUTRI IMAM II
151	KOST PUTRI IMAM III
152	KOST PUTRI BELAKANG KEL. SUMBERSARI
153	KOST PUTRI PRAXEDIS
154	KOST PUTRA AGUS/JIOE JAN SING
155	KOST PUTRI GRIYA SHANTA P-574
156	KOST PUTRA DINI
157	KOST PUTRI P. ERIK
158	KOST KELUARGA PAK NANANG
159	KOST PUTRI BU LIS
160	KOST PUTRA BPK. SUPRIJANTO
161	KOST PUTRA ARIE
162	KOST PUTRI SIGURA-GURA BRT. III/15
163	KOST PUTRI SINDU
164	RUMAH KOST TERS. WIJAYA KUSUMA 16
165	KOST PUTRI BUNDA LADIVA PARK
166	KOST PUTRI BPK. SIANIPAR
167	KOST PUTRA CINDERELLA
168	KOST PUTRI HJ. KAMSINAH
169	KOST PUTRI LILIK
170	KOST PUTRI PRANA
171	KOST PUTRI BENDUNGAN TANGGA 1
172	KOST PUTRI BUDHE
173	KOST dr. RAHAJENG, SPOG
174	KOST PUTRI ROBY . T
175	KOST PUTRI KERTO SENTONO 96-A
176	KOST PUTRI P. ZAINI
177	KOST PUTRI SUHERMAN
178	KOST PUTRA P. MUSTAKIM
179	KOST PUTRA BPK. SUDARTO
180	KOST PUTRI C.SRI MARYANI
181	KOST PUTRA ISTANA B. DEWANDARU 33
182	KOST PUTRA LAMBDA
183	KOST PUTRI INDA
184	KOST PUTRI YANIS
185	KOST PUTRI SUDIRMAN
186	KOST PUTRI MBAK NITA
187	KOS PUTRA B ENI
188	KOST PUTRA PUDJIATI
189	KOST PUTRI " LIMA "
190	KOST PUTRI BU BAMBANG
191	KOST PUTRI SUKAWATI / MEKAR
192	KOST PUTRI BU YAYUK
193	KOST PUTRI BAMBANG CH
194	KOST PUTRA LUDI SAR
195	KOST PUTRA SUKARNO HATTA INDAH 1/7
196	KOST PUTRI SRI RAHAJOE
197	KOST PUTRA H. ABDULLAH

198	KOST PUTRI BU RETNO
199	KOST PUTRI JOYO SUKOTIMUR I NO. 10-A
200	KOST PUTRA ROTTERDAM
201	KOST PUTRI ROSALINA
202	KOST PUTRI BPK BUDI HARSOYO
203	KOST PUTRI ABD MU'IN
204	KOST PUTRA P. IRAWAN
205	KOST PUTRI BU NINUK H.
206	KOST PUTRI RITA HALIM
207	KOST ANUGRAH
208	KOST PUTRI CICIN. R
209	KOST PUTRI 9-C
210	KOST PUTRI SINTA
211	KOST PUTRA BERKAT
212	KOST. PUTRI WATU GONG 19
213	KOST PUTRA AGUS H.W. II
214	KOST PUTRA AGUS H.W. I
215	KOST PUTRI MERTOJOYO B-1
216	KOST PUTRI LUKMAN
217	KOST PUTRI WOWOK/SUNDARI
218	KOST PUTRA WATUGONG 28
219	KOST PUTRI HARDI
220	KOST PUTRI PATRIA
221	KOST PUTRA BPK DORY
222	KOST PUTRI WINANRNO
223	RUMAH KOST
224	KOST PUTRI ARTI.S
225	KOST PUTRI IBU DEWI
226	KOST PUTRI BPK. SUNARTO
227	GRAHA ANDI PUTRI 1
228	GRAHA ANDI PUTRI 2
229	KOST PUTRI BU YANTI
230	KOST PUTRI SUGENG DWI WIBOWO
231	KOST PUTRA BPK ABD. MANAN (ANIK SAMINI)
232	KOST PUTRI BPK ZAENAL
233	KOST PUTRI SOFAN HARI
234	KOST PUTRI HERNANDANI
235	KOST PUTRI BPK. YOHANES
236	KOST PUTRI NOVITA
237	KOST PUTRI PAK MADE
238	KOST PUTRI BPK. NOVI KURNIAWAN, ST.
239	KOST PUTRI SHAFIRA
240	KOST. PUTRI PAK ASNUN
241	KOST PUTRI PAK RIFA'I
242	KOST PUTRI MONSTERA 20
243	KOST PUTRI BU S. LILA WATI
244	KOST PUTRA BP.SUDIBYO
245	KOST PUTRI BPK. SUDIBYO
246	KOST PUTRI WAHID HASYIM
247	KOST PUTRI ROSIHAN ANWAR

248	KOST PUTRI BPK. IDRUS
249	KOST PUTRI DRS. RIADI
250	KOST PUTRI IBU ARIE SABARIA
251	KOST PUTRI MADE SRI ASTITI
252	KOST PUTRA SRIYONO
253	KOST PUTRA BPK. ADI RAHARJO
254	WISMA KOPERASI MAJAPAHIT
255	KOST PUTRI SUSILOWATI
256	KOST PUTRI BU IDA
257	KOST PUTRI KERTO SENTONO 23
258	KOST PUTRI KEMBANG KERTAS KAV-I-B
259	KOST PUTRA AGUS H.
260	KOST AZ ZAHRA
261	KOST PUTRI BROTO SUSILO
262	KOST PUTRI BU NANIK NURAINI
263	KOST PUTRA LIZA
264	KOST PUTRI LADIVA PARK KAV-I
265	KOST PUTRI BU HARI
266	KOST PUTRI KEMBANG KERTAS 3-A
267	KOST PUTRI SENGGANI 6-A
268	KOST PUTRI GRIYA ASRI
269	KOST PUTRA DIAN
270	KOST PUTRI BPK. BAMBANG SUSETYO W.
271	KOST PUTRI ERKAN
272	KOST PUTRA SRI.S
273	KOST PUTRI SIHABUDIN
274	KOST PUTRI BU RUBIAH AMIR
275	KOST PUTRI BU. FARIDA
276	KOST PUTRI SANTI
277	KOST PUTRA BU. ADE
278	KOST PUTRI TAMAN INDAH SUHAT KAV-78
279	KOST PUTRA SUMI R.
280	KOST PUTRA
281	KOST PUTRI AGUS
282	KOST PUTRA BU PURI R.
283	KOST PUTRA BU BOWO
284	KOST PUTRI DIDIK RAHMAN
285	KOST PUTRI SENIYATI
286	KOST PUTRA BPK. WARID RAHMAD ILHAM
287	KOST PUTRI RAHARDIAN
288	KOST PUTRI BU RIYANTI
289	KOST PUTRI ALWIYAH
290	KOST PUTRI BU IMAM
291	KOST PUTRI YUVI
292	KOST PUTRI BU NINIK SUNARYO
293	KOST PUTRI BPK. SUNARI
294	KOST PUTRI DARMI
295	KOST PUTRI NATASYA
296	KOST PUTRI ANGGA
297	KOST PUTRA BU NIKEN/ARI

298	KOST PUTRA W K H
299	KOST PUTRI ZESTIENA
300	KOST PUTRA DARMA
301	KOST PUTRI ASIFA
302	KOST PUTRA ZAINUDIN
303	KOST PUTRI BU IDA ROSIANA
304	KOST PUTRI TONY WIJAYA
305	KOST PUTRI BU ATIK
306	KOST PUTRI BUNGA ANDONG TIMUR 23
307	KOST PUTRA "SAFAR"
308	RUMAH KOST MINA LOMA DEWI
309	KOST PUTRI DEWI ASTUTI
310	KOST PUTRI SIMUN
311	KOST PUTRI AGUS SANTOSO
312	KOST PUTRI BU BAMBANG P-310.
313	KOST PUTRI AINI FUADIAH
314	KOST PUTRI MARGARET
315	KOST PUTRA ERICH ADHENANTHERA.H
316	KOST PUTRI B. NURIL
317	KOST PUTRA FIDIARTA
318	KOST PUTRA BPK GANDUNG (DRIMANAN)
319	KOST PUTRI LINDA
320	KOST PUTRI BPK. NOVAN
321	KOST PUTRA WILLY
322	KOST PUTRI SADAH NINGSIH
323	KOST PUTRI BIDADARI I
324	KOST PUTRI BIDADARI II
325	KOST PUTRI SOEWARTO
326	KOST PUTRA M. KHOIRUDIN
327	KOST PUTRI WARDOYO
328	KOST PUTRA H. SUGIONO
329	KOST PUTRI ISMI KARIMA
330	KOST PUTRI KEDUNGOMBO 5
331	KOST PUTRI KAKTUS 6-A
332	KOST PUTRI NUNUK
333	KOST PUTRI GRIYA SHANTA M-524
334	KOST PUTRI RILLIA
335	KOST PUTRI BU INDAH II
336	KOST PUTRI BU INDAH I
337	KOST PUTRI BU LULUK SASTRO
338	KOST PUTRI SLAMET ANDI W.
339	KOST PUTRI HARTONO S.
340	KOST PUTRI PRATIWI
341	KOST PUTRI BPK. SOEWARDI
342	KOST PUTRI SUYITNO
343	KOST PUTRA KEMBANG KERTAS IV/N-2-A
344	KOST PUTRI INDAH (JATI LUHUR)
345	KOST BU DARWIN
346	KOST PUTRI BPK. SOETEDJO,DRS
347	KOST PUTRI BU SRI SAYUTI

348	KOST PUTRI JATILUHUR
349	KOST PUTRA BPK. MISBAHUL
350	KOST PUTRA BPK. WIHARJONO
351	KOST PUTRI MBAK RIZKA
352	KOST PUTRI BU ANITA
353	KOST PUTRI HJ. SURYATI
354	KOST. PUTRI SUTAMAN
355	KOST PUTRI BPK. DJANALIS
356	KOST PUTRI BENING 57
357	KOST PUTRI BINTARI
358	KOST IBU FIFIN DESFITA
359	KOST PUTRI BU ANING
360	KOST PUTRI CHOKKY
361	KOST PUTRI BPK. BARJI I
362	KOST PUTRI BPK. BARJI II
363	KOST PUTRI SYAHRUL AINI
364	KOST PUTRI S K D
365	KOST PUTRI BPK. KRISNA
366	KOST PUTRI BU NINE
367	KOST PUTRI SUMUR B1-10
368	KOST PUTRI 0669
369	KOST PUTRI RADIUS EKO
370	KOST PUTRI BPK. BUDI
371	KOST PUTRI CHUSHIN
372	KOST PUTRA AGUS.S
373	KOST PUTRA SAMSUL HADI
374	KOST PUTRA WASITO
375	KOST PUTRA SATIMAN
376	KOST PUTRA SRI UTAMI
377	KOST PUTRA BUDIONO
378	KOST PUTRA HANDIK P.
379	KOST PUTRA BPK. ARDIANTO
380	KOST PUTRA SOEPADI, SH.
381	RUMAH KOST IBU MANULANG
382	IN THE KOST SEMANGGI BRT. 2-B
383	KOST PUTRI HAMID SHOLEH
384	KOST PUTRI LA WANTI
385	KOST PUTRI WIJAYANTO
386	KOST PUTRI BENING 37
387	KOST PUTRI BU ANI
388	KOST PUTRI BU ASNUN
389	KOST PUTRI BU. NANIK
390	KOST PUTRA DIANDIKA
391	KOST PUTRI BPK HILAL HAMID
392	KOST PUTRI PAK ARIAWAN
393	KOST PUTRI BU.RATNA
394	KOST PUTRI HJ. SUHARTINI
395	KOST PUTRI NURUL KISWATI D.U.
396	KOST PUTRI BPK. WIDYAN MURSIANTO
397	KOST PUTRI NUZUL

398	KOST SULKAN ARIF
399	KOST PUTRA P. TJAKOEP
400	KOST PUTRI TRISAGA
401	KOST SUMARMI
402	KOST PUTRA BPK. SIGIT
403	KOST PUTRA ARIFIN
404	KOST PUTRA KOESWADI
405	KOST PUTRA MERTOJOYO A-NO. 4
406	KOST PUTRA P. DJAMIL
407	KOST PUTRI RIAM KANAN
408	KOST PUTRI BPK. ROCHIM
409	KOST PUTRA MUSAFFA
410	KOST PUTRI AGUSTINA
411	KOST. PUTRI BU AGUSTIMAR
412	KOST PUTRI LISTIAWATI
413	KOST PUTRI WATUGONG 17
414	KOST PUTRI SULIAH
415	KOST PUTRI RUDI RUSDIANTO
416	KOST PUTRI BU HANAH
417	KOST PUTRI MARIANA
418	KOST PUTRI IMAM
419	KOST PUTRI VERRA
420	KOST PUTRI BU SRI GIATMIATI
421	KOST PUTRI DIAH
422	KOST PUTRI MOCH.SA' I
423	KOST PUTRI BU ELIS
424	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA I
425	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA II
426	KOST PUTRI SLAMET RIYADI
427	RUMAH SINGGAH

B PAJAK RUMAH KOS TAHUN 2014

Alamat	NPWPD
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT GG.I NO. 14	0862.65.221
JL. BUNGA ANDONG NO.3 F MALANG	0732.62.221
JL.BUNGA ANDONG KAV 3 MALANG	0733.65.221
JL. CANDI TROWULAN 70 MLG	0695.65.221
JL. WATU MUJUR 22 MALANG	0988.65.221
JL. BENDUNGAN SEMPOR 12 MALANG	0839.65.221
JL. BEND. RIAMKANAN C- 4 MALANG	0838.65.221
JL. BEND. SUTAMI NO. 1	0782.65.221
JL. WATU GONG 29	0990.65.221
JL. A. YANI UTARA GG. DELIMA 496	0721.61.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI GOLDEN HOUSE KAV 4	0835.65.221
JL. BENDUNGAN WIDAS L;INTANG NO. 17-A	0952.65.221
JL. KERTO ASRI NO. 116	0991.65.221
JL. WATU MUJUR I/10	0992.65.221
JL. BEND SIGURA-GURA II/A.I	0851.65.221
JL. DEWANDARU 99 MALANG	0996.65.221
JL. PUNCAK CENGKEH NO 15 MALANG	0995.65.221
JL. PUNCAK CENGKEH 11	0997.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA 8	0948.65.221
JL. PANDEGLANG DLM. 3	1734.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK 14/15	1731.62.221
PERUM GRIYA SHANTA M519 MALANG	0664.65.221
JL. CANDI MENDUT NO. 6	0999.65.221
JL. TAMBORA 27	0396.64.221
JL. LOKON 20	0395.64.221
JL. LOKON 12	0394.64.221
JL. LOKON 19	0393.64.221
JL. ANDONG BARAT NO. 15	0884.65.221
PERUM GRIYA SHANTA L 230 MALANG	0938.65.221
JL. JAGUNG SUPRAPTO IB/160	1724.62.221
JL. SUMBERSARI IV/ 227 B	0916.65.221
JL. ANDONG BARAT KAV-4	0903.65.221
JL. ANDONG BARAT KAV-21	0904.65.221
JL. SIGURA-GURA BARAT I/9	0400.64.221
JL.SIMPANG BOROBUDUR	0959.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/6 MALANG	0741.65.221
JL. PISANG KIPAS NO. 72	0957.65.221
JL. GRIYA SHANTA EKS-BLPK P-303 B	0708.65.221
JL.MAYJEN PANJAITAN GG. 19/ 51	1749.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV 11-A	1730.62.221
JL. BENDUNGAN WADAS LINTANG 18	0967.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/25	0934.65.221
JL. CANDI PANGGUNG NO. 64 KAV-14	0831.65.221
JL. CANDI TROWULAN 38	0677.65.221
JL. SIMPANG BOROBUDUR 46	0658.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV 18-A	1746.62.221
JL.TERUS.CIKAMPEK KAV.45	1743.62.221

JL. TERS. CIKAMPEK KAV -7	1755.62.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/64	0973.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-12-B	1786.62.221
GRIYA SHANTA P. 584 MALANG	0665.65.221
JL. GRIYASHANTA M-523	0666.65.221
JL. PINANG MERAH 23	0953.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI 36	0878.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 33	0879.65.221
JL. TERUSAN BEND. WONOGIRI 12 MALANG	0863.65.221
JL. BEND. RIAM KANAN A-1	0881.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH NO. 21-A	0932.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR NO. 8-A	0780.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 2-A	0674.65.221
JL. GRIYASHANTA M-321 MALANG	0672.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA 7	0913.65.221
JL. WIDURI 16 MALANG	0799.65.221
JL. BEND. SENGGURUH 23 MALANG	0853.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 39 MLG.	00689.61.221
JL. TAMAN BOROBUDUR UTR. NO. 8	0651.65.221
JL. SUNAN MURIA NO. 2	0911.65.221
JL. PATIMURA NO. 28	1738.62.221
GRIYA SHANTA P-299 MALANG	0705.65.221
JL. GRIYA SHANTA P-297	0703.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH 7	0855.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 7-C	0856.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH 7-E	0857.65.221
PERUM GRIYASHANTA A-100	0858.65.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/NO. 63	0986.65.221
JL. KARET 8	0847.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA NO. 613 F	0976.65.221
JL. BENDUNGAN DARMA NO. 1	0964.65.221
JL. SALATIGA 10	0956.65.221
JL. PINANG MERAH I NO. 4	0872.65.221
JL. PINANG MERAH KAV- 9	0873.65.221
JL. PINANG MERAH KAV- 6	0871.65.221
JL. SEMANGGI TMR NO 9 C MALANG	0745.65.221
JL. BARENG LAMBAU 883	1680.62.221
JL. BUKIT DIENG KAV-H.1	0398.64.221
JL. TERS WIJAYA KUSUMA ATAS NO 24 - 26 MLG	0734.65.221
JL. WIDURI NO. 9 MALANG	0821.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/62	0901.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA 10-B	0840.65.221
JL. TERUSAN CIKAMPEK NO. 24	1804.62.221
JL. NUSA INDAH NO. 69 MALANG	0743.65.221
JL. PISANG KIPAS 65 MLG.	0685.65.221
JL. KOPI 8 MALANG	0656.65.221
JL. BUNGA KOPI NO. 9	0663.65.221
JL. BUNGA KOPI 9-A	0662.65.221
JL. WATUMUJUR II/26 MALANG	0678.65.221
JL. BEND.SIGURA-GURA NO. 19-A	0646.65.221

JL. BEND. SIGURA-GURA 8	0729.65.221
JL. KERTOSARI NO. 6	0730.65.221
JL. CANDI TROWULAN 26-A MLG.	0696.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 45	0659.65.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 24	0832.65.221
JL. BUNGA ANYELIR NO. 8	0850.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 7	0943.65.221
PONDOK ALAM SIGURA-GURA A3/13	0386.64.221
SUKARNO HATTA PTP- I PERUM LADIVA PARK KAV-2	0889.65.221
JL. KEDUNG OMBO 6	1704.62.221
JL. D. TONDANO RAYA F4-A-14 MALANG	0239.63.221
JL.GRESIK 06 MALANG	1778.62.221
JL. SEMANGGI TIMUR NC	0725.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 39-B	0389.64.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT I/12	0951.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT I/7	0388.64.221
JL. BUNGA ANDONG NO. 17	0969.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA 3-B	0950.65.221
JL. SIMPANG SUNAN KALIJAGA 11	1003.65.221
JL. VETERAN II KAV 37	1741.62.221
JL. SANAN GANG I-A NO. 28	0707.61.221
JL. SANAN GG. I-A/NO. 26 MALANG	0706.61.221
JL. SANAN GG. I -A NO. 33	0705.61.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO 11	0891.65.221
JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 17	0830.65.221
JL. BEND. SENGGURUH 35 & 37 MALANG	0846.65.221
JL. SUNAN AMPEL I/ NO. 2	0849.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN WONOGIRI 4-A	0892.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 5	0836.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 9	0935.65.221
JL. CANDI II-A / 470 KARANG BESUKI	0385.64.221
JL. BEND. WADAS LINTANG 19	0908.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 39	0877.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 25	0841.65.221
JL. TERS. WONOGIRI KAV 5/6	0888.65.221
JL. PASAR BESAR A24. KAV. 22,23, 24	1800.62.221
JL. WATU MUJUR I/2	0710.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/33	0749.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 36 MALANG	1717.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK 38	1733.62.221
JL. SIGURA-GURA NO. 51-A	0739.65.221
PONDOK ALAM SIGURA-GURA A3-NO.9	0392.64.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/ NO. 5	0671.65.221
JL. TERS. CANDI MENDUT 3-B	0893.65.221
JL. AKORDION BRT/PERUM BUMI PALAPA H-1	0693.65.221
JL. KEDUNG OMBO 2	0936.65.221
JL. RANUGRATI NO. 30	0250.63.221
JL. RANUGRATI 28	0251.63.221
JL. PEKALONGAN 6-A	1753.62.221
JL. PEKALONGAN 2-C	1739.62.221

JL. ANDONG SELATAN 31	0947.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA V/NO. 9-A	0828.65.221
JL. TERS. SIMP. SIGURA-GURA I/8	0829.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 8	0946.65.221
JL. SIGURA - GURA VI/31-A	0689.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR NO. 36	0791.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 65	0759.65.221
JL. GRIYASHANTA P-574 MLG.	0702.65.221
JL. BENDUNGAN DHARMA 27 MALANG	0955.65.221
JL. WATU GONG NO. 4	1006.65.221
JL. KENDALSARI I/73	1005.65.221
JL. BUNGA MERAK NO.20	1007.65.221
JL. PINANG MERAH KAV 10	0978.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA V/5C MALANG	0833.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT III/15	0870.65.221
JL.SEMANGGI TIMUR 14A MALANG	0752.65.221
JL. TERS. WIJAYA KUSUMA NO. 16	0679.65.221
JL. SOEKARNO HATTA - MALANG	0819.65.221
JL. BENDUNGAN WADAS LINTANG NO.4	0907.65.221
JL. HASANUDIN NO. 05	1723.62.221
JL. SUMBERSARI IV/225	0865.65.221
JL. WATU GONG NO. 8	1009.65.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR 27	0984.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 1	1010.65.221
JL. TERUSAN AMBARAWA 36	1011.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 19	0867.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 11 MALANG	1757.62.221
JL. KERTOSENTONO 96-A	1012.65.221
JL. WATU MUJUR I/1 MALANG	0676.65.221
JL. BUNGA ANDONG SELATAN KAV-37	1013.65.221
JL. MEGAMENDUNG 23	0390.64.221
JL. BANTARAN V/44	0868.65.221
JL.CANDI KALASAN 39 MALANG	0712.61.221
ISTANA B. DEWANDARU NO. 33	0718.65.221
JL. PISANG KIPAS 67	0929.65.221
JL. SEMANGGI TIMUR 9	0735.65.221
JL. SIMPANG KEPUH NO. 22-C	0401.64.221
JL. TERS CIKAMPEK NO. 31	1732.62.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT II/8	0962.65.221
JL. VINOLIA NO 3 - A MALANG	0744.65.221
JL. CANDI TELAGAWANGI 87	1015.65.221
JL. SUKARNO HATTA PTP I NO. 5	0931.65.221
JL. SIMPANG IJEN BLOK A-NO. 28	1782.62.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO NO. 1	0875.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 24-A	0883.65.221
JL.BATUJAJAR 14 MALANG	1781.62.221
JL. SUNAN MURIA BLOCK C-2	0827.65.221
JL. SUKARNO HATTA INDAH 1 NO 7 MALANG	0728.65.221
JL. PINANGSIA NO. 2	0880.65.221
JL. BUNGA KOPI 15 MALANG	0768.65.221

JL. JOYOSUKO TIMUR GG.I NO. 8-B MLG.	0754.65.221
JL. JOYOSUKO TIMUR I/ 10-A	0717.65.221
JL. KEDIRI 4 MALANG	1789.62.221
JL. BENDUNGAN WLINGI NO. 15	0848.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT III/20	0387.64.221
JL. WATU GONG 17-E	1004.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR NO. 3	0790.65.221
JL. CANDI WARINGIN 10 MALANG	0825.65.221
JL. CANDI AGUNG III/NO. 18	0902.65.221
JL. SIMPANG BOROBUDUR 29	0673.65.221
JL. CANDI TROWULAN 47 MLG	0694.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/9-C	0826.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/17	1019.65.221
JL. CANDI TROWULAN 40	1020.65.221
JL. WATU GONG 19 MALANG	0937.65.221
JL. SUDIMORO 20 MALANG	0810.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR TENGAH NO. 11 MLG.	0809.65.221
JL. MERTIJOYO B-01	0716.65.221
JL. CANDI JOLOTUNDO BLOK E-729	0793.65.221
JL. PEKALONGAN 6-C	1713.62.221
JL. WATUGONG 28 MALANG	1021.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA I NO. 1	0917.65.221
JL. SIGURA-GURA I NO. 3	0910.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN WONOGIRI 23	0885.65.221
JL. KERTOSENTONO2/05 MALANG	1711.62.221
JL. PISANG KIPAS NO. 10	0668.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I KAV-4F	0778.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH KAV-9 BLOK I	1022.65.221
JL. WATUGONG 35	1023.65.221
JL. WATUMUJUR I/15	1721.62.221
JL. TERS CIKAMPEK 32	1722.62.221
JL. JOYOSUKO METRO NO. 41 J	0814.65.221
JL. JOYO SUKO METRO III/9	0808.65.221
JL. BENDUNGAN BENING 55 MALANG	0886.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR NO. 24	0882.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 9 KAV-67	1026.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 9 KAV-64	1025.65.221
JL. BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 10 KAV-61	1024.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/14-B	1027.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK I/23	1028.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK NO. 46	1729.62.221
JL. KEBEN II B NO. 11	0403.64.221
JL. WATU GONG 15C	1029.65.221
JL. WATUGONG NO. 16	1031.65.221
JL. MONSTERA NO. 20	0697.65.221
JL. SIMPANG SUNAN KALIJAGA 1 NO. 16	1030.65.221
JL.SOEKARNO HATTA INDAH I/03	0712.65.221
JL. BUNGA KOPI 14 MALANG	0684.65.221
JL. WAHID HASYIM IV/RT.02 RW. 06	1715.62.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA VI/33-A	0844.65.221

JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 57	0795.65.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/ NO. 62-C	0843.65.221
JL. KERTOPAMUJI NO. 71	0924.65.221
JL.BEND.SIGURA2 KAV07/08	0750.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 11	0949.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 14	0942.65.221
JL. IJEN NO. 94 MALANG	1761.62.221
JL. CANDI PANGGUNG PERMAI NO. 41	0803.65.221
JL. TERS. AMBARAWA 55 RT.3/RW.5 SUMBERSARI	1036.65.221
JL. KERTOSENTONO 23	0687.65.221
JL. KEMBANG KERTAS KAV- I-B	0688.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 52 RT.4/RW.7	1037.65.221
PERUM LADIVA PARK PTP I KAV-4	0909.65.221
JL. BENDUNGAN JATI LUHUR 4	0837.65.221
JL. ANDONG TIMUR NO. 6-A RT.6/RW.2	1032.65.221
JL. MONDO KAKI 23 MALANG	0797.65.221
JL. SUKARNO HATTA PERUM PTP I	0982.65.221
JL. SIMPANG IJEN BLOK A-29	1790.62.221
JL. KEMBANG KERTAS 3-A	0699.65.221
JL. SENGGANI NO. 6-A	0698.65.221
JL. SUKARNO HATTA PTP II NO. 19	0842.65.221
JL. KAKTUS NO. 12 MALANG	0740.65.221
JL. PINANG MERAH KAV-14	0912.65.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR NO. 4-A	0693.61.221
JL. ASTER NO. 5	0800.65.221
JL. WATU GONG NO. 42	1038.65.221
JL. JOMBANG NO. 1	1792.62.221
JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 56-B	0794.65.221
JL. TERS CIKAMPEK KAV-3	1754.62.221
JL. SIGURA-GURA I KAV-15	0772.65.221
TAMAN SUHAT INDAH KAV-78	0700.65.221
JL. TLOGOMAS 15-A NO. 5	1046.65.221
JL. KEMBANG KERTAS KAV-17 NO. 4	0670.65.221
JL. PEKALONGAN NO. 1	1740.62.221
JL. PINANGSIA 27 MALANG	0798.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/16	0896.65.221
JL. JOYO SUKO NO.1-A	1039.65.221
JL. CANDI WARINGIN NO. 8	0820.65.221
JL. CANDI MENDUT NO. 17	0869.65.221
JL. BUNGA MERAK I KAV-14	0923.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA 612-C	0975.65.221
JL. CANDI TROWULAN 44	0649.65.221
JL. BUNGA ANDONG NO. 9	0940.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV- 26	1736.62.221
JL. WATU GONG 15-F	1055.65.221
JL. TLOGOMAS GG.15-C/15B	1056.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS XV-C/15-A	1054.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 7/112	1058.65.221
JL. TLOGOMAS XV-C/18	1061.65.221
JL.JOYO SUKO TMR I/80	0753.65.221

JL. MT. HARYONO 210-A	1062.65.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 6	0968.65.221
JL. BENDUNGAN DARMA NO. 6	1063.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS GG.XV/14-A	1064.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 15	0906.65.221
JL. ANDONG SELATAN 3	0983.65.221
JL.MT. HARYONO RT. 03/RW. 04 KAV.A	0796.65.221
JL. TERUSAN SURABAYA 24-A	1805.62.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR 23	0980.65.221
JL. SIMBAR MENJANGAN 37-A	0766.65.221
JL. BOROBUDUR UTARA 4	0660.65.221
JL. JUNGGO 16 MALANG	0958.65.221
JL. JOYO RAHARJO 281	1080.65.221
JL. TERS WONOGIRI KAV 4 / NO. 5	0834.65.221
PERUM GRIYASHANTA P-310 - 311	0801.65.221
JL. TERS CIKAMPEK NO. 8	1728.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK 10- B	1742.62.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH NO. 18	1089.65.221
JL. JOMBANG GG.I NO. 9 MALANG	1769.62.221
JL. WIJAYA KUSUMA ATAS 28	0690.65.221
JL. BENDUNGAN BATU JAHE KAV-9	0887.65.221
JL. SONGGOLANGIT 48-B	0727.65.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO NO.4	0966.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 17-A MALANG	1744.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-16 MALANG	1745.62.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT 3 /14	0860.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT III/20	0861.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI NO. 07	1105.65.221
JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 62	0792.65.221
JL. TERS. SIGURA-GURA NO.4	0845.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA NO. 18	1107.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 35	1106.65.221
JL. KEDUNGOMBO 5 MALANG	0972.65.221
JL. BUNGA KAKTUS 6-A MALANG	0701.65.221
JL. MEGA MENDUNG 21	0931.64.221
GRIYA SHANTA M-524	0704.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/ NO. 9	1109.65.221
JL. BEND. BATU JAHE NO. 3	0921.65.221
JL. BEND. BATU JAHE NO. 5	0920.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/23-B	1114.65.221
JL. BENDUNGAN RIAM KANAN NO. 3	0876.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-2 MALANG	1747.62.221
JL. WATU GONG 26 MALANG	1124.65.221
JL. WATU GONG 17-B	1125.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV- 25	1737.62.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/ N.2-A MLG.	0756.65.221
JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 28	1129.65.221
JL. BEND. WONOGIRI NO. 6	0742.65.221
JL. KEDUNG OMBO NO. 4	1132.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI 5	0775.65.221

JL. BENDUNGAN JATILUHUR 35	1134.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA 53	1136.65.221
JL. GRESIK NO. 1-A	1835.62.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 49	1144.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR 12	0933.65.221
JL. JEMBER NO. 5 MALANG	1841.65.221
JL.PERUM BUKIT CEMARA TUJUH BLOK V/108	1153.65.221
JL. PINANG MERAH 15/ KAV- 12-A	0898.65.221
JL. BENDUNGAN BENING 57	0895.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 5- B	0939.65.221
JL. SUNAN KALIJOGO DALAM 9-A	0804.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA 27	0941.65.221
JL. SUNAN MURIA GG I/ KAV-4	0866.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM NO. 18	0812.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DLM 10 B MALANG	0813.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM NO. 6	0965.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 17	0945.65.221
JL. BUNGA MERAK I NO. 21	0922.65.221
JL. BUNGA MERAK I KAV-22	0918.65.221
JL. SUNAN MURIA IV/ B1-NO. 10 MALANG	0970.65.221
JL. KEMBANG KERTAS A-12	0669.65.221
JL. CANDI TROWULAN 27	0709.65.221
PERUM BUMI PALAPA E-30	0691.65.221
JL. SEMANGGI BARAT 6	0771.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BLOK IA NO. 3-D	0738.65.221
JL. SENGGANI 26 MALANG	0769.65.221
JL. KEMBANG KERTAS NO. 24	0758.65.221
JL. SIMBAR MENJANGAN NO. 20	0765.65.221
JL. KEMBANG TURI NO. 18 - C	0773.65.221
JL. REMUJUNG RT.02 RW.IV	0762.65.221
JL. KEMBANG TURI 26 MLG.	0761.65.221
JL. KUMIS KUCING NO. 16	0944.65.221
JL. SEMANGGI TIMUR NO. 11-A	0930.65.221
JL. WATUGONG NO. 15-A	0654.65.221
JL. SEMANGGI BARAT 2-B MALANG	0785.65.221
JL. JOYO UTOMO NO. 1	0963.65.221
JL. KARET NO. 2	0914.65.221
JL. PINANG MERAH KAV-17 MALANG	0981.65.221
JL. BEND. BENING 37	0974.65.221
JL. BENDUNGAN PULOSARI NO. 7	0399.64.221
JL. BUNGA ANDONG KAV-5	1001.65.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/226-C	0919.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I NO. 9-A MLG.	0774.65.221
JL. BENDUNGAN SENGSGURUH 16	0890.65.221
JL. TANGERANG NO. 6	0979.65.221
JL. BEND SIGURA-GURA 30A/B MALANG	0864.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 20	0755.65.221
JL. MAGELANG NO. 5	0722.65.221
JL. BENDUANGAN RIAM KANAN C-6	0894.65.221
JL. BEND.SIGURA-GURA KAV-6	0748.65.221

JL. REMUJUNG 22-A MALANG	0763.65.221
JL. KEMBANG KERTAS NO. 13 MALANG	0719.65.221
JL. MT. HARYONO NO. 35	0852.65.221
JL. KEMBANG TURI 26 MALANG	0764.65.221
JL. KEMBANG KERTAS 17	0683.65.221
JL. SOEKARNO HATTA INDAH I NO. 15	0776.65.221
JL. TERS. WIJAYA KUSUMA ATAS 21	0721.65.221
JL. MERTOJOYO BLOK A-4	0715.65.221
JL. KEMBANG KERTAS NO. 25	0720.65.221
JL. BENDUNGAN RIAM KANAN B2	1168.65.221
JL. TRUNOJOYO NO. 34	1807.62.221
JL.SUKARNO HATTA 11 MALANG	0971.65.221
JL. SIMP. SEMANGGI TIMUR NO. 10	0784.65.221
JL.PINANG MERAH I/KAV.3	0779.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I KAV-9 MALANG	0777.65.221
JL. WATUGONG NO. 17 MALANG	0667.65.221
JL. B. VINOLIA GG.7 NO. 5	0692.65.221
JL. KEMBANG TURI 21	0770.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-I-A	1787.62.221
JL. GRIYASHANTA EXCECUTIVE M-526	0757.65.221
JL. BUNGA PINANG MERAH I NO.6	0731.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-2-A MALANG	1748.62.221
JL. BELAKANG RSUD NO. 11 MALANG	1784.62.221
JL. JOMBANG GG. III/18 MALANG	1776.62.221
JL. KEMBANG TURI 18 MLG.	0760.65.221
TLOGOMAS GG.15-A/12	1191.65.221
JL. KERTO ASRI NO. 116	0991.65.221
JL. WATU MUJUR I/10	0992.65.221
JL. SENGGANI 40 MALANG	0788.65.221
JL. RAYA SAWOJAJAR 14 A	0246.63.221

JUMLAH W/

No.	Nama
1	KOST PUTRA BU ENDANG II
2	KOST PUTRA BU ENDANG I
3	KOST PUTRA CITRA
4	KOST PUTRI BU TIO
5	KOST PUTRI WATUGONG 17
6	KOST PUTRA HARIYANTO
7	kos putri bpk faizal
8	KOST PUTRA MAHASISWA
9	KOST PUTRI H. EKO TJAHYONO
10	KOST PUTRI SAFA BORDING HOUSE
11	KOST PUTRI BPK. DJANALIS
12	KOST PUTRI S K D
13	RUMAH KOST MINA LOMA DEWI
14	KOST PUTRI TRISAGA
15	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA I
16	KOST PUTRI BPK. MAS'UDY HANA II
17	KOST PUTRI PAK MADE
18	KOST PUTRA HJ. SYAHRI
19	KOST PUTRA PUJI HARIWATI
20	KOST PUTRI P ZAIN
21	KOST PUTRA ENDANG ENDRAWATI
22	KOST PUTRA SUKARNO (PISANG KIPAS)
23	KOST PUTRI ANDIK
24	KOST PUTRI DWI HARTATIK
25	KOST PUTRA NY.ROEDJITO
26	KOST PUTRI RAHARDIAN
27	KOST PUTRI LILIK/KERTOREJO
28	KOST PUTRI BUDHE
29	KOST PUTRI BU WIDA
30	KOST PUTRI "DITA"
31	KOST PUTRI ALI MANAN
32	KOST PUTRI HARDI
33	KOST PUTRA BAPAK SUWITO/JUMAKYAH
34	KOST PUTRI IBU SUTANTO
35	KOST PUTRI SUKIJAT
36	KOST PUTRA IDA LATINAH
37	KOST PUTRI NURUL WAHYUNI
38	KOST PUTRI I WAYAN SARKA
39	KOST PUTRI "COSZ PINK BAROKAH"
40	KOST PUTRA SATIMAN
41	KOST PUTRI PATRIA
42	KOST PUTRI JENIK
43	KOST PUTRI BU SRI HARWATI
44	KOST PUTRI JATILUHUR
45	KOST PUTRA BPK. SLAMET P.
46	KOST PUTRI SUDJITO
47	KOST PUTRA ISRO'

48	KOST PUTRI SITI INDIYAH
49	KOST PUTRI PUJI ASTUTIK
50	KOST PUTRI SIDABUTAR - I
51	KOST PUTRI SIDABUTAR II
52	KOST PUTRI ANUNG NUGROHO
53	KOST PUTRI HENY
54	KOST PUTRI CHRISTINA
55	KOST PUTRI SANTI (JL. SALATIGA)
56	RUMAH KOST PUTRI PONTJORINI
57	KOST PUTRA SOFTWAN
58	KOST PUTRA BU ENDANG 1 (SIGURA-GURA)
59	KOST PUTRA WATUGONG 28
60	KOST PUTRI C. TROWULAN 70
61	KOST PUTRI LILIK
62	KOST PUTRI BENDUNGAN WONOGIRI 4
63	KOST PUTRI KAYUTANGAN
64	PEMONDOKAN PUTRI BU. CHRISTIANI SUTINI
65	KOST PUTRI D & G
66	KOST PUTRI AHMAD WIJAYA
67	KOST PUTRI EDI KUSDARINI
68	KOST PUTRI GRIYA SHANTA M.523
69	KOST PUTRI GRIYASHANTA P. 584
70	KOST PUTRI BU ANI
71	KOST PUTRI BINTARI
72	KOST PUTRI BPK. SLAMET DJULIONO
73	KOST PUTRI "DEWI"
74	KOST PUTRA R.R. ENNY
75	KOST PUTRI RAFLESIA
76	KOST PUTRI BPK. SAMSUDI
77	KOST PUTRI BU BAMBANG P-310.
78	KOST PUTRI ANDI YUDHA ASMARAH
79	KOST PUTRI MUSLIM IBU SITI KHOLIFAH
80	KOST PUTRI HAYATUL MALA
81	KOST PUTRA BPK.MACHMUD
82	KOST PUTRI BPK. RIYANTO
83	KOST PUTRI BPK. SUMARDIONO
84	KOST PUTRA BU. SRI (RANUGRATI)
85	KOST PUTRA BPK. SUPRIJANTO
86	KOST PUTRA ARIE
87	KOST PUTRI P. ERIK
88	KOST PUTRI ROBY . T
89	KOST PUTRI BU LINDA 2
90	KOST PUTRI BU LINDA 1
91	KOST PUTRI "INDAH"
92	PEMONDOKAN LOKON 19
93	PEMONDOKAN LOKON 12
94	PEMONDOKAN LOKON 20
95	PEMONDOKAN TAMBORA 27
96	KOST VONNY C.
97	KOST PUTRI 81

98	KOST PUTRI BPK.YAKUB
99	KOST PUTRI BPK BUDI HARSOYO
100	KOST PUTRA DINI
101	KOST PUTRI P. PAULUS I
102	KOST PUTRI P. PAULUS 2
103	KOST PUTRA B.ENDANG
104	KOST PUTRI GRIYA DWI SEPTIANA
105	KOST PUTRI MUSLIM SOEMARWANTO
106	KOST PUTRI WINANRNO
107	KOST PUTRI BU KETUT
108	WISMA KOPERASI MAJAPAHIT
109	KOST PUTRA P TARYONO
110	KOST PUTRA BPK. MOCH. SALEH
111	KOST PUTRA ISTANA B. DEWANDARU 33
112	KOST PUTRI UMI K
113	KOST PUTRI BPK. TEGUH
114	KOST PUTRI BU ERNA
115	KOST PUTRA "JAYADIPA"
116	KOST PUTRA SUKARNO HATTA INDAH 1/7
117	KOST PUTRI BU SUYATI
118	KOST PUTRI SINGGIH PRIYO WARDHONO.
119	KOST PUTRI BU RENI
120	KOST PUTRI WISMA BHAKTI (P. TOYIB)
121	KOST PUTRA BU. ADE
122	KOST PUTRI ADYAR SUMAKTO
123	KOST PUTRI "WISMA AN-NISA"
124	KOST PUTRI HJ. KAMSINAH
125	RUMAH KOST PUTRA TJONI
126	KOST PUTRI BANI WAHID
127	KOST PUTRI H. SAIFUL BAHTIAR
128	KOST PUTRI P. KHOIRUL
129	KOST PUTRA BP.SUDIBYO
130	KOST PUTRI BPK. SUDIBYO
131	AZA KOST PUTRI
132	KOST PUTRI "DEVANA KOST"
133	KOST PUTRA PERMATA 79
134	KOST PUTRI BUNDA LADIVA PARK
135	KOST PUTRI "CLARISSA"
136	KOST PUTRI BPK. BAMBANG SUSETYO W.
137	KOST AZ ZAHRA
138	KOST PUTRA BPK. SYAHRANI
139	KOST PUTRI YUSUP A.WIJAYA
140	KOST PUTRI BU BAMBANG
141	KOST PUTRI SIGURA CANTIK
142	KOST PUTRI SIGURA-GURA BRT. III/15
143	KOST PUTRI SINDU
144	KOST PUTRA SRIYONO
145	KOST PUTRA BPK. ADI RAHARJO
146	RUMAH KOST PUTRI "RADYA"
147	KOST PUTRI SIHABUDIN

148	KOST PUTRA CINDERELLA
149	KOST PUTRI GANIZ
150	KOST PUTRI YUVI
151	KOST PUTRI BAMBANG
152	KOST. ARRASYID
153	KOST PUTRI BU RUDI
154	KOST PUTRA ERDIANTO SIGIT
155	KOST PUTRI PURI KHARISMA
156	KOST "SIMPANG HOMESTAY"
157	KOST PUTRI KERTOWOLUYO
158	KOST PUTRI SUSATYO B. YAHONO
159	KOST PUTRI BENDUNGAN SENGGURUH
160	KOST PUTRI IBU RASLINA
161	KOST PUTRI PAK WAHYU
162	KOST PUTRA SRI.S
163	KOST PUTRI INDA
164	KOST PUTRI SIGURA-GURA BARAT III/7
165	KOST PUTRI GRIYASHANTA M. 519
166	KOST PUTRI ANGGA
167	KOST PUTRA LIZA
168	KOST PUTRI WATU MUJUR 22
169	KOST PUTRI BU IMAM
170	KOST PUTRI KURNIATI
171	KOST PUTRI 9-C
172	KOST PUTRI NOVITA
173	KOST PUTRI BWI 28
174	KOST PUTRI BP.SUMARTONO
175	KOST PUTRA SANALI
176	KOST PUTRI BPK. SIANIPAR
177	KOST PUTRI MOCH. FARID IBRAHIM, ST.
178	KOST PUTRI FATIMAH
179	KOST PUTRI AZIZAH
180	KOST PUTRI YUDIST
181	KOST PUTRI YUSUF ASMO II
182	KOST PUTRI YUSUF ASMO I
183	KOST PUTRA BU CATALINA
184	KOST PUTRI TECHNO
185	KOST PUTRI SUKAWATI / MEKAR
186	KOST PUTRI BU YAYUK
187	KOST PUTRI BPK. HERIYANTO
188	KOST PUTRI CHOKKY
189	D. PARAGON
190	D' PARAGON II
191	KOST PUTRI WOCIL
192	KOST PUTRI KASWONO/WOCIL
193	KOST PUTRI WAHID HASYIM
194	KOST PUTRA/PUTRI GRAHA KAMILA
195	KOST PUTRI HJ. ENDANG TRIE S.
196	KOST PUTRI ALWIYAH
197	KOST PUTRA BU SATUNI

198	KOST PUTRI MBAK NITA
199	KOST PUTRA LUDI SAR
200	KOST PUTRI SUDIRMAN
201	KOST PUTRA IBU HJ. HELDAWATI
202	KOST PUTRA BU SUJADI
203	KOST PUTRI "MY HOME"
204	KOST PUTRI AINI FUADIYAH
205	KOST PUTRA BU ENDANG (SIGURA-GURA)
206	KOST PUTRI SUYITNO
207	KOST PUTRI SIGURA-GURA V 23-E
208	KOST PUTRI SUHERMAN
209	KOST PUTRI BU RUBIAH AMIR
210	KOST PUTRA PUDJIATI
211	KOST PUTRA TAMAN BOROBUDUR
212	KOST PUTRA TITIEK SURATINI
213	KOST PUTRI TITIEK
214	KOST PUTRI TUKIDI
215	KOS PUTRI BAHTERA
216	KOS RAJAWALI HOUSE
217	KOST PUTRI BU RIYANTI
218	KOST PUTRI BPK. EKA
219	KOST PUTRI BPK. IMAM SIGURA-GURA
220	KOST PUTRI PAK ADI PRAMONO
221	KOST PUTRA SIGURA-GURA 46
222	KOST PUTRI INDRA (WATU AJI)
223	KOST PUTRI MONDOKAKI
224	KOST PUTRA DORY
225	KOST CHUSAERI AHMAD
226	KOST PUTRI WIJAYANTO
227	KOST. PUTRI SUTAMAN
228	KOST PUTRI EMA
229	KOST PUTRA GRIYA SHANTA EKS. P-303-B
230	KOST PUTRI SRI SUPRIYATI
231	KOST PUTRI BPK. SLAMET
232	KOST PUTRA DADANG S
233	KOST PUTRI BPK.NUGROHO
234	KOST PUTRI KEMBANG KERTAS KAV-I-B
235	KOST PUTRI KERTO SENTONO 23
236	KOST PUTRI BU SETIARINI
237	KOST PUTRI BU FARIDA - I
238	KOST PUTRI WINNY
239	KOST PUTRI BU AGUNG
240	KOST PUTRI BU NINUK
241	KOST PUTRI BU NINUK H.
242	KOST PUTRI BU FARIDA II
243	KOST PUTRA ROTTERDAM
244	KOST PUTRI AGUS SANTOSO
245	KOST PUTRI BU ELIS
246	KOST PUTRA ALAMANDA
247	KOST PUTRI BPK. SUNARTO

248	KOST. PUTRI PAK ASNUN
249	KOST PUTRI CHANDRAWATI
250	KOST PUTRI MUNDARI, SK
251	KOST PUTRA BU ENDANG
252	KOST PUTRI JL. JEMBER NO. 11
253	KOST PUTRI DINOYO
254	KOST PUTRI WATU MUJUR I/2
255	KOST PUTRI HARI KUSWANTO
256	KOST PUTRI GRIYA RUSANDY
257	KOST PUTRA SUSAN
258	KOST PUTRI BPK. WIDYAN MURSIANTO
259	KOST BU DARWIN
260	KOST PUTRI IRAWAN
261	RUMAH PEMONDOKAN PUTRI 51-A
262	KOST PUTRI GRAHA PURI WTG-24
263	KOST PUTRI BU NINIS
264	KOST PUTRI BU YULISTIN
265	KOST PUTRI WATUGILANG 18
266	KOST PUTRI LEE EN
267	KOST PUTRI PRAXEDIS
268	KOST PUTRI VERRA
269	KOST PUTRA
270	KOST IRENE P. H.
271	KOST PUTRI C. TROWULAN 26-A
272	KOST PUTRA BPK. BAMBANG ADMADI
273	KOST PUTRI FARHAD
274	RUMAH KOST (DR. FARHAD BALATIF)
275	KOST PUTRI KERTOSARI 6
276	KOST PUTRI RETNO
277	KOST PUTRI PAK RIFA'I
278	KOST PUTRI BU BETTY
279	KOST PUTRI " ANDIKA "
280	KOST PUTRA BPK. ZAINUDDIN
281	KOS PUTRI KOKO
282	KOST PUTRI PAK HENDRO
283	KOST "GUEST HOUSE LILY"
284	KOST PUTRI KERTO LEKSONO I/80
285	KOST PUTRI TITIK RAHAYU
286	KOST PUTRI IBU SRI WAHYUNINGTYAS
287	KOST PUTRA B. HARTATI
288	KOST PUTRI dr. DJUDJUK. R.
289	KOST PUTRI ZESTIENA
290	KOST PUTRI HARTONO S.
291	KOST PUTRI IMAM I
292	KOST PUTRI IMAM II
293	KOST PUTRI IMAM III
294	KOST PUTRI BELAKANG KEL. SUMBERSARI
295	KOST PUTRI GS. P.577
296	KOST PUTRA BPK. KASERI
297	KOST PUTRI BU ANNA

298	KOST PUTRI KHODIJAH
299	KOST PUTRI BU.RATNA
300	KOST PUTRI IBU SRI HARTATIK
301	KOST PUTRA BU WINKY
302	GRIYA KOST 47-A
303	KOST PUTRI STUDENT CASTLE
304	KOST PUTRI MUSLIMAH BPK. IR. F. PURWANTO
305	KOS PUTRA B ENI
306	KOST PUTRA SUMI R.
307	KOST PUTRA AGUS H.W. II
308	KOST PUTRA AGUS H.W. I
309	KOST PUTRI BPK. SOEWARDI
310	KOST PUTRI PRATIWI
311	KOST PUTRI CICIN. R
312	KOST PUTRA AGUS H.
313	KOST PUTRI BU LULUK SASTRO
314	KOST PUTRI IMAM SUBEKTI
315	KOST PUTRI BU YOGI
316	KOST PUTRA BU YOGI
317	KOST PUTRI KESUMBA RT. 05/RW.III
318	KOST PUTRI PISANG KIPAS 16
319	KOST PUTRA BU YOGI 2
320	KOST. PUTRI WATU GONG 19
321	KOST PUTRI SLAMET RIYADI
322	KOST PUTRI GRIYA SHANTA P-574
323	KOST PUTRA GEO SALMA
324	KOST PUTRI INDRIANTO
325	KOST PUTRA MOKHAMAD
326	KOST PUTRI BU PUTU
327	KOST PUTRI BU ENY (MT.HARYONO)
328	KOST PUTRI B. KOPI 9
329	KOST PUTRI A. HIDAYAT
330	KOST PUTRI H. BUDI
331	KOST PUTRI BPK.H.NURWAHID
332	KOST PUTRA PAK HUDIONO
333	KOST PUTRA TATIK NURHAYATI
334	KOST PUTRI PAK BAMBANG SANTOSO
335	KOST PUTRI AISYAH
336	KOST PUTRI TERS. BEND.WONOGIRI 20
337	KOST PUTRI BPK. NOVI KURNIAWAN, ST.
338	RUMAH KOST TERS. WIJAYA KUSUMA 16
339	RUMAH SINGGAH
340	KOST PUTRI BPK. ABDUL MAJID
341	KOST PUTRI SURIANA
342	KOST PUTRA MR. X
343	KOST PUTRI BENING 37
344	KOST PUTRI BPK. SUNARI
345	KOST PUTRI KERTO SENTONO 96-A
346	KOST PUTRI BU ANITA
347	KOST PUTRA BPK. MOHAMMAD AS'AD

348	KOST PUTRI KARTIKA
349	KOST PUTRI MOELO
350	KOST PUTRI "YAN"
351	KOST PUTRA LINDISANTI
352	KOST PUTRA RUSMIATI
353	KOST PUTRA AHMAD ALWI
354	KOST ANUGRAH
355	KOST PUTRI PARLIN
356	KOST PUTRI TONY WIJAYA
357	KOST BU N. NAINGGOLAN
358	KOST PUTRI SUSILOWATI
359	KOST PUTRI SIGURA-GURA VI/33
360	GRAHA ANDI PUTRI 1
361	GRAHA ANDI PUTRI 2
362	GUEST HOUSE & KOS "QUDSI"
363	KOST KELUARGA PAK NANANG
364	KOST PUTRI WTG 2-A
365	KOST PUTRI BU SRI KUSNIATI
366	KOS PUTRI FIKRI
367	KOST dr. RAHAJENG, SPOG
368	KOST IBU FIFIN DESFITA
369	KOST KARYAWATI
370	KOST KARYAWATI PUTRI
371	KOST KERTORAHAYU 67
372	KOST PUTERA HASYIM RAFF SANJANI
373	KOST PUTRA "SAFAR"
374	KOST PUTRA AGUS.S
375	KOST PUTRA IBU ADIARTI
376	KOST PUTRA IBU SUGIWATI
377	KOST PUTRA AGA
378	KOST PUTRA AGUS/JIOE JAN SING
379	KOST PUTRA BPK. ABU BAKAR ABDULLAH
380	KOST PUTRA AGUSTINA
381	KOST PUTRA ARIEF
382	KOST PUTRA ARIFIN
383	KOST PUTRA BPK ABD. MANAN (ANIK SAMINI)
384	KOST PUTRA BPK GANDUNG (DRIMANAN)
385	KOST PUTRA BPK RASMIJANTO
386	KOST PUTRA BPK SUWARNO
387	KOST PUTRA BPK. ADE ASNAWI
388	KOST PUTRA BPK. AGUNG
389	KOST PUTRA BPK. AHMAD AHJARI
390	KOST PUTRA BPK. ARDIANTO
391	KOST PUTRA BPK. ARUNDI KRIPTANTO
392	KOST PUTRA BPK. GIRANTO
393	KOST PUTRA BPK. MISBAHUL
394	KOST PUTRA BPK. MULYONO
395	KOST PUTRA BPK. NONOT. W
396	KOST PUTRA BPK. SIGIT
397	KOST PUTRA BPK. SUDARTO

398	KOST PUTRA BPK. SULIONO
399	KOST PUTRA BPK. WARID RAHMAD ILHAM
400	KOST PUTRA BPK. WIHARJONO
401	KOST PUTRA BPK. YUNIAR
402	KOST PUTRA BPK.IR.H.SOEMANTO
403	KOST PUTRA BU ANY
404	KOST PUTRA BU ASIKIN
405	KOST PUTRA BU BOWO
406	KOST PUTRA BU KARNO
407	KOST PUTRA BU MALIKA
408	KOST PUTRA BU NIKEN/ARI
409	KOST PUTRA BU NINIK
410	KOST PUTRA BU NUNUNG
411	KOST PUTRA BU NUR I
412	KOST PUTRA BU NUR II
413	KOST PUTRA BU NUR III
414	KOST PUTRA BU NUR IV
415	KOST PUTRA BU PURI R.
416	KOST PUTRA BU SUYATI SUPARNO
417	KOST PUTRA BU TRAMI
418	KOST PUTRI MBAK RIZKA
419	KOST PUTRA DARMA
420	KOST PUTRA DIAN
421	KOST PUTRA DIANDIKA
422	KOST PUTRA DR. CHRISTINA SRI MURYATI
423	KOST PUTRA DRA. NURUL CHOMARIA
424	KOST PUTRA ENNY SUTIARSIH
425	KOST PUTRA ERICH ADHENANTHERA.H
426	KOST PUTRA ERNI
427	KOST PUTRA FIDIARTA
428	KOST PUTRA GRIYA SHANTA P-297
429	KOST PUTRA GRIYA SHANTA P-299
430	KOST PUTRA GRIYA TILAWAH
431	KOST PUTRA H. ABDULLAH
432	KOST PUTRA HANDIK P.
433	KOST PUTRA HERISTIAWAN
434	KOST PUTRA HJ. BAIS
435	KOST PUTRA HJ. IMAM HARSANTO
436	KOST PUTRA HJ. SULASTRI
437	KOST PUTRA IBU CHOLIDAH
438	KOST PUTRA IBU IBNU
439	KOST PUTRA IBU ROHANI
440	KOST PUTRA IBU SANTOSO
441	KOST PUTRA IBU YUNINGSIH
442	KOST PUTRA KEMBANG KERTAS IV/N-2-A
443	KOST PUTRA KOESWADI
444	KOST PUTRA LAMBDA
445	KOST PUTRA M. KHOIRUDIN
446	KOST PUTRA MANCU ROSIDA
447	KOST PUTRA MERTOJOYO A-NO. 4

448	KOST PUTRA METROSEL
449	KOST PUTRA MUSAFFA
450	KOST PUTRA P. DJAMIL
451	KOST PUTRA P. IRAWAN
452	KOST PUTRA P. MUSTAKIM
453	KOST PUTRA PAK BASORI
454	KOST PUTRA PAK SUNARNO
455	KOST PUTRA PISANG KIPAS 65
456	KOST PUTRA PUTRI BU YONO
457	KOST PUTRA RAGIL
458	KOST PUTRA RIFAIT
459	KOST PUTRA SAMSUL HADI
460	KOST PUTRA SIBAYAK
461	KOST PUTRA SIMBAR MENJANGAN
462	KOST PUTRA SIMPANG BOROBUDUR
463	KOST PUTRA SOEPADI, SH.
464	KOST PUTRA SOGIYA
465	KOST PUTRA SRI UTAMI
466	KOST PUTRA SUBAGIJO
467	KOST PUTRA SUDJOKO SANTOSO
468	KOST PUTRA SURYANTORO
469	KOST PUTRA TERS. CIKAMPEK 36
470	KOST PUTRA UMI RAHAYU
471	KOST PUTRA W K H
472	KOST PUTRA WARNI. H
473	KOST PUTRA WASITO
474	KOST PUTRA WILLY
475	KOST PUTRA WISNU
476	KOST PUTRA ZAINUDDIN A MUHITH
477	KOST PUTRA ZAINUDIN
478	KOST PUTRA/PUTRI AFRIDA
479	KOST PUTRI BU INDAH I
480	KOST PUTRI " LIMA "
481	KOST PUTRI " ROSA "
482	KOST PUTRI 0669
483	KOST PUTRI ABD MU'IN
484	KOST PUTRI ADINDA
485	KOST PUTRI AGUS
486	KOST PUTRI AGUSTINA
487	KOST PUTRI ANDONG TIMUR 6-B
488	KOST PUTRI ANORA
489	KOST PUTRI ARI SETYANI
490	KOST PUTRI ARTI.S
491	KOST PUTRI ASARI
492	KOST PUTRI ASIFA
493	KOST PUTRI B SUCI
494	KOST PUTRI B. NURIL
495	KOST PUTRI DRS. RIADI
496	KOST PUTRI ROSIHAN ANWAR
497	KOST PUTRI BU SOEMILAH

498	KOST PUTRI B.KOPI 9-A
499	KOST PUTRI BADAT
500	KOST PUTRI BAMBANG CH
501	KOST PUTRI BELLA
502	KOST PUTRI BENDUNGAN TANGGA 1
503	KOST PUTRI BENING 57
504	KOST PUTRI BETTY
505	KOST PUTRI BIDADARI I
506	KOST PUTRI BIDADARI II
507	KOST PUTRI BPK HILAL HAMID
508	KOST PUTRI BPK ZAENAL
509	KOST PUTRI BPK. BARJI I
510	KOST PUTRI GRIYA SINAR
511	KOST SUMARMI
512	KOST PUTRI BU LILIK N.
513	KOST PUTRI WARWAH
514	KOST PUTRI GRIYA SHANTA M-524
515	KOST PUTRI P. SUJADI
516	KOST PUTRI HERIS
517	KOST PUTRI BPK. WAHYU
518	KOST PUTRI BU RETNO
519	KOST PUTRI WIROTHO
520	KOST PUTRI NURUL UMAMAH
521	KOST PUTRI BPK. IDRUS
522	KOST PUTRI MERTOJOYO B-1
523	KOST PUTRI MIFTAHUL
524	KOST PUTRI JOYO SUKOTIMUR I NO. 10-A
525	KOST PUTRI BU ALEX
526	KOST PUTRI DIDIK RAHMAN
527	KOST PUTRI BU YANTI
528	KOST PUTRI SUGENG DWI WIBOWO
529	KOST PUTRI WATU GONG 2
530	KOST PUTRI BU TJANDRA
531	KOST PUTRI BU SUATMADJI
532	KOST PUTRI SIGURA-GURA (BU. SUGENG P.)
533	KOST PUTRI SINTA
534	KOST PUTRI ISMI KARIMA
535	KOST PUTRI ERMAWATI, SH. (AMIRA)
536	KOST PUTRI BPK. SONY
537	KOST PUTRI RITA HALIM
538	KOST PUTRI SOEWARTO
539	KOST PUTRI BPK. NOVAN
540	KOST PUTRI TRI ADI
541	KOST PUTRI BROTO SUSILO
542	KOST PUTRI BPK. INDRA
543	KOST PUTRI BPK. SOETEDJO,DRS
544	KOST PUTRI BPK. BARJI II
545	KOST PUTRI BPK. BUDI
546	KOST PUTRI BPK. RAHMAD
547	KOST PUTRI BPK. ROCHIM

548	KOST PUTRI BPK. ROMANTO R.
549	KOST PUTRI BPK. SUMARJI
550	KOST PUTRI BPK. TAUFAN
551	KOST PUTRI BPK. WASIDI
552	KOST PUTRI BU ANING
553	KOST PUTRI BU ASNUN
554	KOST PUTRI BU ATIK
555	KOST PUTRI BU HANAH
556	KOST PUTRI BU HARI
557	KOST PUTRI BU IDA
558	KOST PUTRI BU IDA ROSIANA
559	KOST PUTRI NURANDI
560	KOST PUTRI BU TUTIK
561	KOST PUTRI SUDARSONO
562	KOST PUTRI BU INDAH II
563	KOST PUTRI BU LIANAH
564	KOST PUTRI BU. FARIDA
565	KOST PUTRI BU LIS
566	KOST PUTRI BU MUJIWATI
567	KOST PUTRI BU NANIK NURAINI
568	KOST PUTRI BU NINE
569	KOST PUTRI BU NINIK SUNARYO
570	KOST PUTRI BU NUNUNG (SIGURA-GURA)
571	KOST PUTRI BU SRI GIATMIATI
572	KOST PUTRI BU SRI SAYUTI
573	KOST PUTRI BU SRI SUMARLIK
574	KOST PUTRI BU. NANIK
575	KOST PUTRI BUDI
576	KOST PUTRI BUNGA ANDONG TIMUR 23
577	KOST PUTRI BUNGA MERAH I/4
578	KOST PUTRI C.SRI MARYANI
579	KOST PUTRI CAH AYU
580	KOST PUTRI CHOTIJAH
581	KOST PUTRI CHUSHIN
582	KOST PUTRI DARMI
583	KOST PUTRI DESI INDAH SUSANTI
584	KOST PUTRI DEWI ASTUTI
585	KOST PUTRI DIAH
586	KOST PUTRI DIDIK WAHYUDI
587	KOST PUTRI DITAS KAV.B1-B2
588	KOST PUTRI EKSLUSIF
589	KOST PUTRI ERKAN
590	KOST PUTRI GOFAR
591	KOST PUTRI GRIYA AA
592	KOST PUTRI GRIYA ASRI
593	KOST PUTRI GRIYA MANDIRI
594	KOST PUTRI GRIYA SHANTA L 230
595	KOST PUTRI H. SIRAT
596	KOST PUTRI HAMID SHOLEH
597	KOST PUTRI HJ. HARYATI

598	KOST PUTRI HJ. SUHARTINI
599	KOST PUTRI HJ. SURYATI
600	KOST PUTRI IBU ARIE SABARIA
601	KOST PUTRI IBU ASTUTI HALIM
602	KOST PUTRI IBU DEWI
603	KOST PUTRI IBU LILIK W
604	KOST PUTRI IBU SUHANANTO
605	KOST PUTRI IBU TUTIK
606	KOST PUTRI INOVA
607	KOST PUTRI KAKTUS 6-A
608	KOST PUTRI KAMDANI
609	KOST PUTRI KEDUNGOMBO 5
610	KOST PUTRI KEMBANG KERTAS 3-A
611	KOST PUTRI KEMBANG KERTAS KAV- A-1
612	KOST PUTRI KUSUMA
613	KOST PUTRI LA WANTI
614	KOST PUTRI LADIVA PARK KAV-I
615	KOST PUTRI LINDA
616	KOST PUTRI LISTIAWATI
617	KOST PUTRI LUKMAN
618	KOST PUTRI MADE SRI ASTITI
619	KOST PUTRI MADE SRI ASTITI 2
620	KOST PUTRI MARGARET
621	KOST PUTRI MARIANA
622	KOST PUTRI MBAK IRA
623	KOST PUTRI MOCH.SA' I
624	KOST PUTRI MOENIR THALIB
625	KOST PUTRI MONSTERA 20
626	KOST PUTRI MULYANTORO
627	KOST PUTRI MUSLIM
628	KOST PUTRI MUSLIM IBU SITI KHOLIFAH
629	KOST PUTRI NABILA
630	KOST PUTRI NATASYA
631	KOST PUTRI NOUVAL . F
632	KOST PUTRI NUNUK
633	KOST PUTRI NUR HARIS
634	KOST PUTRI NURKUSAINI
635	KOST PUTRI NURUL KISWATI D.U.
636	KOST PUTRI NUZUL
637	KOST PUTRI NY INDAH
638	KOST PUTRI P. SU'UD
639	KOST PUTRI P. ZAINI
640	KOST PUTRI P.WAKIDI
641	KOST PUTRI PAK ARIAWAN
642	KOST PUTRI PAK IMAM GHOZALI SUMBERSARI IV
643	KOST PUTRI PAK SUWONDO
644	KOST PUTRI PAK TYO
645	KOST PUTRI RADIUS EKO
646	KOST PUTRI REJEKI FITRIADI -1
647	KOST PUTRI RIAM KANAN

648	KOST PUTRI RILLIA
649	KOST PUTRI RINI
650	KOST PUTRI ROSALINA
651	KOST PUTRI RUDI RUSDIANTO
652	KOST PUTRI RUMAH MADINA
653	KOST PUTRI SENGGANI 6-A
654	KOST PUTRI SENIYATI
655	KOST PUTRI SHAFIRA
656	KOST PUTRI SIDIK WIYANA
657	KOST PUTRI SIMP. SEMANGGI
658	KOST PUTRI SIMP.BATU PERMATA
659	KOST PUTRI SIMUN
660	KOST PUTRI SINTAWATI
661	KOST PUTRI SISILIA
662	KOST PUTRI SITI MARYANA
663	KOST PUTRI SRI RAHAJOE
664	KOST PUTRI SULIAH
665	KOST PUTRI SUMUR B1-10
666	KOST PUTRI SYAHRUL AINI
667	KOST PUTRI SYAMSUL
668	KOST PUTRI SYLVIA
669	KOST PUTRI TAMAN INDAH SUHAT KAV-78
670	KOST PUTRI TANGERANG 3
671	KOST PUTRI TAWANG SARI
672	KOST PUTRI TLOGOMAS XV-C
673	KOST PUTRI WARDOYO
674	KOST PUTRI WINARTI
675	KOST PUTRI WISMA
676	KOST PUTRI WOWOK/SUNDARI
677	KOST PUTRI YANIS
678	KOST PUTRI YAYUK ERNAWATI
679	KOST PUTRI ZAENAL
680	KOST PUTRI. BPK.ISKANDAR
681	KOST SULKAN ARIF
682	RUMAH KOST PUTRI RANUGRATI
683	RUMAH KOST PUTRI IBU NURMAYATI
684	RUMAH KOST PUTRI BPK. H. KHAIRUDDIN
685	KOST SUNI WIDJAYA
686	KOST-KOSAN SIMBAR MENJANGAN 20
687	KOST. PUTRI BU AGUSTIMAR
688	RUMAH KOST
689	RUMAH KOST BAPAK MOHAMAD ROKIM
690	RUMAH KOST IBU MANULANG
691	RUMAH KOST PUTRI "M. YASKUR"
692	KOST PUTRI REVO
693	KOST PUTRI SADAH NINGSIH
694	KOST PUTRI PRANA
695	KOST PUTRI IBU NGATIYEM
696	KOST PUTRI BU SOEWARSIANIK
697	KOST PUTRA H. SUGIONO

UJIB PAJAK RUMAH KOS TAHUN 2015

Alamat	NPWPD
JL. BEND. RIAMKANAN C- 4 MALANG	0838.65.221
JL. BENDUNGAN SEMPOR 12 MALANG	0839.65.221
JL. JOHAR NO. 12	0432.64.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/13	1340.65.221
JL. WATUGONG NO. 17 MALANG	0667.65.221
JL. CANDI MENDUT NO. 6	0999.65.221
jl.jombang I B / II	1887.62.101
JL.BEND.SIGURA-GURA BRT RAYA NO 7	0419.64.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I KAV-16	1151.65.221
JL.SIGURA-GURA VNO.16B	1316.65.221
JL. PINANG MERAH 15/ KAV- 12-A	0898.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 17	0945.65.221
JL. BOROBUDUR UTARA 4	0660.65.221
JL. MT. HARYONO NO. 35	0852.65.221
JL. KERTO ASRI NO. 116	0991.65.221
JL. WATU MUJUR I/10	0992.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK I/23	1028.65.221
JL. MT HARYONO XI-D/ 457	1190.65.221
JL. MT. HARYONO GG BRAWIJAYA II NO 59	1376.65.221
JL. SUMBERSARI II/88 MALANG	1373.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/6 MALANG	0741.65.221
JL. PISANG KIPAS NO. 72	0957.65.221
JL. SIGURA - GURA 3 NO 25 A	1300.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV -7	1755.62.221
JL. WATU GONG 29	0990.65.221
JL. BUNGA MERAK I KAV-14	0923.65.221
JL. KERTOREJO NO. 8	1088.65.221
JL. TERUSAN AMBARAWA 36	1011.65.221
JL. SUMBERSARI IV/60 C	1335.65.221
JL. JAKARTA DALAM NO. 112 A	1881.62.221
JL. BUKIT CEMARA TUJUH V/96	1097.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA I NO. 1	0917.65.221
JL. JOYOSUKO 61A MALANG	1304.65.221
BCT KAV 36 BLOK II MALANG	1069.65.221
JL. BUNGA ANDONG NO. 17	0969.65.221
JL. TERS. SIGURA-GURA I C	1208.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 33	0879.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI 36	0878.65.221
JL. KEBEN II PERMAI BLOK B-10	0448.64.221
JL. SIMBAR MENJANGAN NO. 20	0765.65.221
JL. SIGURA-GURA I NO. 3	0910.65.221
JL. PTP I KAV. 2-3	1325.65.221
JL. WATU GONG NO 15 E MALANG	1174.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 35	1134.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 39-B	0389.64.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 11	1049.65.221
JL. SUMBERSARI II/86 MALANG	1374.65.221

JL.MAYJEN PANJAITAN GG. 19/ 51	1749.62.221
JL. BENDUNGAN SIGURA - GURA 99 V NO 27 F	1289.65.221
JL. KERTOSARI NO. 20	1178.65.221
JL. KERTOSARI NO. 18 MALANG	1179.65.221
JL. RAYA SUMBERSARI 290-C	1060.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 14/15	1731.62.221
JL. PANDEGLANG DLM. 3	1734.62.221
JL. SALATIGA 10	0956.65.221
PERUM MUTIARA SIGURA-GURA 12-B	1166.65.221
JL SIGURA-GURA VI/64 B	1222.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/30	1123.65.221
JL. WATUGONG 28 MALANG	1021.65.221
JL. CANDI TROWULAN 70 MLG	0695.65.221
JL. WATU GONG NO. 8	1009.65.221
JL. TERUSAN BENDUNGAN WONOGIRI 4	1253.65.221
JL. BASUKI RAHMAD 2/899	1935.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-12-B	1786.62.221
JL. TERUSAN CIKAMPEK NO. 6	1912.62.221
JL. KERTOSENTONO 57-C	1034.65.221
JL KARET NO 9	1318.65.221
JL. GRIYASHANTA M-523	0666.65.221
GRIYA SHANTA P. 584 MALANG	0665.65.221
JL. BENDUNGAN PULOSARI NO. 7	0399.64.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 5- B	0939.65.221
JL. PINANG MERAH 23	0953.65.221
JL. KEBEN II B/ NO.11-12	0447.64.221
SIMPAN DIENG UTARA NO 3	0442.65.221
JL.RAFLESIA NO 9	1224.65.221
JL. GRIYASHANTA M-321 MALANG	0672.65.221
PERUM GRIYASHANTA P-310 - 311	0801.65.221
JL.DEWANDARU 82 KLOJEN	1917.62.221
JL. KENDALSARI BARAT 14	1278.65.221
JL. BUNGA PINANG MERAH NO. 33 MALANG	1068.65.221
JL.BEND SIGURA-GURA BARAT 21	0420.64.221
BUKIT CEMARA TUJUH KAV I NO.1	1189.65.221
JL. SUMBERSARI IV/ 227 B	0916.65.221
JL. RANUGRATI 28	0251.63.221
JL. PINANG MERAH KAV 10	0978.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/5C MALANG	0833.65.221
JL. WATU GONG NO. 4	1006.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 11 MALANG	1757.62.221
JL. WATU GONG 38	1131.65.221
JL. WATU GONG 31	1130.65.221
JL. KEBEN IIB/NO. 1	0446.64.221
JL. LOKON 19	0393.64.221
JL. LOKON 12	0394.64.221
JL. LOKON 20	0395.64.221
JL. TAMBORA 27	0396.64.221
JL. SIMPANG BOROBUDUR 46	0658.65.221
JL. MT.HARYONO NO 81 (DEPAN FAK. TEKNIK)	1391.65.221

JL.SIMPANG BOROBUDUR NO 8	1330.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT III/20	0387.64.221
JL. BENDUNGAN DHARMA 27 MALANG	0955.65.221
JL. SIMPANG BENDUNGAN WONOGIRI 9	1359.65.221
JL. SIMPANG BENDUNGAN WONOGIRI NO. 18	1360.65.221
JL. MT HARYONO Gg XI NO 348 A MALANG	1075.65.221
JL. MT HARYONO KAV- A3-A4	1095.65.221
JL. DEWANDARU DALAM NO 4	1232.65.221
JL. KERTOSENTONO2/05 MALANG	1711.62.221
BENDUNGAN SIGURA-GURA V NO 6	1276.65.221
JL. IJEN NO. 94 MALANG	1761.62.221
JL. B SIGURA-GURA IV/15	1214.65.221
JL. JOYOSUKO 5B/11 MALANG	1303.65.221
ISTANA B. DEWANDARU NO. 33	0718.65.221
JL. SEMANGGI TMR NO 9 C MALANG	0745.65.221
JL. CANDI AGUNG III/14	1016.65.221
JL. SUMBERSARI IVG/270	1337.65.221
JL. SIMPANG CANDI PANGGUNG 123A	1322.65.221
JL. SUKARNO HATTA INDAH 1 NO 7 MALANG	0728.65.221
JL. BEND. SUTAMI NO. 1	0782.65.221
JL. BUNGA ANYELIR NO. 8	0850.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 7	0943.65.221
JL. JOMBANG I/122	1888.62.221
JL. SIGURA-GURA I KAV-15	0772.65.221
JL. KEBEN IIA/10 MALANG	0444.64.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 24	0832.65.221
JL. SUMBERSARI IV/225	0865.65.221
JL. KEBEN 2A NO. 29	0416.64.221
JL. SIMPANG SUNAN KALIJAGA 11	1003.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA 8	0948.65.221
TERUSAN RAYA DIENG 104 F	0433.64.221
JL.SOEKARNO HATTA INDAH I/03	0712.65.221
JL. BUNGA KOPI 14 MALANG	0684.65.221
GRIYASHANTA BLOK P-581	1128.65.221
JL.SIGURA-GURA III NO 19	1343.65.221
JL. SIMPANG BATU PERMATA NO. 79	1334.65.221
JL. SOEKARNO HATTA - MALANG	0819.65.221
JL. CANDI PANGGUNG 15 PERM LADIVA PARK KAV 5-6	1094.65.221
JL. PINANG MERAH KAV-14	0912.65.221
PERUM LADIVA PARK PTP I KAV-4	0909.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/25	0934.65.221
JL. MT. HARYONO GG.8/999	1175.65.221
JL. SIMPANG IJEN BLOK A-NO. 28	1782.62.221
JL.SIGURA-GURA III/27	1342.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT III/15	0870.65.221
JL.SEMANGGI TIMUR 14A MALANG	0752.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 11	0949.65.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 14	0942.65.221
JL KENDALSARI BRT. 3/33	1270.65.221
JL. WATU GONG NO. 42	1038.65.221

JL. HASANUDIN NO. 05	1723.62.221
JL. KERTOSENTONO NO. 73	1035.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV- 26	1736.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV 11-A	1730.62.221
JL.GRESIK 06 MALANG	1778.62.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/64	0973.65.221
JL.KEMBANG KERTAS IV/22	1277.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS NO. 99 X	1087.65.221
JL.SIMPANG BOROBUDUR	0959.65.221
JL. KERTOWOLUYO NO.12	1186.65.221
JL. BEND. RIAM KANAN A-1	0881.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH NO. 21-A	0932.65.221
JL.WATU GONG 17-G MALANG	1104.65.221
SUMBERSARI I NO.41	1320.65.221
JL. ASTER NO. 5	0800.65.221
JL. SEMANGGI TIMUR 9	0735.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT III/7	1067.65.221
PERUM GRIYA SHANTA M519 MALANG	0664.65.221
JL. TLOGOMAS XV-C/18	1061.65.221
JL. MONDO KAKI 23 MALANG	0797.65.221
JL. WATU MUJUR 22 MALANG	0988.65.221
JL. BUNGA ANDONG NO. 9	0940.65.221
JL. SUNAN KALIJOGO DALAM 11	1127.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/9-C	0826.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/14-B	1027.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO 28	1284.65.221
JL.WATU GONG 40 MALANG	1083.65.221
JL. MAYJEN SUNGKONO	0278.63.221
JL. BENDUNGAN WADAS LINTANG NO.4	0907.65.221
JL. WATUMUJUR II/26 MALANG	0678.65.221
JL. WATUMUJUR I/25	1082.65.221
JL.WATUMUJUR I/8 MALANG	1081.65.221
JL. MERTOJOYO SELATAN NO. 17	1108.65.221
JL. ANDONG BARAT KAV-21	0904.65.221
JL. ANDONG BARAT KAV-4	0903.65.221
JL. HAMID RUSDI NO. 19 MALANG	0764.61.221
JL. RAYA SUMBERSARI 287	1349.65.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO NO. 1	0875.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 24-A	0883.65.221
JL. SUNAN MURIA GG. I/ KAV-5	1120.65.221
JL. SUNAN MURIA GG I/ KAV-4	0866.65.221
JL. BARENG LAMBAU 883	1680.62.221
JL. BUKIT DIENG KAV-H.1	0398.64.221
JL. BUNGA ANDONG NO.3 F MALANG	0732.62.221
JL.BUNGA ANDONG KAV 3 MALANG	0733.65.221
JL. WAHID HASYIM IV/RT.02 RW. 06	1715.62.221
JL. CANDI AGUNG III NO.16 MALANG	1323.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH 43 MALANG	1048.65.221
JL. CANDI TROWULAN 44	0649.65.221
JL. SUMBERSARI GANG 3A NO. 226	1398.65.221

JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BARAT II/8	0962.65.221
JL. SUNAN MURIA BLOCK C-2	0827.65.221
JL. TERS CIKAMPEK NO. 31	1732.62.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT I/12	0951.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT I/7	0388.64.221
JL. BUNGA MERAK II NO. 9 MALANG	1333.65.221
JL. TERS CIKAMPEK NO. 8	1728.62.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/33	1122.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV- 25	1737.62.221
JL.BEND.SIGURA-GURA V/ 23-E	1274.65.221
JL. BUNGA ANDONG SELATAN KAV-37	1013.65.221
JL. JOMBANG NO. 1	1792.62.221
JL. CANDI TELAGAWANGI 87	1015.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR UTR. NO. 8	0651.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV 18-A	1746.62.221
JL.TERUS.CIKAMPEK KAV.45	1743.62.221
JL. KERTO REJO NO. 2 MALANG	1093.65.221
JL. DEWANDARU NO. 99C	1204.65.221
JL. BUNGA ANDONG SELATAN NO. 29	1203.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA 612-C	0975.65.221
JL. ANDONG BARAT NO. 15	0884.65.221
JL. SIGURA-GURA V/29	1162.65.221
JL. TLOGOMAS 15 C NO. 11 C	1264.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA 46	1346.65.221
JL. WATU AJI NO. 6 MALANG	1101.65.221
JL. MONDOKAKI NO 6	1356.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN WONOGIRI 23	0885.62.221
JL. DEWANDARU DALAM NO. 58-A	1397.65.221
JL. PINANG MERAH KAV-17 MALANG	0981.65.221
JL.PERUM BUKIT CEMARA TUJUH BLOK V/108	1153.65.221
JL. CANDI PANGGUNG NO. 64 KAV-14	0831.65.221
JL. GRIYA SHANTA EKS-BLPK P-303 B	0708.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR NO. 8-A	0780.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI GOLDEN HOUSE KAV 4	0835.65.221
JL. SIGURA-GURA BARAT I/9	0400.64.221
JL.TERUSAN BEND. WONOGIRI 12 MALANG	0863.65.221
JL. KEMBANG KERTAS KAV- I-B	0688.65.221
JL. KERTOSENTONO 23	0687.65.221
JL. PINANG MERAH KAV- 6	0871.65.221
JL. PINANG MERAH I NO. 4	0872.65.221
JL. KERTORAHARJO NO. 106 MALANG	1074.65.221
JL. JOMBANG IB/15A	1898.62.221
JL. MT. HARYONO NO 25	1394.65.221
JL. CANDI WARINGIN 10 MALANG	0825.65.221
JL. PINANG MERAH KAV- 9	0873.65.221
JL. KEDIRI 4 MALANG	1789.62.221
JL. TERS WONOGIRI KAV 4 / NO. 5	0834.65.221
TLOGOMAS GG.15-A/12	1191.65.221
JL.SUMBER SARI IV/261 A	1230.65.221
JL. WATUGONG 35	1023.65.221

JL. WATU GONG 15C	1029.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH 119	1268.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA 3-B	0950.65.221
TERUSAN DIENG 59B	0434.64.221
JL. JEMBER NO. 11	1953.62.221
JL. MT. HARYONO I GANG I NO.18	1354.65.221
JL. WATU MUJUR I/2	0710.65.221
JL. BEND SIGURA-GURA II/A.I	0851.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/62	0901.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 39 MLG.	00689.61.221
JL. BENDUANGAN RIAM KANAN C-6	0894.65.221
JL. BEND. WONOGIRI NO. 6	0742.65.221
JL.SUMBERSARI 254 A	1344.65.221
JL. SIGURA-GURA NO. 51-A	0739.65.221
JL. WATU GONG 24	1043.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 5 NO. 99	1202.65.221
JL. TERUSAN BOROBUDUR I NO 24	1328.65.221
JL.WATUGILANG 18 MALANG	1180.65.221
JL. CANDI TROWULAN 38	0677.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR NO. 36	0791.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-2-A MALANG	1748.62.221
JL. KEMBANG KERTAS KAV-17 NO. 4	0670.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 45	0659.65.221
JL. CANDI TROWULAN 26-A MLG.	0696.65.221
JL. TERS. CANDI MENDUT 3-B	0893.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA 8	0729.65.221
JL. BEND.SIGURA-GURA NO. 19-A	0646.65.221
JL. KERTOSARI NO. 6	0730.65.221
JL. BENDUANGAN SIGURA-GURA GG.V/23-D	1828.62.221
JL. WATUGONG NO. 16	1031.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA 4A MALANG	1077.65.221
JL. KERTORAHAYU 41	1158.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA 10-B	0840.65.221
TLOGOMAS 15C/16	1188.65.221
JL. KUMIS KUCING NO. 16 MALANG	1269.65.221
JL. PASAR BESAR A24. KAV. 22,23, 24	1800.62.221
JL. KERTO LEKSONO I/80	1047.65.221
JL. TERUSAN RAYA DIENG NO. 59C	0435.64.221
JL. TERS. SIGURA-GURA D-87	0412.64.221
JL. JAGUNG SUPRAPTO IB/160	1724.62.221
JL. PATIMURA NO. 28	1738.62.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 6	0968.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-2 MALANG	1747.62.221
JL. BEND. SIGURA-GURA V/NO. 9-A	0828.65.221
JL. TERS. SIMP. SIGURA-GURA I/8	0829.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 8	0946.65.221
JL. SIGURA - GURA VI/31-A	0689.65.221
PERUM GRIYA SHANTA EKSEKUTIVE P-577	0989.65.221
JL. MERTOJOYO SELATAN C 6/10	1112.65.221
JL. TERUSAN CIKAMPEK NO. 24	1804.62.221

JL. SUNAN AMPEL I/10	1295.65.221
JL. BEND SIGURA-GURA 30A/B MALANG	0864.65.221
JL. KERTOPAMUJI 55	1194.65.221
PONDOK ALAM SIGURA-GURA A3-NO.9	0392.64.221
JL. SUMBERSARI GANG II/47-A	1408.65.221
JL. ANDONG SELATAN NO. 15	1357.65.221
JL. BUNGA MERAK I NO. 21	0922.65.221
JL. VINOLIA NO 3 - A MALANG	0744.65.221
JL. TLOGOMAS 15-A NO. 5	1046.65.221
JL. SUDIMORO 20 MALANG	0810.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR TENGAH NO. 11 MLG.	0809.65.221
JL. WATU GONG 17-B	1125.65.221
JL. WATU GONG 26 MALANG	1124.65.221
JL. CANDI TROWULAN 47 MLG	0694.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM 52 RT.4/RW.7	1037.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/23-B	1114.65.221
JL. AKORDION BRT/PERUM BUMI PALAPA H-1	0693.65.221
JL. PUNCAK CENGKEH 11	0997.65.221
JL. DEWANDARU 99 MALANG	0996.65.221
JL. KESUMBA RT. 05/RW. III	0680.65.221
JL. PISANG KIPAS 16	0681.65.221
JL. PUNCAK CENGKEH NO 15 MALANG	0995.65.221
JL. WATU GONG 19 MALANG	0937.65.221
JL. SENGGANI 40 MALANG	0788.65.221
JL. GRIYASHANTA P-574 MLG.	0702.65.221
JL. KENDALSARI II/100	1086.65.221
JL. BENDUNGAN WIDAS L;INTANG NO. 17-A	0952.65.221
JL.CANDI PANGGUNG INDAH NO 5	1226.65.221
JL. KEDUNG OMBO 6	0675.65.221
JL. MT. HARYONO V/257	1057.65.221
JL. BUNGA KOPI NO. 9	0663.65.221
JL. KOPI 8 MALANG	0656.65.221
JL. SANAN GANG I-A NO. 28	0707.61.221
JL.SUMBERSARI IV-A/258	1321.65.221
JL. BENDUNGAN NAWANGAN NO. 10	1142.65.221
JL. BENDUNGAN NAWANGAN NO. 12	1141.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 22	1140.65.221
SUKARNO HATTA PTP- I PERUM LADIVA PARK KAV-2	0889.65.221
JL. TERS. BEND. WONOGIRI NO. 20 MALANG	1053.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK NO. 46	1729.62.221
JL. TERS. WIJAYA KUSUMA NO. 16	0679.65.221
JL. RAYA SAWOJAJAR 14 A	0246.63.221
JL. JOMBANG GG.1 NO.5 MALANG	1929.62.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 25	0841.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/15	1352.65.221
JL. BEND. BENING 37	0974.65.221
JL. TLOGOMAS GG.15-C/15B	1056.65.221
JL. KERTOSENTONO 96-A	1012.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR 12	0933.65.221
JL. SUMBERSARI III/224A	1390.65.221

JL. BUNGA ANDONG BARAT NO. 12 MALANG	1219.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI 22	1041.65.221
JL. TERUSAN DIENG NO. 63	0430.64.221
JL. SEMANGGI BARAT 1 MALANG	1157.65.221
JL. BENDUNGAN DARMA NO. 5	1309.65.221
JL. WIDURI 16 MALANG	0799.65.221
JL. SIMPANG BOROBUDUR 29	0673.65.221
JL. WATU AJI NO, 4 MALANG	1143.65.221
JL.MT. HARYONO RT. 03/RW. 04 KAV.A	0796.65.221
JL.PINANG MERAH II/16	1294.65.221
JL. CANDI PANGGUNG PERMAI NO. 41	0803.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA VI/33	0749.65.221
JL. WATUMUJUR I/15	1721.62.221
JL. TERS CIKAMPEK 32	1722.62.221
JL.GAJAYANA	1361.65.221
JL. KENDALSARI I/73	1005.65.221
JL. WATU GONG NO. 2-A MALANG	1163.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 16 MALANG	1042.65.221
JL. TLOGOMAS GANG. 15C NO. 11B	1192.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 19	0867.65.221
JL. SUNAN KALIJOGO DALAM 9-A	0804.65.221
JL. WIDODAREN NO.14 A MALANG	1905.62.221
JL. WIDODAREN NO. 11	1913.62.221
JL. KERTORAHAYU 67	1181.65.221
JL. SUMBERSARI 4A/258A MALANG	1312.65.221
JL. SIMBAR MENJANGAN 37-A	0766.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA BLOK IA NO. 3-D	0738.65.221
JL. KALIMAYA 10	1051.65.221
JL. MT. HARYONO GG.XVII/216	1085.65.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO 11	0891.65.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 65	0759.65.221
JL. BENDUNGAN WADAS LINTANG 18	0967.65.221
JL. JOYO SUKO III/7	1302.65.101
JL. SIGURA-GURA I-A/4-A MALANG	1149.65.221
JL. SOEKARNO HATTA INDAH I NO. 15	0776.65.221
JL. BENDUNGAN BENING 55 MALANG	0886.65.221
JL. BENDUNGAN BATU JAHE KAV-9	0887.65.221
JL. MT HARYONO Gg 9 NO. 86 c MALANG	1073.65.221
JL.SIGURA-GURA III NO 10	1260.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 14	1177.65.221
JL. JOYOSUKO NO. 41-D	1099.65.221
D'CLUSTER PISANG KIPAS KAV. 3	1240.65.221
JL. KUMIS KUCING NO. 16	0944.65.221
JL. WATU GONG 36	1090.65.221
JL. BENDUNGAN DARMA NO. 1	0964.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA 53	1136.65.221
JL. GAJAYANA 23B	1364.65.221
JL. SUNAN AMPEL I/12	1282.65.221
JL. KEMBANG KERTAS 17	0683.65.221
JL. BANTARAN V/44	0868.65.221

JL. MT HARYONO XVII/2	1185.65.221
JL. CANDI MENDUT NO. 17	0869.65.221
JL. GRESIK NO. 1-A	1835.62.221
JL. SUMBERSARI IV/269	1307.65.221
JL.BEND.WONOREJO NO 3	1315.65.221
JL. RAYA SUMBERSARI 254-C	1351.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 18	1311.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/16	0896.65.221
JL. WATUGILANG NO. 17A	1156.65.221
JL.SUMBER SARI IV/260	1275.65.221
JL.JOYO SUKO TMR I/80	0753.65.221
JL. SIMPANG GAJAYANA NO. 613 F	0976.65.221
JL. WATUMUJUR II NO. 12	1205.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH 7	0855.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH NO. 7-C	0856.65.221
JL. CANDI PANGGUNG INDAH 7-E	0857.65.221
PERUM GRIYASHANTA A-100	0858.65.221
JL. PINANGSIA 27 MALANG	0798.65.221
JL. TERS. AMBARAWA 45 MALANG	1017.65.221
JL. JOYOSUKO NO. 21	1306.65.221
JL. BENDUNGAN BENING NO. 49	1144.65.221
JL. BENDUNGAN DARMA NO. 6	1063.65.221
JL. KAKTUS NO. 12 MALANG	0740.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I NO. 9-A MLG.	0774.65.221
JL. YAKUT NO. 07 MALANG	1182.65.221
JL. MT. HARYONO NO. 80	1393.65.221
JL. BEND. SENGGURUH 35 & 37 MALANG	0846.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH NO. 18	1089.65.221
JL. SEMANGGI TIMUR NC	0725.65.221
JL. WIJAYA KUSUMA ATAS 28	0690.65.221
JL. GRIYA SHANTA P-297	0703.65.221
GRIYA SHANTA P-299 MALANG	0705.65.221
JL. BENDUNGAN RIAM KANAN 5	1392.65.221
JL. BUNGA KOPI 15 MALANG	0768.65.221
JL. KEMBANG TURI 26 MLG.	0761.65.221
JL. TERS. BENDUNGAN WONOGIRI 4-A	0892.65.221
JL. MT HARYONO 17 NO. 151	1197.65.221
JL. RAYA SUMBERSARI 239-A	1350.65.221
JL. MT .HARYONO 17 NO. 8 MALANG	1195.65.221
JL. AKIK NO.15 MALANG	1072.65.221
PONDOK ALAM SIGURA-GURA A3/13	0386.64.221
JL. BEND. WADAS LINTANG 19	0908.65.221
JL. MT. HARYONO GG.XVII / 219	1065.65.221
JL. SUNAN MURIA NO. 2	0911.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/ N.2-A MLG.	0756.65.221
JL. TERS. WIJAYA KUSUMA ATAS 21	0721.65.221
JL. PISANG KIPAS 67	0929.65.221
JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 62	0792.65.221
JL. ANDONG SELATAN 31	0947.65.221
JL. MERTOJOYO BLOK A-4	0715.65.221

JL. MERTOJOYO SELATAN II/3 MALANG	1113.65.221
JL.SUKARNO HATTA 11 MALANG	0971.65.221
JL. KEMBANG KERTAS NO. 25	0720.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR NO. 3	0790.65.221
JL. MEGAMENDUNG 23	0390.64.221
JL. MERTOJOYO SELATAN GG. 3	1110.65.221
JL. BENDUNGAN JATI LUHUR NO. 17	0830.65.221
JL. PISANG KIPAS 65 MLG.	0685.65.221
JL. SANAN GG. I -A NO. 33	0705.61.221
JL. PEKALONGAN 2-C	1739.62.221
JL. TERS WIJAYA KUSUMA ATAS NO 24 - 26 MLG	0734.65.221
JL. SENGGANI 26 MALANG	0769.65.221
JL. SIBAYAK 17 MALANG	0409.64.221
JL SIMBAR MENJANGAN 14	1223.65.221
JL. SIMPANG BOROBUDUR UTARA VII/29	1078.65.221
JL. SEMANGGI TIMUR NO. 11-A	0930.65.221
JL. JOYO TOMBAK REJOIA	1239.65.221
JL. KEMBANG TURI NO. 18 - C	0773.65.221
JL.AKIK NO 3	1237.65.221
JL. SIMP. BATU PERMATA NO. 1 MALANG	1071.65.221
JL. AKIK NO. 16	1196.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 36 MALANG	1717.62.221
JL. TERS. BENDUNGAN SIGURA-GURA 7	0913.65.221
JL. MT. HARYONO 210-A	1062.65.221
JL. NUSA INDAH NO. 69 MALANG	0743.65.221
JL. KEMBANG KERTAS NO. 24	0758.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 17-A MALANG	1744.62.221
JL. SUNAN MURIA II BLOK C 12	0824.65.221
JL. SUNAN AMPEL I/ NO. 2	0849.65.221
JL. BENDUNGAN SENGURUH 15	0906.65.221
JL. D. TONDANO RAYA F4-A-14 MALANG	0239.63.221
JL. BEND. BATU JAHE NO. 5	0920.65.221
JL. SUKARNO HATTA PTP I NO. 5	0931.65.221
JL. WATU GONG 25	1147.65.221
JL. KEMBANG KERTAS A-12	0669.65.221
JL. WATU GONG 17-E	1004.65.221
JL. WATU MUJUR II/24	1283.65.221
JL. PEKALONGAN NO. 1	1740.62.221
JL. SIMP. SEMANGGI TIMUR NO. 10	0784.65.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR NO. 6-B	1243.65.221
JL. JAKARTA DALAM 166	1866.62.221
JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 18	1245.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I KAV-4F	0778.65.221
JL.BEND. SIGURA-GURA III NO 28	1341.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS GG.XV/14-A	1064.65.221
JL. SUNAN MURIA IVBLOK B1 NO 17 MALANG	1297.65.221
JL. JOMBANG GG.I NO. 9 MALANG	1769.62.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/ NO. 62-C	0843.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA VI/33-A	0844.65.221
JL. KERTOAJI NO.6	1200.65.221

JL. BUNGA KOPI 9-A	0662.65.221
JL. JOYOSUKO GG.III/10	1164.65.221
JL.BATUJAJAR 14 MALANG	1781.62.221
JL. SUKARNO HATTA PTP I KAV-4	1070.65.221
JL. BENDUNGAN TANGGA NO. 1	1010.65.221
JL. BENDUNGAN BENING 57	0895.65.221
JL. JANTI BARAT II NO. 4	0449.64.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT 3 /14	0860.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT III/14B	0861.65.221
JL. BENDUNGAN SENGGURUH 16	0890.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR NO. 24	0882.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM NO. 18	0812.65.221
JL. BUNGA ANDONG 3-D MALANG	1221.65.221
JL. KEMBANG TURI 26 MALANG	0764.65.221
JL. JOYO SUKO I/6-A MALANG	1116.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR KAV. 1	0987.65.221
GRIYA SHANTA M-524	0704.65.221
JL. PEKALONGAN 6-A	1753.62.221
JL. CANDI MENDUT TERUSAN NO.2A MALANG	1052.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA BARAT GG.I NO. 14	0862.65.221
JL. JOYOSUKO TIMUR GG.I NO. 8-B MLG.	0754.65.221
JL. CANDI II-A / 470 KARANG BESUKI	0385.64.221
JL. WATUGONG NO. 3	1258.65.221
JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 57	0795.65.221
JL. MERTIJOYO B-01	0716.65.221
JL. JOYO RAHARJO (DEPAN TAMAN MERJOSARI) MALANG	1176.65.221
JL. JOYOSUKO TIMUR I/ 10-A	0717.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 38	1733.62.221
JL. JOYO SUKO NO.1-A	1039.65.221
JL. JOYOSUKO METRO NO. 41 J	0814.65.221
JL. JOYO SUKO METRO III/9	0808.65.221
JL. WATU GONG NO. 2	1152.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA II NO.3	1198.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA II NO. 5	1199.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 2-A	1121.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/17	1019.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 35	1106.65.221
JL. TERS. WONOGIRI KAV 5/6	0888.65.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI NO. 5	0836.65.221
JL. CANDI AGUNG III/NO. 18	0902.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI NO. 07	1105.65.221
JL. BENDUNGAN WONOREJO NO.4	0966.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR 39	0877.65.221
JL. BENDUNGAN JATI LUHUR 4	0837.65.221
JL. KEDUNG OMBO 2	0936.65.221
JL. KEDUNG OMBO NO. 4	1132.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DLM 10 B MALANG	0813.65.221
PERUM BUMI PALAPA E-30	0691.65.221
JL. BEND. SENGGURUH 21B	1170.65.221
JL. TRUNOJOYO NO. 34	1807.62.221

JL. GAJAHMADA NO. 4 MALANG	1915.62.221
JL. TELAGA WARNA B-3	1092.65.221
JL. TLOGOMAS RAYA III/66-Z	1193.65.221
JL. KUMIS KUCING NO.28	1308.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA 27	0941.65.221
JL. BUNGA ANDONG KAV-5	1001.65.221
JL. TERUSAN SURABAYA 24-A	1805.62.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-I-A	1787.62.221
JL. SIMPANG IJEN BLOK A-29	1790.62.221
JL. TERS. AMBARAWA 55 RT.3/RW.5 SUMBERSARI	1036.65.221
JL. ANDONG SELATAN 3	0983.65.221
JL. SERANG 3	0961.65.221
JL. KERTO WALUYO 6	1018.65.221
JL. BENDUNGAN WLINGI 22-A	1145.65.221
JL. BEND. BATU JAHE NO. 3	0921.65.221
JL. BENDUNGAN JATILUHUR NO. 7	1206.65.221
JL. SUMBERSARI GG. IV/ NO. 56-B	0794.65.221
JL. BUNGA MERAK NO.20	1007.65.221
JL.WATUGONG 11	1084.65.221
JL. ANDONG TIMUR NO. 6-A RT.6/RW.2	1032.65.221
JL. BUNGA MERAK I KAV-22	0918.65.221
JL. WATU GONG 15-F	1055.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/NO. 19	1139.65.221
JL. BELAKANG RSUD NO. 11 MALANG	1784.62.221
JL. BENDUNGAN WONOGIRI 5	0775.65.221
JL.BEND.SIGURA-GURA III/11	1317.65.221
JL. SUMBERSARI GANG IV/226-C	0919.65.221
JL. VETERAN DALAM V	1856.62.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR 23	0980.65.221
JL.BUNGA MERAK I NO 4	1280.65.221
JL.CANDI KALASAN 39 MALANG	0712.61.221
JL. SUMBERSARI 1/2 MALANG	1324.65.221
DINOYO PERMAI KAV-42 , RT.11/RW.03	1059.65.221
JL. SEMANGGI BARAT 6	0771.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS XV-C/15-A	1054.65.221
JL. BEND. SEMPOR NO.21	1265.65.221
JL. JUNGGO 16 MALANG	0958.65.221
JL. JOMBANG GG. III/18 MALANG	1776.62.221
JL. BEND. SENGGRUH 23 MALANG	0853.65.221
JL. MT. HARYONO NO. 9 MALANG	1096.65.221
JL. TOPAZ O2	1100.65.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR NO. 4-A	0693.61.221
JL. A. YANI UTARA GG. DELIMA 496	0721.61.221
KERTORAHAYU NO.66	1353.65.221
JL. SUKARNO HATTA PTP II NO. 19	0842.65.221
PERUM. GRIYA MANDIRI KAV 26/28	1310.65.221
PERUM GRIYA SHANTA L 230 MALANG	0938.65.221
JL. GAJAYANA NO.85	1339.65.221
JL. JOYO UTOMO NO. 1	0963.65.221
JL. TERUSAN VENUS I/5	1118.65.221

JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 20	0755.65.221
JL. JEMBER NO. 5 MALANG	1841.65.221
JL. KERTOPAMUJI NO. 71	0924.65.221
JL. JOMBANG GG. I/NO.14	1878.62.221
BUKIT CEMARA TUJUH KAV-9 BLOK I	1022.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I NO.11	1259.65.221
JL. CANDI AGUNG III NO. 20	1169.65.221
JL. SIGURA-GURA BARAT III/11	1298.65.221
JL. TELAGA WARNA NO. 06/8-A	1150.65.221
JL. BUNGA KAKTUS 6-A MALANG	0701.65.221
JL. BEND.SIGURA-GURA V NO. 4	1273.65.221
JL. KEDUNGOMBO 5 MALANG	0972.65.221
JL. KEMBANG KERTAS 3-A	0699.65.221
JL. KEMBANG KERTAS KAV- A-1	0682.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V / 20 MALANG	1126.65.221
JL. KARET NO. 2	0914.65.221
JL. SUKARNO HATTA PERUM PTP I	0982.65.221
JL. SONGGOLANGIT 48-B	0727.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA I KAV-9 MALANG	0777.65.221
JL. CANDI JOLOTUNDO BLOK E-729	0793.65.221
JL.BEND.SIGURA2 KAV07/08	0750.65.221
JL. BEND. SIGURA-GURA II NO.2	1172.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK 10- B	1742.62.221
JL. GRIYASHANTA EXCECUTIVE M-526	0757.65.221
JL. WATUGONG NO. 15	1207.65.221
JL. KEMBANG TURI 18 MLG.	0760.65.221
JL. TLOGOMAS GG. III/56A	1242.65.221
JL. MONSTERA NO. 20	0697.65.221
JL. BUNGA MERAK II/ NO. 16	1154.65.221
JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA I NO. 46	1173.65.221
JL. KENDALSARI BARAT 14	1278.65.221
JL. CANDI KALASAN IV/5	0727.61.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 7/112	1058.65.221
JL. WIDURI NO. 9 MALANG	0821.65.221
JL. MEGA MENDUNG 21	0931.64.221
JL. DANAU RANAU G.7 B-09	0253.63.221
JL B.KUMIS KUCING 8	1220.65.221
JL. MAGELANG NO. 5	0722.65.221
JL. BEND.SIGURA-GURA KAV-6	0748.65.221
JL MT HARIONO I/18	1347.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH I/KAV 7	1184.65.221
JL. WATU MUJUR I/1 MALANG	0676.65.221
JL.JOMBANG III 2B	1855.62.221
JL. TANGERANG NO. 6	0979.65.221
JL. SUMBERSARI IV/9A	1319.65.221
JL. TELAGA WARNA BLOK B-23-C	1119.65.221
JL. MT HARYONO GANG I NO.21	1355.65.221
JL. CANDI TROWULAN 27	0709.65.221
JL. MERTOJOYO SELATAN BLOK C.O1A	1115.65.221
JL. BENDUNGAN RIAM KANAN B2	1168.65.221

JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA V/ NO. 9	1109.65.221
JL. VETERAN II KAV 37	1741.62.221
JL. BENDUNGAN WLINGI NO. 15	0848.65.221
JL. KEMBANG TURI 21	0770.65.221
JL.BUNGA ANDONG SELATAN I KAV.38	1235.65.221
JL. SENGGANI NO. 6-A	0698.65.221
JL. CANDI WARINGIN NO. 8	0820.65.221
JL. KEBEN II B NO. 11	0403.64.221
JL. SIMP. SUNAN KALIJAGA I KAV. 8	1293.65.221
JL. SIMPANG SEMANGGI TIMUR 11 MALANG	1171.65.221
JL. SIMP. BATU PERMATA 76	1155.65.221
JL. JOYO RAHARJO 281	1080.65.221
JL. SIGURA-GURA V/14-A	1135.65.221
JL. KEBEN II A NO.26	0411.64.221
JL. KERTORAHAYU 67	1091.65.221
JL. PINANGSIA NO. 2	0880.65.221
JL. B. VINOLIA GG.7 NO. 5	0692.65.221
JL. SUNAN MURIA IV/ B1-NO. 10 MALANG	0970.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA DALAM NO. 6	0965.65.221
JL. CENGKEH NO. 104 MALANG	1033.65.221
SIGURA-GURA BARAT RAYA NO. 9	0455.64.221
TAMAN SUHAT INDAH KAV-78	0700.65.221
JL. TANGERANG NO. 3 MALANG	1842.62.221
JL. RAYA SUMBERSARI 285 B	1348.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS XV-C/05-D	1183.65.221
JL. TERS. SIGURA-GURA NO.4	0845.65.221
JL. TLOGOMAS 15/10	1103.65.221
JL.CIKAMPEK 13	1900.62.221
JL. PEKALONGAN 6-C	1713.62.221
JL. SIMPANG KEPUH NO. 22-C	0401.64.221
JL. SUNAN AMPEL I/15	1263.65.221
JL. SUMBERSARI IV/259-B	1271.65.221
JL KEBEN IIB NO 20 MALANG	0405.64.221
JL. REMUJUNG 22-A MALANG	0763.65.221
JL. RANUGRATI NO. 30	0250.63.221
JL. TELAGA WARNA BLOK B NO. 22A	1266.65.221
JL. TAMAN BOROBUDUR INDAH BLOK A NO. 2	0752.61.221
JL. SIMP. BOROBUDUR 2-A	0674.65.221
JL. SIMBAR MENJANGAN 20	0706.65.221
JL.PINANG MERAH I/KAV.3	0779.65.221
JL. PISANG KIPAS NO. 10	0668.65.221
JL. KEMBANG KERTAS IV/ NO. 5	0671.65.221
JL. WATUGONG NO. 15-A	0654.65.221
JL. SIGURA-GURA KAV-14 MALANG	1146.65.221
JL. RAYA TLOGOMAS NO. 14	1160.65.221
JL. TERS. CIKAMPEK KAV-16 MALANG	1745.62.221
JL. BUNGA ANDONG TIMUR 27	0984.65.221
BUKIT CEMARA TUJUH BLOK 5 NO. 106	1187.65.221
JL. CANDI BIMA II/2-B	1133.65.221
JL. SUNAN KALIJAGA NO. 18	1107.65.221